



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT CILACAP  
DALAM PEMBINAAN POTENSI MARITIM  
GUNA MENGHADAPI IMIGRAN GELAP**

TESIS

**HARI MULYADI**

**120160101012**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PRODI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR**

**SEPTEMBER 2017**



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT CILACAP  
DALAM PEMBINAAN POTENSI MARITIM  
GUNA MENGHADAPI IMIGRAN GELAP**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains dalam bidang Ilmu Pertahanan

**HARI MULYADI**

**120160101012**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PRODI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR**

**SEPTEMBER 2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

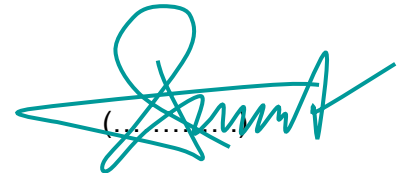
Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Hari Mulyadi  
NIM : 120160101012  
Program Studi : Strategi Perang Semesta  
Judul Tesis : **PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN  
LAUT CILACAP DALAM PEMBINAAN  
POTENSI MARITIM GUNA  
MENGHADAPI IMIGRAN GELAP**

Tesis berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam bidang Pertahanan pada Program Studi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Laksda TNI Dr. Ir. H. Supartono, M.M.



Pembimbing II: Kol.Adm Afrizal Hendra, S.IP, M.Si, M.Si (Han) (.....)

Penguji I : Mayjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP.,M.AP



Penguji II : Mayjen TNI (Purn/Mar) Dr.Ir. Syaiful Anwar,  
M.Bus., M.A



Penguji III : Kol Inf Dr.(Cand) Deni D.A.R., M.Si (Han)



Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : September 2017

## **PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub-bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku

Bogor,            September 2017

Hari Mulyadi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Mulyadi  
NIM : 120160101012  
Program Studi : Strategi Perang Semesta  
Fakultas : Strategi Pertahanan  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT CILACAP  
DALAM PEMBINAAN POTENSI MARITIM  
GUNA MENGHADAPI IMIGRAN GELAP

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor,            September 2017

Hari Mulyadi

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah rabbil'alamin, Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan, maka pada akhirnya tesis yang merupakan persyaratan untuk dapat menempuh ujian magister di bidang ilmu pertahanan ini dapat di selesaikan dan di ujikan. Penulis menyadari tidak mudah untuk mengkaji sebuah konsep Pangkalan TNI AL dalam Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) yang merupakan fungsi TNI AL yang kedepan semakin banyak tantangan masalah pembinaan kemaritiman.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantudalam proses penyusunan tesis ini dengan memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan pantas untuk menerimanya, kepada Laksda TNI Dr. Ir. H. Supartono, M.M sebagai dosen pembimbing satu, dan Kolonel Adm Afrizal Hendra, S.I.P, M.Si, M.Si (han) sebagai dosen pembimbing dua.

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kaprodi SPS, Kolonel Inf. Deni D.A.R., M.Si. (han) atas arahan dan bimbingan selamamenempuh studi dan terima kasih kepada kepada Mayjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP, M.APselaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan dan Laksma TNI Dr. Suhirwan selaku Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan serta kepada dosen-dosen SPS yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dan untuk rekan-rekan mahasiswa SPS C-8 dan rekan-rekan pengurus BEM Unhan, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas kebersamaannya.

Tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis untuk bisa mengakses semua referensi ilmiah, mengakses dokumen sejarah terkait, dan mewawancara narasumber. Meskipun demikian, peran Lanal Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi imigran gelap telah coba dituliskan dalam tesis ini dengan segala kekurangan/kelebihan. Akhirnya, penulis mengharapkan masukan dari sidang pembaca demi kesempurnaan kajian sebidang di kesempatan mendatang.

Semoga tesis ini dapat menambah khazanah keilmuan Pertahanan dan juga peran TNI AL dalam bidang pembinaan potensi maritim.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Aamiin.

Bogor, September 2017

Hari Mulyadi

## **ABSTRACT**

*Name : Hari Mulyadi*  
*NIM : 120160101012*  
*Study Program : Total War Strategy*  
*Thesis Title : The Role of Cilacap Naval Base in Managing Maritime Potential to Address Illegal Immigrant Problems.*

*In order to implement the management towards maritime potential on coastal area to tackle down the non-military threats especially illegal immigrants, there are problems regarding members' competencies and the range of monitoring that is too wide. The root of problem is not only from the personnel themselves, but also how the role of Cilacap Naval Base in managing the maritime potential on coastal area. This study is aimed to analyze the implementation of maritime potential management towards people of the coastal area, and analyze the developing factors in the implementation of maritime potential management through illegal immigrants monitoring. This study uses qualitative method with case study approach, through in-depth interview, observation, and documentation. In this study, the researcher found several results of research: Cilacap Naval Base's role in managing maritime potential packed in Maritime Potential Management (Binpotmar), conducting the five territorial skills and the results of maritime potential development can be felt the value of benefits by people of coastal area, weak cooperation and supervision on the handling of illegal immigrants. With the support of managing maritime potential packed in the five territorial skills implementation has been able to achieve the goals which have been set, that is: the formation of space, instrument, condition of struggle and the realization of TNI-AL and people unity in all working areas of Cilacap Naval Base in order to support the core tasks Cilacap Naval Base in order to deal with illegal immigrants.*

*Keywords: Role of Cilacap Naval Base, Maritime Potential Management, Illegal Immigrant*

## ABSTRAK

Nama : Hari Mulyadi  
NIM : 120160101012  
Program Studi : Strategi Perang Semesta  
Judul Tesis : Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap dalam Pembinaan Potensi Maritim Guna Menghadapi Imigran Gelap

Dalam rangka melaksanakan pembinaan potensi maritim terhadap daerah pesisir untuk menghadapi ancaman non militer terutama imigran gelap, terdapat permasalahan yaitu kompetensi anggota yang bertugas masih dinilai kurang dan cakupan wilayah pembinaan yang terlalu luas. Masalah ini bukan hanya bersumber dari pembinaan personel potmar sendiri tetapi bagaimana peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim terhadap masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan potensi maritim terhadap masyarakat pesisir di Lanal Cilacap, menganalisis faktor-faktor yang berkembang dalam pelaksanaan pembinaan potensi maritim baik internal maupun eksternal, menganalisis peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim membantu pengawasan imigran gelap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan pengumpulan data, dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian di temukan beberapa hasil penelitian, yaitu: peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim dikemas melalui manajemen Binpotmar, melakukan pembinaan lima kemampuan teritorial dan hasil pelaksanaan pembinaan potensi maritim dapat dirasakan nilai manfaatnya oleh masyarakat desa pesisir, lemahnya kerjasama dan pengawasan terhadap penanganan imigran gelap, Dengan dukungan manajemen pembinaan potensi maritim yang dikemas dalam implementasi lima kemampuan teritorial telah mampu mencapai sasaran yang ditetapkan dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat desa pesisir, yaitu: terbentuknya Ruang, Alat dan Kondisi Juang serta terciptanya kemanunggalan TNI AL – Rakyat di seluruh wilayah kerja Lanal Cilacap dalam rangka mendukung tugas pokok Lanal Cilacap guna menghadapi ancaman non militer termasuk penanganan imigran gelap.

*Kata Kunci* : Peran Lanal Cilacap, Pembinaan Potensi Maritim, Imigran Gelap

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iii
PERNYATAAN IJIN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Signifikansi Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis .....	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka.....	13
2.1.1 Teori Peran.....	13
2.1.2 Teori Pembinaan .....	16
2.1.3 Teori Pengawasan .....	18
2.1.4 Teori Sinergitas .....	22
2.1.5 Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.....	23
2.1.6 Pembinaan Potensi Maritim.....	24
2.1.7 Ancaman Nonmiliter .....	30

2.1.8 Imigran Gelap.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu .....	33
2.3 Kerangka Pemikiran .....	40
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Desain Penelitian .....	42
3.2 Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian .....	43
3.2.1 Sumber Data .....	43
3.2.2 Subyek Penelitian.....	44
3.2.3 Obyek Penelitian .....	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.3.1 Wawancara .....	46
3.3.2 Studi Pustaka .....	47
3.4 Teknik Analisis Data.....	47
3.5 Prosedur Penelitian .....	49
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	49
3.5.2 Data Primer .....	50
3.5.3 Data Sekunder .....	50
3.5.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data.....	51
3.6 Jadwal Penelitian .....	52
BAB 4 ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Objek Penelitian .....	54
4.1.1 Deskripsi Lanal Cilacap.....	54
4.1.2 Deskripsi Informan .....	56
4.1.3 Deskripsi Pembinaan Potensi Maritim.....	57
4.2 Analisa Data dan Interpretasi Hasil .....	61
4.2.1 Hasil Pelaksanaan Lanal Cilacap dalam Binpotmar ...	61
4.2.2 Hambatan Lanal Cilacap dalam pelaksanaan Binpotmar.....	92
4.2.3 Penerapan Lanal Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi Imigran Gelap .....	96
4.3 Pembahasan .....	100
4.3.1 Pelaksanaan Lanal dalam Binpotmar .....	101
4.3.2 Hambatan Lanal dalam pelaksanaan Binpotmar .....	107

4.3.3 Lanal dalam Binpotmar guna menghadapi Imigran Gelap	111
.....	111
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....	119
5.1 Simpulan .....	119
5.2 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121
Lampiran	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Episode Peran .....	14
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lanal Cilacap .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Daftar Prajurit /Aparat Potmar Lanal Cilacap .....	6
Tabel 1.2	Kasus Imigran Gelap di Perairan Cilacap.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1	Teknik Wawancara dan Dokumnetasi.....	49
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian.....	53
Tabel 4.1	Deskripsi Informan .....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Panduan Wawancara .....	126
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Penelitian.....	128
Lampiran 3	Transkrip Wawancara.....	129
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian.....	139

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar yang memiliki kondisi konstelasi geografis yang strategis, karena wilayah Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan dua samudra sehingga dengan posisi geografis tersebut menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional (Marsetio, 2014). Dengan realitas geografis dan keuntungan secara geopolitik di kawasan tersebut tidak selalu membuat Indonesia memperoleh keuntungan secara langsung, khususnya pada domain maritim yang menempatkan laut sebagai satu instrumen utama untuk kesejahteraan rakyat, sebagai sarana transportasi dan kekayaan ekonomi yang dikandungnya .

Mengacu pada pendapat Cribb, R dan Ford, M (2009) menyatakan bahwa pengelolaan laut penuh dengan paradoks. Di satu sisi laut dilihat sebagai sumber kerentanan jika tidak dikelola dengan baik tetapi di sisi lain juga memberikan berkah tersendiri. Menurut mereka, laut bisa menjadi tempat yang menguntungkan bagi berkembangnya kekuatan musuh dan orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap negara dan orang lain. Bukan saja hal itu dibuktikan oleh adanya kejadian-kejadian perampokan di laut, tetapi juga untuk kasus Indonesia, secara historis kedatangan kolonial ke Indonesia terjadi melalui jalur laut (Octavian, A& A. Yulianto, 2015). Selain itu, maraknya penyelundupan senjata, obat-obatan terlarang, pencurian ikan serta imigran gelap pencari suaka yang melewati jalur laut. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 6 (1) huruf c berbunyi TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai pemulih terhadap keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Seperti diketahui bersama menjamin keamanan negara adalah tugas pemerintah yang dalam hal ini

didelegasikan atau ditugaskan kepada instansi pemerintah yang terkait dengan bidang keamanan Negara diantaranya TNI, Polri dan aparat penegak hukum dan instansi lainnya yang dapat mendukung stabilitas keamanan negara. Dalam pelaksanaan tugas dan keamanan oleh para stake holders dalam lingkup keamanan nasional, yang membedakan adalah porsi peran dan fungsi dari masing-masing instansi tersebut serta sangat dituntut adanya kerjasama yang baik (sinergitas). Dilihat dari konteksnya, fungsi TNI secara khusus dan tegas menugaskan kepada TNI untuk melakukan aksi atau tindakan nyata (mengambil peran) apabila keamanan tidak kondusif terlebih lagi bila mengancam eksistensi dan keselamatan negara.

Sebagai tindak lanjut tersebut diatas, TNI diberi tugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang TNI, pasal 7 (2) huruf b angka 8, menugaskan TNI untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Pemberdayaan Wilayah Pertahanan merupakan kegiatan untuk perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan, pengendalian serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada (geografi, demografi, sumber daya alam/buatan, sarana dan prasarana, nilai, teknologi dan dana) untuk menjadi kemampuan dan kekuatan wilayah yang tangguh. Sebagai pedoman agar tidak salah inteprestasi bagaimana pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan, Panglima TNI mengeluarkan Naskah Sementara Petunjuk TNI tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sesuai dengan surat keputusan Panglima TNI nomor Skep/455/XII/2005. Dengan tegas dikatakan untuk mewujudkan pemberdayaan wilayah pertahanan masing matra (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) menyiapkan kekuatan kewilayahan sesuai kematraan melalui pembinaan territorial sesuai kematraan: pembinaan territorial (AD), pembinaan potensi maritim (AL), dan pembinaan potensi dirgantara (AU).

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai bagian dari TNI juga mengemban tugas yang sama sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, diantaranya melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan, menegakkan

hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Selanjutnya Kasal mengeluarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: 23 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Prosedur Staf Potensi Maritim TNIAL, salah satu tugas tersebut dilaksanakan Staf Potensi Maritim (Spotmar) bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum Angkatan Laut di bidang teritorial matra laut yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pembinaan kemampuan teritorial, pembinaan ketahanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial, pembinaan bakti TNI AL dan pembinaan perbatasan laut/pulau pulau kecil terluar dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla) guna menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek Laut dan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pembinaan fungsi dan sistem metode dalam rangka pembinaan organisasi bidang teritorial matra laut melalui pembinaan satuan, pengawasan dan pengendalian;
- b. Perumus kebijakan, strategi dan rencana Kasal tentang penyelenggaraan teritorial matra laut, meliputi: pertama, pembinaan teritorial matra laut, (fungsi organik teritorial terdiri dari: program kerja, anggaran, analisa dan evaluasi kemampuan teritorial matra laut; pembinaan kemampuan Potmar; pembinaan ketahanan wilayah maritim; pembinaan komunikasi sosial maritim; bakti TNI Angkatan Laut; dan pembinaan wilayah perbatasan laut dan pulau pulau kecil/terluar), pembinaan kemampuan teritorial matra laut, dan pembinaan kekuatan teritorial matra laut; kedua, operasi Teritorial TNI matra laut meliputi (penyelenggaraan Operasi Teritorial pada Operasi Militer Perang dan penyelenggaraan Operasi Teritorial Operasi Militer Selain Perang);

- c. Perencana dan pelaksana kerja sama dengan instansi terkait guna sinkronisasi penyelenggaraan teritorial TNI matra laut dalam rangka penyiapan RAK Juang yang tangguh;
- d. Perencana dan pelaksana kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan bantuan TNI matra laut di bidang kemanusiaan;
- e. Perencana dan pelaksana kerja sama dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan bantuan TNI matra laut di bidang percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Perencana kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan laut guna mendukung Sistem Pertahanan Semesta;
- g. Perumus, perencana dan mengoordinasikan penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Laut dalam rangka Dawilhanla guna mendukung Sistem Pertahanan Semesta.

Salah satu tugas Binpotmar dilaksanakan oleh Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) TNI AL merupakan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Markas Besar TNI AL melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, untuk mewujudkan pemberdayaan wilayah pertahanan laut secara terus menerus dan berkesinambungan, Dispotmar TNI AL melaksanakannya melalui pembinaan potensi maritim (Binpotmar). Sebagaimana dijelaskan dalam surat keputusan Kepala Staf TNI AL (Kasal) tentang Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) sesuai dengan surat keputusan Kasal nomor 24/VII/1997. Bahwa Dispotmar bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi nasional maritim yang meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarananasional di bidang maritim serta dinamisasi pembangunan kelautan serta menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis Kasal dalam bidang pembinaan potensi maritim.
- b. Merencanakan program dan kegiatan Dispotmar dalam bidang potensi maritim secara berlanjut.

- c. Merumuskan saran Kasal kepada Panglima TNI mengenai penyelenggaraan pembinaan potensi maritim dan pendinamisasian pembangunan kelautan dalam rangka keterpaduan pembinaan potensi pertahanan keamanan negara khususnya pembinaan teritorial TNI.
- d. Mengembangkan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk-petunjuk dalam bidang pembinaan kemampuan potensi maritim dan pendayagunaan potensi maritim serta dinamisasi pembangunan kelautan.
- e. Melaksanakan pembinaan kemampuan potensi maritim dan pendayagunaan potensi maritim.
- f. Melaksanakan dinamisasi program pembangunan kelautan.
- g. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- h. Mengadakan koordinasi dengan badan-badan dan Instansi terkait di dalam dan di luar TNI AL.

Binpotmar pada hakekatnya adalah menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat, melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat.

Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap selaku Komando Kewilayahan (Kowil) TNI AL salah satu tugas pokoknya melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di laut (Dawihanla) melalui Binpotmar di wilayah kerja Lanal Cilacap meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. (Lanal Cilacap, 2016). Pelaksanaan Binpotmar dilaksanakan oleh staf Potensi Maritim (Potmar) Lanal Cilacap sesuai dengan surat keputusan Danlantamal V nomor: Kep/44/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Organisasi Prosedur (Orgapros) Lanal Cilacap mempunyai tugas sebagai berikut: pertama: menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan potensi maritim berdasarkan rencana dan program Lanal Cilacap, kedua: menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pembinaan potensi maritim, ketiga: mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi tentang

potensi maritim dalam rangka pembinaan menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan di laut.

Peran Lanal Cilacap dalam melaksanakan Binpotmar seperti pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial di wilayah kerjanya dalam mendukung pertahanan negara khususnya dalam menghadapi imigran gelap di wilayah Cilacap masih belum optimal. Hal ini disebabkan prajurit/aparat Potmar Cilacap belum mempunyai kualifikasi kemampuan di bidang teritorial maritim sehingga kegiatan penyiapan dan pembinaan masyarakat pesisir secara terus menerus sepanjang waktu untuk mendapatkan kebersamaan, kesatuan dan kohesivitas antara TNI dengan rakyat dirasakan masih kurang.

Tabel 1.1 Daftar Prajurit Potmar Lanal Cilacap Tahun 2016

NO	Satker	DSP					RIIL				
		Pwa	Ba	Ta	PNS	Jml	Pwa	Ba	Ta	PNS	Jml
1	Staf Potmar	4	4	3	1	12	1	4	3	1	9
2	Posal Klaces	1	2	5	1	9	-	3	1	-	4
3	Posal Lohgending	1	2	5	1	9	-	7	-	-	7
4	Posal Purworejo	1	2	5	1	9	-	4	1	-	5

Sumber: Lanal Cilacap 2016.

Hal ini terdapat juga kesenjangan antara pengisian personel di satuan/unsur operasi sehingga mempengaruhi pembinaan potensi maritim seperti geografi, demografi (masyarakat desa pesisir/maritim) dan pembinaan kondisi sosial. Salah satu tugas prajurit/aparat Potmar Lanal Cilacap adalah mempunyai penguasaan kemampuan wilayah untuk meniadakan atau menetralsir segala bentuk ancaman yang dapat mengancam bagian wilayah Indonesia khususnya ancaman nonmiliter yang masuk wilayah perairan Cilacap. Ancaman nonmiliter yang terdapat

di wilayah Cilacap adanya masuknya imigran gelap melalui perairan laut Cilacap.

Tabel 1.2 Kasus Imigran Gelap di Perairan Cilacap Tahun 2010-2016

Waktu	Lokasi	Jumlah	Asal Negara	Sumber Berita
2012	Kampung Laut	48 Orang	Afghanistan	Imigrasi Cilacap
2013	Kampung Laut	37 Orang	Afghanistan	Imigrasi Cilacap
2013	Karangdawur	101 Orang	Palestina, Iran, Irak, Afganistan, dan Suriah	Basarnas Cilacap
2016	Kampung Laut	24 Orang	Kanada dan Perancis	Lanal Cilacap

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Menurut Subagyo, A dan Wirasuta, D. S (2013) bahwa para Imigran gelap atau pengungsi berasal dari negara-negara yang rawan akan konflik dan minim akan keamanan seperti Pakistan, Myanmar, Afghanistan, Iran, Srilangka, Bangladesh, dan Suriah. Para pengungsi ilegal yang mencari suaka dan transit di Indonesia tersebut, biasanya disebut sebagai manusia perahu atau "*boat people*". Manusia perahu ini terdiri dari laki-laki dan perempuan bahkan tidak sedikit anak-anak dan balita yang mengarungi lautan menggunakan perahu sewaan dengan peralatan dan bekal seadanya. Maka sering kali perahu yang dinaiki oleh para imigran ilegal ini mengalami kecelakaan di tengah laut akibat diterjang ombak dan banyak dari mereka yang terdampar di perairan Indonesia. Demikian juga Imigran gelap yang masuk wilayah Cilacap terjadi karena mengalami kecelakaan di tengah laut atau kehabisan logistiknya.

Menurut Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/111/VIII/2011, Tanggal 18 Agustus 2011 tentang Buku Teritorial TNI dan Peraturan Kasal Nomor: Perkasal/39/VII/2017 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk

Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. Dalam keterangan lebih lanjut dari buku tersebut bahwa untuk mewujudkan secara riil tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui Binpotmar maka ditetapkan sasaran Binpotmar yaitu, pertama: terwujudnya ruang juang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan; kedua: terwujudnya alat juang yang tangguh dan tersedianya komponen cadangan dan pendukung yang tangguh; ketiga: terwujudnya kondisi juang tangguh yaitu sikap perilaku masyarakat yang dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keempat: terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat berupa ikatan yang kokoh kuat dan bersatu padunya TNI dengan rakyat. Perwujudan dari sasaran tersebut merupakan persiapan secara dini sebagai sebuah tindakan antisipatif untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang timbul yang tidak dapat diketahui kapan datangnya.

Dalam peribahasa latin kuno dikatakan "*si vis pacem, para bellum*" yang dikutip dari penulis militer Romawi Publius Flavius Vegetius Renatus: *Igtiur qui desiderat pacem, praeparet bellum*. Peribahasa ini memberikan pengertian "kalau menginginkan perdamaian maka bersiaplah untuk perang". Maksud dari peribahasa tersebut adalah sikap negara hendaknya selalu siap dalam menghadapi berbagai ancaman yang muncul dengan asumsi ketika sebuah negara siap menghadapi ancaman maka pengancam akan mengurungkan niatnya, demikian juga jika ancaman tersebut nyata ada maka kesiapan akan memberikan penangkalan yang efektif. Kegiatan antisipatif yang dilaksanakan prajurit/aparat Potmar Cilacap dalam Binpotmar ini merupakan kegiatan persiapan dan pembinaan masyarakat secara terus menerus sepanjang waktu untuk mendapatkan kebersamaan, kesatuan dan kohesivitas antara TNI dengan rakyat. Dengan timbulnya rasa kebersamaan dapat menciptakan kekuatan daya tangkal yang tangguh dalam rangka mendukung keamanan nasional, disamping kemampuan militer dan kekuatannya. *Output* dari kegiatan Binpotmar adalah terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat, sedangkan *outcome* dari kegiatan Binpotmar adalah kesadaran berbangsa dan bernegara (bela negara) yaitu sikap dan perilaku warganegara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa

dan negaranya. (Mabes TNI, Buku Induk Teritorial, 2011). Harapan dari kondisi tersebut prajurit/aparat Potmar Lanal Cilacap mempunyai pemahaman kemampuan temu cepat dan lapor cepat, kemampuan manajemen teritorial, kemampuan penguasaan wilayah, kemampuan perlawanan wilayah dan komunikasi sosial. (Mabes TNI, Buku Induk Teritorial, 2011).

Mencermati adanya kesenjangan personel dan tugas antara wilayah yang di emban sangat luas, seharusnya dimiliki oleh prajurit/aparat Potmar Cilacap dengan fakta dan kenyataan yang ada di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. Penelitian diawali dengan studi pendahuluan terhadap objek penelitian yaitu Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) Lanal Cilacap. Selain didasari atas adanya kesenjangan antara personel/prajurit dengan unsur-unsur operasi sertacakupan wilayah yang di emban sangat luas oleh prajurit/aparat Potmar Cilacap dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, Lanal Cilacap ini dijadikan tempat penelitian juga didasari berbagai pertimbangan.

- a. Para prajurit/aparat Potmar Cilacap dituntut memiliki lima kemampuan teritorial maritim seperti: kemampuan temu cepat dan lapor cepat, kemampuan manajemen teritorial, kemampuan penguasaan wilayah, kemampuan perlawanan wilayah dan komunikasi sosial. Hal ini di mulainya sejak masuk menjadi prajurit TNI AL dan sampai dengan penugasan menjadi aparat Potmar, namun kemampuan teritorial aparat Potmar Cilacap maritim masih kurang.
- b. Lanal Cilacap memiliki nilai strategis sebagai Pangkalan TNI AL terdepan, Cilacap merupakan alur pelayaran dan menjaga pulau terluar seperti Nusakambangan serta dalam pengamanan dan menjaga obyek vital nasional seperti Unit Pengolahan Pertamina dan dua PLTU di wilayah Cilacap. Jika dalam pelaksanaan tugas Lanal Cilacap dalam Binpotmar terutama guna menghadapi imigran gelap dapat di tangkal dengan baik, maka akan berpengaruh positif terhadap sistem pertahanan negara Indonesia. Namun sebaliknya apabila gagal

dalam menghadapi imigran gelap maka akan berpengaruh negatif terhadap sistem pertahanan negara Indonesia.

- c. Lanal Cilacap dalam melaksanakan Binpotmar melalui pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial dengan metode ketahanan wilayah, Bhakti TNI AL dan komunikasi sosial. Namun apabila tidak dilaksanakan secara sinergis, terkoordinasi dan bekerja sama lintas sektoral dengan Pemerintah, Kementerian/Lembaga, Institusi terkait dan komponen bangsa lainnya maka *output* dan *outcome* tidak dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa pesisir.
- d. Sampai saat ini peneliti belum melihat ada yang mengadakan penelitian ilmiah khusus tentang peran Lanal Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi imigran gelap.

Untuk menganalisa secara mendalam Peran Pangkalan TNI AL (Lanal) di wilayah Cilacap terkait dengan pertahanan negara, maka diajukan proposal Tesis dengan judul “Peran Pangkalan TNI AL dalam Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) guna menghadapi Imigran Gelap”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dapat mempengaruhi Peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dalam Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) guna menghadapi imigran gelap sudah berjalan, Terkait dengan masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu: Bagaimana Peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi menghadapi Imigran Gelap? Selanjutnya rumusan masalah ini dapat diwujudkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana pelaksanaan Pembinaan Potensi Maritim terhadap masyarakat pesisir di wilayah Lanal Cilacap?
- b. Apa faktor-faktor yang berkembang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pembinaan Potensi Maritim di Lanal Cilacap?
- c. Bagaimana peran Lanal Cilacap dalam Pembinaan Potensi Maritim menanganikan Imigran Gelap?

### **1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan pada intinya mempertanyakan peran Lanal Cilacap dalam Binpotmargunamembantu pengawasan Imigran Gelap bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pelaksanaan Pembinaan Potensi Maritim terhadap masyarakat pesisir di Lanal Cilacap;
- b. Menganalisis faktor-faktor yang berkembang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pembinaan Potensi Maritimbaik internal maupun eksternal; dan
- c. Menganalisis peran Lanal Cilacap dalam Pembinaan Potensi Maritim menangani imigran gelap.

#### **1.3.2 Signifikansi Penelitian**

Signifikansi dari penelitian ini adalah mengetahui kegiatan Peran Lanal Cilacap dalam Binpotmar terhadap masyarakat pesisir di wilayah Cilacap, mengingat Cilacap merupakan perairan yang sangat strategis dan dijadikan pintu masuk bagi para imigran gelap sehinggadiperlukan sinergitas dan dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk menangani terhadap imigran gelap melalui pendekatan pembinaan masyarakat desa pesisir khususnya sistem pertahanan semesta terkait ancaman yang dapat mengancam pertahanan negara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi dan kajian peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dalam Binpotmar terhadap masyarakat pesisir Cilacap guna menghadapiimigran gelap dan mendukung pertahanan negara.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Mabes TNI dan TNI AL dalam merumuskan kebijakan

Binpotmar terhadap masyarakat pesisir dalam mewujudkan daya tangkal dan menangani kewilayahan termasuk menetralsir aktifitas warganegara asing yang masuk tanpa ijin.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi instansi-instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan potensi maritim terhadap masyarakat pesisir Cilacap dan membantu pengawasan imigran gelap, yaitu: Mabes TNI AL, Armatim dan Lantamal V, Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Pemda Kabupaten Cilacap dengan teknik wawancara dilakukan kepada pejabat yang berkompeten dibidangnya. Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran, terdiri dari sub-bab tinjauan pustakayang berisi teori peran, konsep pemberdayaan wilayah pertahanan laut/Binpotmar, dan bahasan hasil penelitian sebelumnya, serta sub-bab kerangka pemikiran.

Bab 3 Metode Penelitian, berisi tujuh sub-bab yaitu desain penelitian, sumber data/subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, prosedur penelitian (instrumen, data primer, data sekunder, pengujian keabsahan dan keterandalan data), definisi operasional dan rencana jadwal penelitian.

Bab 4 Analisa Data dan Pembahasan, Dalam bab ini akan menjelaskan penyajian data, penganalisaan data dan membahasnya atau menilai secara intensif antara fakta dihadapkan dengan kebutuhan sehingga dapat dirumuskan dengan baik terkait peran Lanal Cilacap dalam Binpotmar TNI gunamenghadapi Imigran Gelap.

Bab 5 Simpulan dan Saran, Bab ini berisikan tentang simpulan – simpulandan rekomendasi yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil dari penelitian.

Daftar Pustaka.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

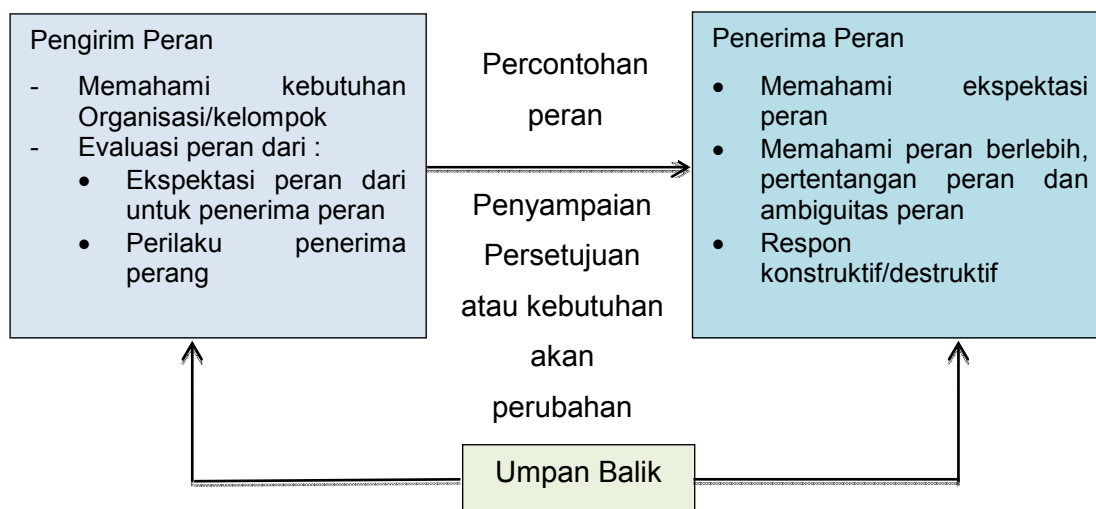
Menurut Sugiyono (2010:58) dalam memahami metode kualitatif menyatakan bahwa deskripsi teori dalam penelitian merupakan fungsi untuk menjelaskan variable yang akan diteliti, definisi deskripsi teori yaitu berisi uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti. Teori-teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator bagi peneliti, dalam melaksanakan penelitian.

##### **2.1.1 Teori Peran**

Menurut Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki (2014: 14) dalam bukunya perilaku organisasi mengatakan bahwa peran adalah tatanan perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi. Teori peran mencoba menjelaskan bagaimana ekspektasi sosial ini berpengaruh pada perilaku penerima peran (pelaku). Bagian ini menelusuri teori peran dengan menganalisis sebuah episode peran dan ditemukan posisi seseorang atau organisasi dalam bentuk peran berlebih, pertentangan peran dan ambiguitas peran.

Peran sebagai sebuah episode menggambarkan adanya interaksi dari dua orang atau komunitas, dimana satu pihak sebagai pemberi atau pengirim peran dan pihak lain sebagai penerima peran. Episode peran dimulai dari persepsi pengirim peran terkait kebutuhan perilaku kelompok atau organisasi. Perilaku tersebut berfungsi sebagai sebuah standar untuk menentukan ekspektasi bagi perilaku penerima peran. Pengirim peran kemudian mengevaluasi perilaku aktual penerima peran secara kognitif terhadap ekspektasi tersebut. Pesan-pesan lisan yang menyangkut perilaku yang tepat selanjutnya dikirim kepada penerima peran untuk menekannya agar berperilaku sesuai yang diharapkan. Menurut Edgar Schein dalam Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki (2014), peran berlebih (*role overload*) terjadi ketika "jumlah yang diharapkan pengirim dari penerima peran jauh melebihi kemampuan penerima peran".

Lihat gambar 2.1.Episode Peran.



Gambar 2.1Episode peran

Sumber: Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. (2014). Perilaku Organisasi. PT. Salemba Empat, Jakarta.

Ketika orang mencoba untuk melakukan banyak hal dalam waktu yang semakin sempit, maka tekanan meningkat dan efektifitas pribadi menurun. Sebagai suatu contoh ketika mahasiswa yang berusaha untuk tetap mempertahankan beban pelajaran yang penuh dan mempertahankan kehidupannya sosialnya sambil tetap bekerja selama 30 jam atau lebih dalam seminggu tentu akan dapat mengalami stress dan bisa berubah menjadi frustrasi. Pertentangan peran (*role conflict*) terjadi ketika "anggota tatanan peran yang berbeda mengharapkan hal yang berbeda dari penerima peran" Pertentangan peran juga bisa dialami ketika nilai-nilai, etika atau standar pribadi yang telah ditanamkan berbenturan dengan ekspektasi orang lain. Misalnya seorang pengawas produksi yang tidak etis mungkin diberitahu oleh seseorang atasan untuk "sedikit memodifikasi" laporan kendali kualitas, sehingga batas waktu yang penting bisa terpenuhi, akibatnya pertentangan peran memaksa pengawas tersebut untuk memilih antara setia tetapi tidak etis atau tidaksetia tetapi etis. Abiguitas peran (*role ambiguity*), terjadi ketika "anggota tatanan peran gagal menyampaikan kepada penerima peran ekspektasi yang mereka miliki atau informan yang dibutuhkan untuk melakukan peran tersebut, entah mereka tidak memiliki informasinya atau mereka sengaja menyembunyikannya. Singkatnya orang-orang

mengalami ambiguitas peran ketika mereka tidak mengetahui apa yang diharapkan dari mereka.

Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama: Peran Formal (peran yang nampak jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami ayah dan istri ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual. Kedua: Peran Informal (peran tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan diamainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

Teori Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi yang menganggap sebagian besar aktifitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasari pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran. Meski kata 'peran' sudah ada diberbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoritis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran. Dalam hal ini perbedaan dalam teori peran, disatu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi

interaksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat dan organisasi, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat di uji secara empiris. Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang dapat membawa pertentangan dan harapan.

Menurut William Shakespeare dalam Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. (2014), menjelaskan bahwa " dunia adalah panggung, dan semua orang adalah pemainnya ; mereka memiliki waktu masuk dan keluarnya sendiri; dan seseorang dalam hidupnya memainkan banyak peran". Hal ini menyatakan secara jelas bahwa pada diri setiap manusia telah melekat peran dalam hidupnya, demikian juga organisasi yang dibentuk oleh manusia juga memainkan peran sesuai lingkup kerjanya.

Dengan teori ini akan dapat memberikan gambaran pada posisi apa Binpotmar dapat di implementasikan dan faktor-faktor pendukung apa yang dapat menefektikan peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar itu sendiri, sehingga tidak terjadi peran berlebih atau terjadi pertentangan peran atau terjadi ambiguitas peran. Kemampuan untuk memainkan peran dengan tepat tanpa mencampuri ranah tugas institusi lainnya akan memberikan peran yang efektif dan dapat membantu penyelesaian permasalahan dengan efisien.

### **2.1.2 Teori Pembinaan**

Menurut Mathis, Robert.L dan Jackson, Jhon.H (2009) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich, John (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok

pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Menurut Mathis, Robert.L (2009:307-308) juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

- a. Mengatur strategi. Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
- b. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.
- c. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
- d. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

Menurut Hidayat, S (1979: 10) bahwa: Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Tangdilintin, Philips (2008:61) mengatakan pembinaan akan menjadi suatu "*empowerment*" atau pemberdayaan dengan maksud:

- a. Menyadarkan dan membebaskan.
- b. Memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri.
- c. Menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksibertanggungjawab.
- d. Mendorong mereka berperan sosial-aktif.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim terhadap masyarakat desa pesisir guna menghadapi imigran gelap dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut rencana pembinaan strategis dan *empowerment*. Dari sudut rencana pembinaan strategis yaitu mengatur strategi, merencanakan, mengorganisasi dan memberi pembenaran sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan *empowerment* atau pemberdayaan dengan melakukan memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri, menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksi bertanggung jawab, mendorong mereka berperan sosial-aktif.

### 2.1.3 Teori Pengawasan

Menurut Siagian S. P. (2003) "Pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan".

Menurut George R. Terry (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut T. Hani Handoko (1996) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sedangkan Menurut Winardi (2000: 224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan

melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh teori tersebut mempunyai maksud yang sama yaitu mendefinisikan bahwa pengawasan itu merupakan kegiatan pengelolaan yang mendasar dan mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Didalam pengawasan terdapat pula prinsip - prinsip yang harus di ketahui. Sebab prinsip - prinsip pengawasan merupakan pedoman yang harus dipegang dan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Silalahi, Ulbert (2005:178) prinsip - prinsip pengawasan tersebut adalah :

- a. Pengawasan harus berlangsung terus - menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- b. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan obyektif.
- c. Pengawasan bukan semata - mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
- e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- f. Pengawasan harus fleksibel.
- g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
- h. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat- tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan.
- i. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

Menurut Siagian, S.P (2003:199), jenis-jenis pengawasan dilingkungan pemerintah dibagi atas :

- a. Pengawasan melekat bisa juga disebut pengawasan atasan langsung, dilakukan oleh pejabat pimpinan, disamping sebagai perencanaan yang cekatan, organisasi yang handal dan sebagai penggerak yang bertanggung jawab dimana setiap pimpinan harus pula menjadi pengawas yang efektif
- b. Pengawasan fungsional, bila dilakukan oleh aparat pengawas dalam suatu instansi tertentu dapat pula dilakukan oleh aparat pengawas yang berada diluar instansi meskipun masih dilingkungan pemerintah.

Disamping pengawasan oleh atasan terhadap bawahan dan pengawasan fungsional, juga sistem pengendalian manajemen (SPM) yang meliputi unsur -unsur organisasi dan tata kerja, rencana kerja, tata cara atau prosedur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain adalah merupakan sistem pencegahan penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa dalam keadaan yang tidak tertib sulit terjadi penyimpangan.

Disamping itu keterbukaan manajemen juga merupakan salah satu sarana untuk mencegah penyimpangan. Bentuk pengawasan warga negara asing. Menurut Sihombing, Sihar (2013) bentuk pengawasan warga negara asing terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing. Sedangkan Pengawasan Lapangan yaitu, pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian warga Negara Asing, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian.
- b. Pengawasan Lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan

lapangan ini dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing.

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Menurut Griffin, Ricky W. (2004: 44). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Tisnawati, E dan Saefullah, K (2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis Robert L. dan Jackson John H. 2006, (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Definisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan–penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Menurut Harahap, S (2001: 14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan

mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan, Masri. S (2004: 61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut Dessler, G (2009: 2), menyatakan bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan penyusunan standar - seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar membantu pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kegiatan warganegara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin, sehingga untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap agar target pembinaan potensi maritim tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

#### **2.1.4 Teori Sinergitas**

Terminologi sinergitas atau dalam bahasa Inggris disebut *sinergistic* dapat dirunut dari kata dasar sinergi. Kata sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Sedangkan bentukan kata bersinergi artinya melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Substansi dari sinergi terletak pada adanya perbedaan nilai-nilai yang saling menghormati untuk menggabungkan kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan. Justru karena adanya perbedaan, maka sinergi dimungkinkan terjalinnya kerja

sama kreatif yang menghasilkan alternatif ketiga yang memberikan keuntungan optimal bagi pihak-pihak yang bersinergi

Menurut teori sinergitas yang disampaikan oleh Stonner, James, A.F. (1996) bahwa hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkat komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi akan menghasilkan tiga sifat dalam kerjasama tersebut, sebagai berikut:

- a. *Defensif*, tingkat kerjasama dan kepercayaan rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif defensif.
- b. *Respectfull*, dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai dan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai.
- c. *Sinergistic*, dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang berarti kerjasama yang terjalin akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disintesis kerjasama antara Pangkalan TNI AL Cilacap dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Binpotmarmelalui sinergitas kerja sama kreatif yang saling menghormati untuk menggabungkan kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan. Kerjasama yang terjalin diharapkan akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari masing-masing pihak, sehingga memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi imigran gelap di wilayah Cilacap.

### **2.1.5 Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut**

Pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengarahan dan pengendalian, serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi sesuatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan di laut.

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dilaksanakan dalam rangka membangun dan mengembangkan kekuatan matra laut dan membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan laut beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pemahaman penyiapan Wilayah Pertahanan beserta kekuatan pendukungnya memiliki korelasi dengan penyiapan ruang, alat dan kondisi juang dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi maritim. Pembinaan sektor geografi merupakan penyiapan ruang juang untuk kepentingan manuver pasukan dan penyiapan logistik wilayah, serta penyiapan sumber daya menjadi kekuatan pendukung Pertahanan Negara. Sedangkan pembinaan pada sektor demografi merupakan penyiapan alat juang yang dipersiapkan sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang mampu didayagunakan membantu Komponen Utama. Pembinaan kondisi sosial pada masa damai merupakan penyiapan kondisi juang yang diarahkan untuk membantu Pemerintah meningkatkan Ketahanan Wilayah yang dapat ditransformasikan menjadi kekuatan Pertahanan Negara pada masa perang.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengerahan dan pengendalian wilayah pertahanan laut untuk kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan Sishanta, dilaksanakan melalui pembinaan kekuatan dan kemampuan mengembangkan serta memberdayakan potensi nasional bidang maritim (Bujukin Dawinhanla, 2011)

#### **2.1.6 Pembinaan Potensi Maritim**

Sebagaimana diketahui, dalam lingkup kemanunggalan TNI AL – Rakyat maka sesungguhnya Binpotmar telah diterapkan sejak jaman penjajah, pada masa itu TNI AL dan rakyat bersama-sama bersatu melawan penjajah. Memasuki jaman Orde Lama kebersamaan TNI AL dan rakyat yaitu bersama-sama memerangi orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap negara. Sedangkan masa Orde Baru penerapan Binpotmar menjadi sangat dominan dan dibebani dengan membantu

kegiatan politik praktis yaitu pelaksanaan sosial politik dari peran dwifungsi ABRI, sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa. Memasuki era reformasi peran Binpotmar untuk membantu masyarakat desa pesisir untuk mencapai kesejahteraannya dan diharapkan dapat tercipta kemandirian TNI AL dengan rakyat.

TNI AL melalui Pembinaan Potensi Maritim bertugas untuk menyiapkan pemberdayaan wilayah pertahanan di laut untuk menjamin kesiapan wilayah dalam menangkal setiap ancaman yang muncul dan dapat mendukung operasi pertahanan dalam rangka keamanan nasional. Kegiatan Binpotmar yang ditujukan sebagai sebuah penangkalan merupakan kegiatan penyiapan, pembinaan dan peningkatan bela negara masyarakat melalui kegiatan pembinaan perlawanan wilayah, pelaksanaan Bhakti TNI AL dan kegiatan komunikasi sosial (Mabes TNI, Bujuk Induk Binter, 2011).

Kegiatan ini sekaligus sebagai pengejawantahan peran TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari kekuatan nasional untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP), hal ini dimungkinkan karena peran Universal angkatan laut yang mencakup peran Militer, Diplomasi dan Polisionil. Salah satunya peran Polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya menangani imigran gelap. Pada kondisi damai kegiatan Binpotmar dilaksanakan untuk menyiapkan potensi wilayah baik berupa SDA, SDB, sarpras, serta sistem nilai yang ada agar dapat bersinergi untuk mewujudkan daya tangkal yang kokoh dalam rangka menangani atau mengatasi ancaman yang dapat mengancam keselamatan negara.

Pembinaan Potensi Maritim pada hakekatnya merupakan upaya, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, baik secara berdiri sendiri atau bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan laut yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan

pendukungnya serta terwujudnya Kemanunggalan TNI/TNI Angkatan Laut–Rakyat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas TNI Angkatan Laut. Dalam penyelenggaraannya, agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara benar oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya ketentuan umum tentang Binpotmar yang meliputi tujuan, sasaran, azas, prinsip, subyek, obyek dan metode.

Pelaksanaan Binpotmar bertujuan untuk mewujudkan kekuatan kewilayahan matra laut yang bersumber dari segenap potensi maritim berupa RAK Juang yang tangguh dan berdaya guna serta tertatanya sistem logistik wilayah dan kekuatan masyarakat maritim sebagai kekuatan pengganda untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. Binpotmar dilaksanakan dengan sasaran menyiapkan dan mendayagunakan RAK Juang yang tangguh melalui pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai dan dana dalam rangka sistem pertahanan semesta meliputi:

- a. Terwujudnya Ruang Juang yang tangguh berupa wilayah pertahanan aspek laut yang siap sebagai mandala perang atau mandala operasi dan mendukung bagi kepentingan operasi satuan sendiri dalam memenangkan pertempuran laut.
- b. Terwujudnya Alat Juang yang tangguh berupa tersedianya komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah terorganisir secara nyata dengan segenap perangnya yang siap digunakan untuk kekuatan pengganda TNI Angkatan Laut untuk memenangkan pertempuran laut.
- c. Terwujudnya Kondisi Juang yang tangguh berupa kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, bertanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa untuk mendukung pertempuran laut.

- d. Terwujudnya Kemanunggalan TNI–Rakyat yang tangguh berupa ikatan yang kokoh dan kuat serta bersatu padunya TNI-Rakyat, baik secara fisik maupun non fisik. (Bujuk Binpotmar, 2015)

Penggunaan Pembinaan Potensi Maritim TNI AL diarahkan untuk membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek laut, pembinaan yang dilaksanakan berupa pendataan potensi yang meliputi sumberdaya alam maritim, buatan, manusia yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.

Dalam implementasinya Binpotmar digunakan untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pertahanan Negara pada masa damai, selama perang (OMP), dan sesudah perang (OMSP) yang bersifat tempur dan non tempur baik secara tersendiri sendiri maupun bersama dengan instansi terkait serta komponen bangsa lainnya yang implementasinya menggunakan metode Binpotmar (Binwanwil, Bhakti TNI AL dan Binkomsos) berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Penggunaan Binpotmar dalam rangka operasi militer untuk perang (OMP) didasari pada pentahapan operasi, sebelum perang, selama perang dan setelah perang (Bujuk Binpotmar, 2015)

Sedangkan penggunaan Binpotmar TNI AL dalam rangka operasi militer selain perang (OMSP) ditujukan untuk menyelenggarakan tugas pokok TNI AL melalui penggunaan Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AL (Armada, Lantamal, Lanal dan Posal) dan kemampuan aparat wilayah yang dimiliki TNI AL, kegiatannya lebih difokuskan pada mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing

yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*), membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. (UU Nomor 34/2004 tentang TNI)

Metode Binpotmar TNI AL yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Binpotmar disesuaikan dengan kepentingan pencapaian tujuan dan sasaran di wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Ketahanan Wilayah. Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah oleh TNI Angkatan Laut dan atau bekerjasama dengan Pemerintah, Kementerian/LPNK dengan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai dan dana untuk kepentingan pertahanan keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bakti TNI AL. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan bantuan kemanusiaan untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan atau bekerjasama dengan Pemerintah, Kementerian/LPNK serta masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pembangunan wilayah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta kesejahteraan masyarakat.
- c. Pembinaan Komunikasi Sosial. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan komunikasi sosial TNI oleh TNI Angkatan Laut dan atau bekerjasama dengan Pemerintah, Kementerian/LPNK kepada komponen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan pikiran TNI/TNI Angkatan Laut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menyelami, menghubungi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat guna meningkatkan kesadaran bela negara, cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan.

Obyek penyelenggaraan Binpotmar adalah Potensi wilayah yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pertahanan meliputi aspek

geografi, demografi dan kondisi sosial yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) pilar Dawilhanla, meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM). Menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang dapat ditransformasikan menjadi kekuatan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung yang siap digunakan dalam pertahanan negara.
- b. Sumber Daya Alam (SDA). Mengelola sumber daya alam yang memiliki nilai strategis untuk menjadi cadangan material strategis dalam rangka mendukung logistik pertahanan.
- c. Sumber Daya Buatan (SDB). Menyiapkan sumber daya alam yang telah dikelola ditingkatkan daya gunanya agar memiliki nilai strategis untuk menjadi cadangan material strategis dalam rangka mendukung logistik pertahanan.
- d. Sarana Prasarana. Terwujudnya sarana prasarana sebagai hasil budidaya manusia yang disiapkan untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
- e. Nilai-Nilai. Melestarikan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik nilai-nilai yang bersifat universal, nilai-nilai yang sudah mendapatkan kesepakatan bangsa, nilai-nilai budaya bahari dan nilai-nilai khusus yang sudah melekat di lingkungan TNI untuk meningkatkan semangat juang segenap komponen bangsa dalam rangka pertahanan negara.
- f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Terbinanya teknologi nasional sesuai dengan perkembangannya yang dapat diterapkan baik dalam menunjang kemajuan industri nasional maupun dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan negara.
- g. Dana. Terkelolanya sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembiayaan program pertahanan negara agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

### 2.1.7 Ancaman Nonmiliter

Menurut Permenhan nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (PSPN), bahwa ancaman nonmiliter adalah usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter pada hakekatnya merupakan ancaman yang disebabkan oleh faktor nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam pertahanan negara. Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi. Jenis ancaman ini dapat berasal dari luar negeri dan dapat pula bersumber dari dalam negeri serta dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara. Namun demikian ancaman nonmiliter dapat dimungkinkan terjadi secara bersamaan dengan ancaman militer, sehingga memerlukan kecermatan baik dalam identifikasi maupun dalam penanganannya.

### 2.1.8 Imigran Gelap

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengertian Imigran dapat juga diklarifikasi istilah imigran gelap. Karena tidak semua pendatang tersebut datang dengan tujuan bermigrasi ke Indonesia. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih baik di negeri orang adalah dibedakan dengan mereka yang terusir atau terpaksa datang (*forced migration*) karena keamanannya terancam dan sulit bertahan tinggal di negara. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih baik adalah para imigran ataupun migran.

Imigran ada yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan ada pula yang tak terdaftar (*unregistered/ undocumented*). Mereka yang terdaftar bisa masuk ke suatu negeri secara resmi (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun kemudian tidak kunjung keluar (*overstay*). Jenis lainnya adalah yang masuk melalui pintu tidak resmi dan

bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen yang resmi. Yang terakhir ini pantas disebut sebagai imigran gelap.

Ada juga istilah pengungsi (*refugees*) dan pencari suaka (*asylum seekers*). Mereka adalah orang-orang yang bukan sengaja datang sebagai imigran dengan motif ekonomi. Dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, mereka terpaksa datang karena merasa terancam di negeri asalnya dan ingin mencari tempat yang lebih aman di negeri lain.

Menurut Konvensi Status Pengungsi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugee*) menyebutkan bahwa pengungsi adalah mereka yang mengungsi ke negeri lain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (*persecution*) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Pengungsi ada yang bertahan sementara di negeri lain untuk kemudian kembali ke negerinya.

Ada pula yang mengajukan suaka (*asylum*) ke negeri lain karena telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri asalnya. Merekalah yang kemudian disebut sebagai pencari suaka (*asylum seeker*). Mereka yang terpaksa hijrah dari daerah tempat tinggalnya entah karena konflik sosial maupun bencana alam namun tidak meninggalkan batas-batas negerinya tidaklah disebut sebagai pengungsi, melainkan *internally displaced persons*.

Menurut Subagyo, A dan Wirasuta D. S (2013; 157) bahwa Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan

imigrasi maupun tidak. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi.

Migrasi sendiri dalam pemetaan jenis-jenis perpindahan manusia masuk dalam kategori migrasi. Sedangkan proses migrasi sendiri sudah berlangsung sejak jaman dahulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia. Gerak perpindahan dari suku bangsa ke suku bangsa lainnya atau dari satu tempat ke tempat lainnya di muka bumi. Migrasi tentu juga akan menyebabkan terjadinya pertemuan antar manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan bertemunya unsur kebudayaan yang berbeda-beda maka akan terjadi proses akulturasi.

Beberapa faktor yang menyebabkan manusia /orang melakukan aktifitas migrasi :

- a. Alasan Politik/Politis, Kondisi perpolitikan suatu daerah yang panas atau bergejolak akan membuat penduduk menjadi tidak betah atau kerasan tinggal di wilayah tersebut.
- b. Alasan Sosial Kemasyarakatan, Adat-istiadat yang menjadi pedoman kebiasaan suatu daerah dapat menyebabkan seseorang harus bermigrasi ke tempat lain baik dengan paksaan maupun tidak. Seseorang yang dikucilkan dari suatu pemukiman akan dengan terpaksa melakukan kegiatan migrasi.
- c. Alasan Agama atau Kepercayaan, Adanya tekanan atau paksaan dari suatu ajaran agama untuk berpindah tempat dapat menyebabkan seseorang melakukan migrasi.
- d. Alasan Ekonomi, Biasanya orang miskin atau golongan bawah yang mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke kota. Atau bisa juga kebalikan di mana orang yang kaya pergi ke daerah untuk membangun atau berekspansi bisnis.

- e. Alasan lain, contohnya seperti alasan pendidikan, alasan tuntutan pekerjaan, alasan keluarga, alasan cinta, dan lain sebagainya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan, mengenai peran Pembinaan Potensi Maritim dan permasalahan imigran gelap di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Vera Puspita Ningsih, dari Universitas Indonesia Tahun 2007, Jakarta. Dalam jurnal yang berjudul upaya *international organization for migration* (IOM) dalam menangani masalah imigran gelap di Indonesia dengan metode penelitian kualitatif. Vera Puspita Ningsih menyimpulkan bahwa masih banyak kelemahan dalam penanganan imigran gelap, terutama kerjasama pemerintah Indonesia dan IOM kurang melibatkan masyarakat setempat.

Kelemahan dalam penelitian ini belum bisa membantu untuk memahami peran Lanal dalam melaksanakan Binpotmar secara umum dalam solusi mendukung sistem pertahanan semesta di wilayah, namun masih ada masalah yang belum dibahas secara mendalam, seperti membantu pengawasan terhadap imigran gelap disebabkan tidak adanya pemberian pelatihan secara permanen kepada masyarakat Indonesia dan masih mementingkan pembangunan sarana prasarana imigran gelap yang tertangkap. Walaupun penelitian Vera Puspita Ningsih, ini menarik dan membantu untuk memahami penanganan imigran gelap secara umum dalam solusi menanggulangi kasus-kasus imigran ilegal di Indonesia, namun masih ada masalah yang belum dibahas secara mendalam. Bagaimana peran masyarakat khususnya masyarakat pesisir sebagai strategi untuk mendukung pengawasan terhadap orang asing tidak teliti seperti dalam kesediaan masyarakat maritim/desa pesisir untuk ikut bergabung dalam berbagai kegiatan secara sukarela untuk membangun desa pesisir termasuk untuk melaporkan, mencegah dan mengawasi/mengevakuasi para imigran gelap sehingga belum mampu menjawab persoalan peran

pembinaan potensi maritim TNI AL terhadap masyarakat dalam menghadapi imigran gelap.

- b. Satria Gunawan, dari Universitas Jember Tahun 2009, Jakarta. Dalam jurnal yang berjudul upaya penanganan imigran ilegal di Indonesia, dengan metoda penelitian kualitatif. Satria Gunawan menyimpulkan bahwa masih banyak kelemahan peran pemerintah Indonesia dan organisasi internasional dalam menangani imigran ilegal di Indonesia, terutama kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan imigran ilegal.

Kelemahan tersebut, penelitian ini belum bisa membantu untuk memahami peran Lanal dalam Binpotmar secara umum dalam solusi mendukung sistem pertahanan semesta di wilayah, namun masih ada masalah yang belum dibahas secara mendalam, seperti membantu pengawasan terhadap imigran gelap karena disebabkan oleh faktor pengawasan orang asing ketika berada di Indonesia dan pengawasan orang asing setiap kegiatan yang dilakukan selama di Indonesia. Walaupun penelitian Satria Gunawan ini menarik dan membantu untuk memahami penanganan imigran gelap secara umum dalam solusi mendukung keamanan nasional, namun masih ada masalah yang belum dibahas secara mendalam. Bagaimana peran Binpotmar dalam masyarakat pesisir sebagai strategi untuk pengawasan imigran gelap tidak teliti sehingga belum mampu menjawab persoalan peran Binpotmar TNI AL terhadap masyarakat dalam menghadapi imigran gelap.

- c. Abu Ghifar, dari Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2014, Jakarta. Dalam jurnal yang berjudul penyelundupan imigran oleh warga negara Indonesia ditinjau dari Konvensi Palermo tahun 2000 dengan metoda penelitian Kualitatif. Abu Ghifar menyimpulkan bahwa masih banyak kelemahan Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan imigran ilegal oleh warga negaranya yakni patroli lintas laut belum optimal. Selain itu, kurang sosialisasi mengenai penanganan imigran ilegal di daerah pesisir pantai,

khususnya kepada para masyarakat nelayan. Kurangnya pengawasan dan penjagaan di wilayah pesisir/pantai.

Penelitian Abu Ghifar menarik dan membantu untuk memahami penyelundupan imigran oleh warga negara Indonesia, namun peran Binpotmar dalam konteks ini belum dibahas sehingga tidak bisa menggambarkan bagaimana peran Binpotmar TNI AL dalam menghadapi atau mengawasi imigran gelap.

Namun penelitian ini belum bisa membantu untuk memahami peran Lanal dalam Binpotmar secara umum dalam solusi mendukung sistem pertahanan semesta di wilayah, namun masih ada masalah yang belum dibahas secara mendalam, seperti membantu pengawasan terhadap imigran gelap.

Persoalan Peran Binpotmar TNI AL terhadap masyarakat dalam menghadapi imigran gelap, tidak terjawab.

- d. Janter Ilyas Manik, dari Universitas Pertahanan Tahun 2012, Jakarta. Dalam jurnal yang berjudul Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Melalui Pelaksanaan Bela Negara masyarakat pesisir (Studi di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang), dengan metoda penelitian Kualitatif. Janter Ilyas Manik menyimpulkan bahwa masih banyak kelemahan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla), terutama dalam kebijakan pimpinan TNI AL dalam melaksanakan Dawilhanla.

Kelemahan tersebut, disebabkan oleh faktor komunikasi belum dapat dilaksanakan oleh aktor-aktor pelaksana kebijakan (TNI AL) sehingga kebijakan ini tidak dapat memberikan stimulus terhadap pelaksana bela negara, begitupula sumber daya yang dapat dilihat dari sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dukungan anggaran. Hasilnya memperlihatkan sumber daya manusia TNI AL yang berada di wilayah Tanjung Pasir belum dapat memahami sebagai aktor pelaksana kebijakan. Pelaksanaan Binpotmar telah mampu mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu: terbentuknya Ruang Juang berupa seluruh wilayah kerja Lanal Bantendapat dipinjamkan dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok Lanal Banten yang dapat

memberikan dukungan untuk mengatasi ancaman termasuk penanganan imigran gelap; terciptanya Alat Juang yang cukup tangguh ditandai dengan kesediaan masyarakat maritim/desa pesisir untuk ikut bergabung dalam berbagai kegiatan secara sukarela untuk membangun desa pesisir termasuk untuk melaporkan, mencegah dan mengawasi/mengevakuasi para imigran gelap; terciptanya Kondisi Juang yang solid yaitu situasi wilayah pesisir yang kondusif didukung oleh kesiapan masyarakat desa pesisir untuk memberikan informasi mengenai perkembangan situasi perairan laut dan pesisir termasuk informasi keberadaan manusia perahu atau imigran gelap; serta terciptanya kemandirian TNI AL – Rakyat

Namun penelitian Janter Ilyas Manik ini menarik dan membantu untuk memahami implementasi Dawilhanla secara umum dalam solusi mendukung sistem pertahanan semesta di wilayah, namun masih ada masalah yang belum dibahas secara mendalam, seperti membantu pengawasan terhadap imigran gelap. Bagaimana implementasi Dawilhanla melalui Binpotmar dalam masyarakat pesisir atau nelayan sebagai strategi untuk membantu pengawasan terhadap imigran gelap dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta, tidak teliti sehingga belum mampu menjawab persoalan peran pembinaan potensi maritim TNI AL terhadap masyarakat pesisir atau nelayan dalam menghadapi imigran gelap.

- e. Beni Rudiawan, dari Universitas Pertahanan Tahun 2012, Jakarta. Dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Kemitraan Dispotmar Armatim dengan Dispotmar Lantamal V dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan di Surabaya dengan metoda penelitian Kualitatif. Beni Rudiawan menyimpulkan bahwa adanya disharmonis hubungan TNI AL dengan masyarakat nelayan oleh karena itu perlu kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga yang mempunyai kebijakan bela negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah tidak konsistennya pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dispotmar Armatim dengan Dispotmar Lantamal V Surabaya apabila dilihat dari ketidaktahuan

nelayan tentang lokasi-lokasi penangkapan ikan yang di ijin dan masih maraknya penggunaan alat tangkap yang sudah dilarang.

Penelitian Beni Rudiawan menarik dan membantu untuk memahami dan memetakan implementasi Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) dalam membina dan memberdayakan masyarakat nelayan di Surabaya, namun implementasi Dawilhanlame melalui Binpotmar TNI AL terhadap masyarakat nelayan dalam menghadapi imigran gelap dalam konteks ini belum dibahas sehingga tidak bisa menggambarkan bagaimana peran Binpotmar terhadap masyarakat pesisir atau nelayan dalam menghadapi imigran gelap. Lantamal V dalam Binpotmar telah berperan nyata bahkan melebihi dari kegiatan pengawasan dan evakuasi tetapi juga mempunyai peran seperti: pembinaan masyarakat desa pesisir dan pembinaan bela negara.

Persoalan Peran Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) TNI AL belum menggambarkan dalam perwujudan melalui kegiatan komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan Bhakti TNI AL yang terlaksana hanya pada penggunaan Binpotmar pada masa damai yang dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Ruang Juang yang tangguh berupa wilayah pertahanan aspek laut yang siap sebagai mandala perang atau mandala operasi dan mendukung bagi kepentingan operasi satuan sendiri dalam memenangkan pertempuran laut, Alat Juang yang tangguh berupa tersedianya komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah terorganisir secara nyata dengan segenap perangkatnya yang siap digunakan untuk kekuatan penganda TNI Angkatan Laut untuk memenangkan pertempuran laut, Kondisi Juang yang tangguh berupa kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, bertanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa untuk mendukung pertempuran laut, sehingga peran Pangkalan TNI AL atau Komando kewilayahan dalam pembinaan potensi maritim terhadap pembinaan masyarakat nelayan atau pesisir dalam menghadapi imigran gelap, tidak terjawab.

Tabel 2.1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul/ Metodologi	Teori	Hasil	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	VeraPuspita Ningsih (2007)	Upaya <i>international organization for migration</i> (IOM) dalam menangani masalah imigran gelap di Indonesia.  - (Metode Kualitatif)	- Kerjasama - Pengawasan - Kedaulatan Negara - Imigran gelap	Penanganan imigran gelap, terutama kerjasama melibatkan masyarakat setempat	- Meneliti kerjasama pemerintah dan IOM penanganan imigran gelap. - Meneliti kebijakan pengawasan terhadap imigran gelap.
2	Satria Gunawan(2009)	Upaya penanganan imigran ilegal di Indonesia.  -(Metode Kualitatif)	- Kerjasama - Pengawasan - Pembinaan - Imigran gelap	Kelemahan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani imigran ilegal di Indonesia,	- Meneliti kerjasama dan pengawasan penanganan imigran gelap. - Meneliti kebijakan pemerintah terhadap imigran gelap.
3	Abu Ghifar, (2014)	Penyelundupan imigran oleh warga negara Indonesia ditinjau dari Konvensi Palermo tahun 2000. -(Metode Kualitatif)	- Kerjasama - Pengawasan - Penyelundupan - Imigran gelap	Kelemahan aparat hukum dan masyarakat dalam penanganan imigran gelap belum optimal.	- Meneliti kerjasama aparat hukum dan stakeholder dalam pengawasan penanganan imigran gelap. - Meneliti kebijakan pemerintah terhadap imigran gelap.
4	JanterIlyas Manik (2012)	Implementasi Dawihanlame melalui Pelaksanaan Bela Negara masyarakat pesisir (studi di Desa Tanjung Pasir,Kabupaten Tangerang). -(Metode Kualitatif)	-Implementasi -Kebijakan -Sinergitas -Dawihanla -Binpotmar	Kelemahan terhadap aktor-aktor pelaksana kebijakan (TNI AL) dalam Binpotmar terhadap masyarakat pesisir di	-Meneliti implementasi kebijakan Dawihanla. -Meneliti ke-mampuan SDM dan sarana prasarana Posal Tg.

				desa Tanjung Pasir	Pasir
5	Beni Rudiawan (2012)	Implementasi Kemitraan Dispotmar Armatim dengan Dispotmar Lantamal V dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan di Surabaya (Metode Kualitatif)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Implementasi</li> <li>-Kebijakan</li> <li>-Kerjasama</li> <li>-Pemberda</li> <li>-Dawihanla</li> <li>-Binpotmar</li> </ul>	Disharmonis hubungan TNI AL dengan masyarakat nelayan di wilayah Surabaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Meneliti Binpotmar terhadap pembinaan nelayan di Surabaya,</li> <li>-Meneliti kebijakan Binpotmar terhadap masyarakat nelayan sebagai bela negara.</li> </ul>
6	Hari Mulyadi (2017)	Peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi Imigran Gelap (Metode Kualitatif)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Peran</li> <li>-Pengawasan</li> <li>-Pembinaan</li> <li>-Sinergitas</li> <li>-Pertahanan negara</li> <li>-Ancaman non militer</li> <li>-Dawihanla</li> <li>-Binpotmar</li> <li>-Keimigrasian</li> <li>-Imigrasi gelap</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Meneliti Binpotmar terhadap masyarakat pesisir di Lanal Cilacap.</li> <li>-Meneliti faktor-faktor pelaksanaan Binpotmar baik internal maupun eksternal.</li> <li>-Meneliti peran Lanal Cilacap dalam Binpotmarmembantu pengawasan imigran gelap.</li> </ul>

Sumber : Data diolah peneliti sendiri menggunakan Microsoft Word 2010.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu proses berpikir secara logis yang akan menguraikan masalah yang hendak diangkat dihadapkan pada berbagai hal diantara penyebab terjadinya permasalahan atau fenomena-fenomena untuk menemukan akar persoalan; faktor-faktor yang berpengaruh baik bersifat positif maupun negatif, teori-teori maupun konsep-konsep yang dapat digunakan sebagai basis analisis dihadapkan pada ketentuan yang harus dipatuhi untuk dapat menemukan sebuah kesimpulan dan akhirnya tercapai sasaran yang hendak dicapai

Dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah Peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi imigran gelap maka konsep berpikir yang dikemukakan diawali dengan menemukan penyebab terjadinya permasalahan atau fenomena-fenomena yang muncul dan bersifat penting. Langkah berikutnya adalah menguraikan Peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dalam Binpotmar yang diimplementasikan dalam bentuk pembinaan potensi maritim melalui manajemen pembinaan potensi maritim yaitu sistem perencanaan dan pengendalian Binpotmar (Sisrendal Binpotmar) berbagai aktifitasnya untuk menciptakan daya tangkal wilayah maritim khususnya di wilayah Cilacap. Untuk mendukung keilmiah tulisan dikemukakan teori-teori yang mendukung dalam mendukung penelitian ini dan konsep yang berhubungan dengan kegiatan Binpotmar digunakan untuk menganalisis hubungan dari berbagai elemen dalam persoalan tersebut. Selanjutnya analisis pelaksanaan pembinaan potensi maritim (Binpotmar), manajemen Binpotmar dan peran Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor atau hambatan internal maupun eksternal untuk di dayakan dan menciptakan daya tangkal yang dapat diwujudkan melalui pembinaan potensi maritim (Binpotmar) akan memberikan nilai manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat desa pesisir serta digunakan sebagai strategi dalam menangani terhadap imigran gelap. Selanjutnya keluarnya adalah terciptanya pertahanan dan keamanan di wilayah Cilacap. Ilustrasi gambar kerangka pemikiran:



Gambar2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah sendiri menggunakan MicrosoftWord 2010.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Moleong, L. J. (2011, 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Proses berfikirnya adalah secara induktif. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang tema dan data base penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh (Creswell, 2013). Merujuk pada penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menangkap berbagai fakta dan menganalisa suatu fenomena yang diteliti yaitu tentang Peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi imigran gelap. secara induktif untuk memperoleh data yang bersifat menyeluruh dan mendalam. Berpikir induktif merupakan proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual atau pengetahuan yang bersifat khusus menuju pada konklusi yang umum atau proses berfikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus (*particular*) yang terpikirkan sebagai kelas dari suatu fenomena menuju generalisasi-generalisasi (Soetrisno dan Hanafie, S.R, 2007).

Pemilihan metode ini juga diharapkan dapat memberikan uraian yang jelas, akurat, faktual sistemik dan valid tentang Peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi imigran gelap. Data dalam metode kualitatif dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi secara langsung dengan mengamati gejala/fenomena tentang focus penelitian, melalui wawancara dengan bertanya secara langsung kepada informan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dan informasi yang diperlukan dalam mendukung analisis penelitian.

Selain itu melalui studi pustaka untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dengan cara penelaahan dan membandingkan berbagai sumber kepustakaan yang terdiri dari: buku, jurnal, dokumen resmi, media dan elektronik untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

## **3.2 Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian**

### **3.2.1 Sumber Data**

Menurut *Lofland dan Lofland* sebagaimana dikutip dalam *Moleong*, (2012), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap sumber data atau informan yang dianggap memiliki kompetensi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, serta dokumen dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian berasal dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer atau utama diperoleh dari berbagai informan atau nara sumber pada institusi Dirjen Imigrasi Kemendagri HAM, Mabes TNI AL (Kasal, Aspotmar dan Kadispormar), Kadispotmar Armatim dan Lantamal V Surabaya, Lanal Cilacap, Bupati Cilacap, tokoh nelayan dan masyarakat desa pesisir/maritim. Selanjutnya pelaksanaan penelitian dan pencarian data melalui wawancara dilakukan kepada para pejabat kelima institusi tersebut. Disamping itu peneliti juga akan menggali dan mengumpulkan data-data berupa laporan dan dokumen–dokumen sebagai data sekunder, yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder berupa pendapat para nara sumber yang terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui peran Lanal Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi imigran gelap dan teknik pengawasan serta sinergi dengan Kementerian/Lembaga terhadap dalam penanganan imigran gelap yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah dan laporan penelitian.

Selain bersumber dari nara sumber, data sekunder juga diperoleh dari undang-undang, riset media, jurnal dan tulisan yang sesuai dengan penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan maupun informasi atau keterangan yang diberikan dan dikumpulkan secara utuh tanpa adanya suatu tanggapan atau persepsi dari penulis.

### **3.2.2 Subjek Penelitian**

Menurut Moleong (2012:5) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian dimaksud para informan berkompeten yang memberikan informasi terkait penelitian pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui Peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dalam Binpotmardengan kemungkinan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan masyarakat nelayan/pesisir Cilacap. Dasar argumentasi peneliti untuk menggunakan para informan tersebut adalah lebih kepada keterkaitan peminatan para informan pada bidangnya yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

### **3.2.3 Obyek Penelitian**

Menurut Moleong (2012:5) objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Obyek dari penelitian ini dimaksud Peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim (Binpotmar) guna menghadapi imigran gelap di wilayah Cilacap/Kabupaten Cilacap, dan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui Binpotmar TNI AL tersebut serta bagaimana peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi imigran gelap dan berbagai dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan fokus penelitian ini.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen yang diperoleh dari para informan serta berbagai sumber yang digunakan untuk memperkuat data dari penelitian ini.

Peneliti menggunakan terminologi informan dengan maksud bahwa informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan berbeda dengan responden, responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara tentang dirinya dengan hanya merespons pertanyaan-pertanyaan pewawancara dan bukan untuk memberikan informasi atau keterangan. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka disebut informan dan bukan responden.

Adapun cara untuk mendapatkan informan, agar mendapatkan data yang lebih detail dan valid maka peneliti membagi informan menjadi dua yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Atau dengan kata lain informan seperti ini dapat dikatakan sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat langsung kejadian dari berbagai literature mereka disebut informan kunci. Sedangkan informan kedua yaitu informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang tindakannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subyek penelitian ini sendiri, dalam hal ini adalah Mabes TNI AL (Kasal, Aspotmar dan Kadispotmar), Kadispotmar Armatim dan Lantamal V, Danlanal Cilacap, Bupati Cilacap dan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM melalui kantor imigrasi Cilacap, masyarakat nelayan dan maritim dan pada penelitian ini dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, peneliti hanya menggunakan informan pelaku sebagai subyek penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan cara perolehan informan pertama, dengan cara *purposive* atau disengaja sebelum melakukan penelitian peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi, dan dengan cara *snowballing*. Peneliti telah mengetahui identitas informan dalam hal ini adalah para pembuat kebijakan Kasal, Aspotmar, Kadispotmar,

Kadispotmar Lantamal V, Danlanal Cilacap, Bupati Cilacap, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, masyarakat nelayan dan maritim serta kepala Imigrasi Cilacap. Para informan tersebut, menurut peneliti telah memenuhi kriteria tersebut. Penggunaan teknik *snowballing*, dimana informan – informan peneliti peroleh langsung dilapangan tanpa adanya kriteria tertentu. Tehnik ini memungkinkan peneliti dapat melakukan dalam waktu yang lama dan semakin lama peneliti melakukan penelitian maka akan semakin banyak mendapatkan informan dengan berbagai pemaknaan yang sangat bervariasi. Tehnik ini peneliti lakukan untuk mengantisipasi seandainya tehnik pertama tidak dapat peneliti laksanakan akibat keterbatasan waktu penelitian, kesibukan informan pelaku, atau kendala tehnik administratif yang terkait dengan protokoler informan mengingat mereka adalah para pejabat negara sesuai bidangnya masing – masing. Penjelasan tentang teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

### **3.3.1 Wawancara**

Menurut Sugiyono (2012), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Atau dengan kata lain, wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.

Menurut Moleong, wawancara merupakan kegiatan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, antara dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Secara terinci Moleong mendeskripsikan pembahasan tentang wawancara ini, mulai dari pengertian dan macam atau jenis wawancara, bentuk-bentuk pertanyaan, menataurutan pertanyaan, perencanaan wawancara, pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara dilakukan, dan strategi serta taktik berwawancara.

Penggunaan metode wawancara ini diharapkan akan dapat memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya tentang peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar di wilayah Cilacap yang sudah dilakukan selama ini. Dengan menggunakan wawancara, diharapkan peneliti akan

cepat mendapat informasi dan data yang diinginkan. Dengan kata lain, metode wawancara akan membantu peneliti memperoleh bahan-bahan dan gambaran yang lebih objektif tentang masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu para pelaku yang terlibat langsung dengan kegiatan pembinaan potensi maritim terhadap masyarakat pesisir Cilacap dan pengawasan imigran gelap baik yang berada di pemerintah daerah Cilacap, aparat Imigrasi Kabupaten Cilacap, aparat kemaritiman dari TNI AL, beberapa tokoh masyarakat desa pesisir di Cilacap, dan beberapa orang dari masyarakat pesisir yang berada dalam desa Klaces, Kabupaten Cilacap.

### **3.3.2 Studi Pustaka**

Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dengan cara penelaahan dan membandingkan berbagai sumber kepustakaan yang terdiri dari : buku, jurnal, dokumen resmi, media cetak dan elektronik untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Studi pustaka ini merupakan pelengkap dari tehnik wawancara.

Untuk Studi Lapangan, lokasi penelitian dilakukan yang ada di sepanjang pesisir Cilacap yaitu Desa Klaces, Kecamatan Kampong Laut. Pembatasan ini dilakukan mengingat garis pantai Cilacap yang cukup panjang, dan adanya populasi penduduk yang cukup padat. Alasan lainnya karena desa-desa pesisir ini lokasinya tidak terlalu jauh dari Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Pada penelitian ini analisis data menggunakan tehnik, sebagai berikut:

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Afrizal (2014), analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data mereka artikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah

dikumpulkan. Hal yang sangat penting dari tehnik Miles dan Huberman ini adalah analisis data dalam penelitian kualitatif bukan kegiatan pengkuantifikasian. Adapun susunan kegiatan dalam tehnik analisis data dapat dijabarkan sebagai berikut :

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

- a. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
- b. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Analisis data kualitatif menurut Spradley, J.P. (2007) dalam penelitian kualitatif adalah pengujian sistematis terhadap data. Yang dimaksud dengan pengujian sistematis terhadap data adalah, menentukan bagian-bagian dari data yang telah dikumpulkan dan menemukan hubungan di antara bagian-bagian data tersebut dengan keseluruhan data. Kemudian dilakukan kategorisasi informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian mencari hubungan antara kategori – kategori yang telah disusun.

Secara garis besar maka penelitian ini menggunakan gabungan tehnik dari Miles dan Huberman serta untuk menentukan hubungan antara data hasil wawancara dan studi pustaka, maka peneliti menggunakan tehnik Spradley.

### 3.5 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan pengumpulan data kualitatif seperti yang peneliti rujuk dari gabungan antara Moleong (2002) dan Creswell (2016), sebagai berikut:

Tabel 3.1 Teknik Wawancara dan Dokumentasi

No	Wawancara	Dokumentasi
1	Melaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, sambil mencatat hal – hal penting.	Mendokumentasi buku harian selama penelitian.
2	Melaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, sambil merekam dengan audiotape.	Mendokumentasi buku harian selama penelitian
3	Melaksanakan wawancara semi terstruktur sambil merekamnya dengan audiotape	Menganalisis dokumen publik (seperti memo resmi, catatan-catatan resmi, atau arsip-arsip lainnya ).
4	Melaksanakan jenis wawancara yang berbeda misalnya dengan menggunakan email, skype dan wawancara telepon.	Menganalisis autobiografi
5		Meminta foto partisipan merekam suara mereka dengan videotape.

Sumber : Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya,Bandung.

Adapun langkah-langkah yang penulis rencanakan untuk menemukan sumber data dan untuk melaksanakan disain penelitian diatas, maka langkah-langkah dan uraiannya dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

#### 3.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Peralatan yang digunakan untuk membantu

mengumpulkan data diantaranya adalah alat perekam, kamera foto, kamera video, dan handphone. Dalam penelitian kualitatif alat atau instrument utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengarkan, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini peneliti yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambilnya langsung dari sumber informan atau partisipan. Pada kegiatan wawancara peneliti akan menyusun daftar pertanyaan deskriptif dan pertanyaan struktural. Menurut Spradley dalam Creswell (2016), pertanyaan deskriptif biasanya dimulai dengan kata tanya apa, siapa, kapan dan bagaimana sedangkan pertanyaan struktural biasanya dimulai dengan kata tanya mengapa atau apa sebabnya.

### **3.5.2 Data Primer**

Data pada dasarnya merupakan informasi yang dicari untuk memecahkan suatu masalah. Data primer menurut Djamal (2015), adalah data yang dapat memberikan data langsung tanpa melalui perantara. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari pengamatan langsung atau tidak terhadap informan, seperti melalui media massa baik elektronik maupun cetak.

Dari uraian diatas maka data primer dari penelitian ini peneliti dapatkan dari informan langsung, dan dari pengamatan langsung kegiatan informan di lapangan baik melalui wawancara, dan catatan langsung dari pengamatan peneliti tentang kegiatan informan sehari-hari.

### **3.5.3 Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk memperoleh data sekunder ini dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip dari sejumlah literatur seperti buku, jurnal, koran, internet, dokumen berupa peraturan perundang-undangan serta karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang berkaitan Binpotmar dan imigran gelap serta

bagaimana kebijakan Binpotmar TNI AL terhadap pembinaan masyarakat peisisir/nelayan guna menghadapi Imigran gelapserta buku-buku atau literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **3.5.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data**

Pengujian keabsahan data menurut Moleong (2004) didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Disamping itu penelitian kualitatif menurut Muhadjir (1998) mengejar kebenaran lewat ditemukannya sumber kepercayaan sehingga hal yang hakiki, dan esensial dapat ditemukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi berupa cek, recek dan cross cek terhadap data yang diperoleh triangulasi. Menurut Sugiyono (2009) adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga diartikan Meleong (2004) sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Patton dalam Moleong (2004) menyatakan bahwa teknik triangulasi juga dibedakan menjadi:

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif,
- b. Triangulasi dengan metode memiliki dua strategi, yaitu:
  - 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data,
  - 2) Pengecekan derajatkepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama,
- c. Triangulasi dengan penyidik yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data,
- d. Triangulasi dengan teori, mendasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.

Peneliti tidak menggunakan semua jenis teknik triangulasi, karena akan sangat sulit untuk dapat melaksanakan semua teknik tersebut.

Selain itu peneliti mendasarkan pemahaman berdasarkan pendapat Meleong (2004) yang menyatakan bahwa triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber. Cara yang diambil menurut Patton dalam Meleong (2004) adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang yang memiliki latar belakang berlainan,
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berlainan.

### 3.6 Jadwal Penelitian

Pada penelitian ini tahapan yang dilaksanakan oleh peneliti mengacu pada tahapan yang telah digariskan oleh Universitas Pertahanan Indonesia Program Studi Strategi Perang Semesta tahun 2016/2017 mulai dari studi pendahuluan, identifikasi, pengumpulan data, penyusunan proposal sampai dengan ujian proposal dan revisi proposal. Penelitian dilaksanakan di wilayah Jakarta, Surabaya dan Cilacap. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jadwal penelitian sebagai pedoman sehingga ketepatan waktu dapat tercapai seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.3Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP
1	Studi Pendahuluan									

2	Identifikasi dan Pul Data									
3	Pengajuan Proposal Lit									
4	Uji Proposal									
5	Lit & Bil Data									
6	Olah & Analisa Data									
7	Sun Laporan									
8	Konsul dan Bimbingan									
9	Penyempurnaan Laporan									
10	Seminar/ Ujian Tesis									
11	Perbaiki Tesis									

Sumber : Data diolah sendiri menggunakan MicrosoftWord 2013

## **BAB 4**

### **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tiga bahasan yaitu gambaran obyek penelitian, analisis data dan Interpretasi hasil, serta pembahasan. Objek penelitian yang dideskripsikan adalah Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap, deskripsi Responden dan deskripsi Binpotmar beserta interpretasinya. Pada sub-bab pembahasan dituliskan bahasan atas hasil uji peran Lanal Cilacap dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim (Binpotmar).

#### **4.1 Gambaran Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dideskripsikan adalah Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dan gambaran umum pembinaan potensi maritim (Binpotmar). Berkaitan dengan sumbernya, kedua obyek penelitian termasuk ke dalam objek primer melalui pengamatan langsung dengan wawancara sedangkan sekunder diperoleh dari sumber sekunder dokumen yang memiliki relevansi dengan Binpotmar. Sumber utama Binpotmar yang diacu adalah buku induk pemberdayaan wilayah pertahanan di laut tahun 2016, buku petunjuk pembinaan potensi maritim tahun 2015.

##### **4.1.1 Deskripsi Lanal Cilacap**

Pangkalan TNI AL Cilacap atau Lanal Cilacap merupakan salah satu pangkalan yang berada dibawah komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) yang berkedudukan di Cilacap. Pangkalan Angkatan Laut ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1946 oleh laskar-laskar pejuang dengan terbentuknya TKR (Tentara Keamanan Rakyat Laut) dipimpin oleh Kolonel Laut Kajat Asmadi untuk menghadapi Belanda yang akan melaksanakan operasi amfibi di pantai selatan Cilacap (Teluk Penyu) dan merebut pelabuhan Cilacap. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut (Men/Pangal) No. 3501.7 tanggal 15 September 1962 disebutkan bahwa Pangkalan Angkatan Laut Cilacap dibawah Komando Armada (Koarma).

Dengan menunjuk Letkol Laut Abdul Fatah selaku Komandan Pangkalan Angkatan Laut Cilacap yang meliputi wilayah Yogyakarta, Purworejo, Kebumen dan Cilacap. Namun dalam perkembangan organisasi Pangkalan TNI AL mengalami perubahan (pemekaran), dengan dibentuk organisasi baru Pangkalan baru yaitu: Pangkalan TNI AL (Lanal) Yogyakarta. Dengan demikian wilayah Yogyakarta sudah tidak masuk dalam wilayah kerja Lanal Cilacap. Menurut struktur organisasi Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap membawahi Pos Pengamat TNI AL (Posal).

Menurut surat keputusan Danlantamal V nomor: Kep/44/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Organisasi Prosedur (Orgapros) Lanal Cilacap menjelaskan bahwa Posal adalah tempat pengawasan, pengamatan dan penginderaan dini semua kegiatan dan kejadian di laut dan sekitarnya serta untuk mengumpulkan data maritime di sekitarnya. Posal mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan laut terhadap suatu kejadian dan kegiatan perairan tertentu dalam rangka pengumpulan data intelijen maritim, agar setiap kejadian dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerawanan pertahanan dan keamanan negara di bidang maritim/wilayah laut dan pantai dapat diketahui/dilaporkan secara dini.

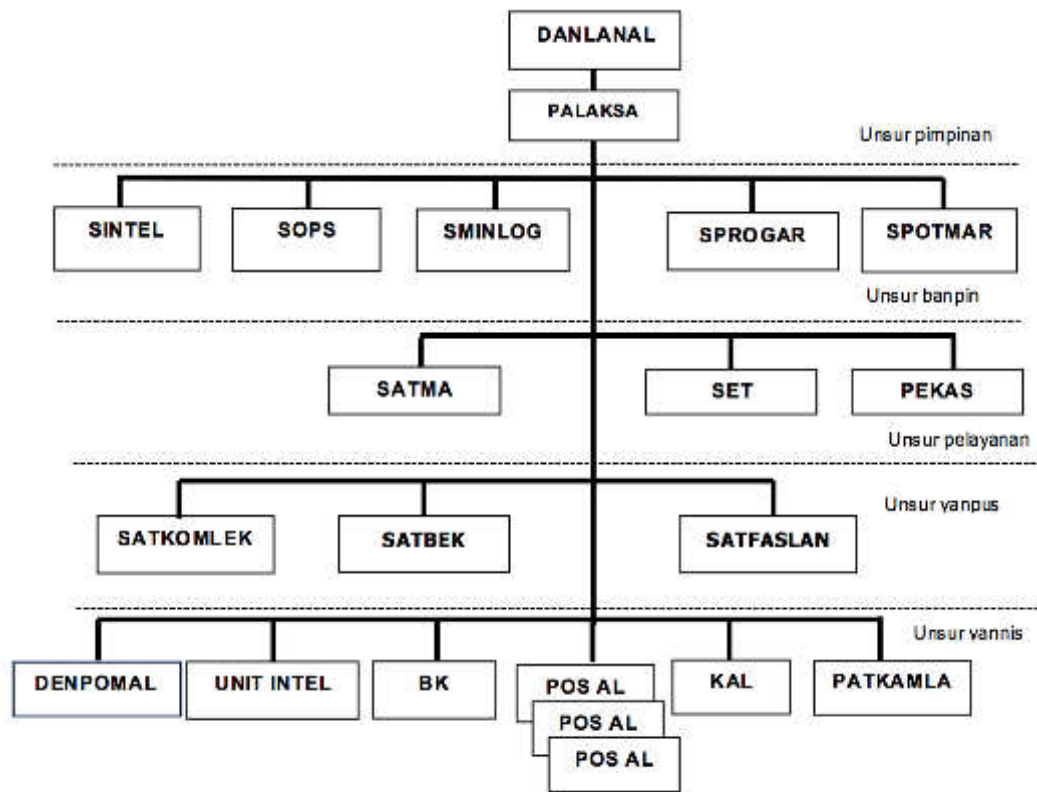
Fungsi Posal, ada dua, yaitu sebagai fungsi asasi dan fungsi tambahan.

Sebagai fungsi asasi melaksanakan penginderaan dini bagi satuan /unsur patroli dan mengumpulkan data intelijen maritim.

Sebagai fungsi tambahan, melaksanakan mendukung operasi kemandirian laut, Memberikan bantuan pengamanan daerah, Melaksanakan pembinaan masyarakat maritim dan potensi maritim, Melaksanakan bantuan SAR (*Search and Rescue*).

Menurut struktur organisasi Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap membawahi tiga Pos Pengamat TNI AL (Posal), sebagai berikut:

- a. Posal Klaces di wilayah Nusakambangan, Kab. Cilacap.
- b. Posal Lohgending di wilayah Kecamatan Lohgending Kab. Kebumen.
- c. Posal Purworejo di wilayah Kab. Purworejo.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lanal Cilacap  
(Sumber:Lanal Cilacap, 2016)

#### 4.1.2 Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini adalah para pejabat dan masyarakat nelayan (pesisir) sebanyak 7 orang dengan profesi meliputi TNI AL, Aparatur Sipil Negara (ASN), Wiraswasta, dan pengurus kelompok nelayan serta masyarakat maritim. Sebaran data menurut pekerjaan, pendidikan, dan wilayah kerja dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 Deskripsi informan

Deskripsi Informan	Frekuensi	Pendidikan	Wilayah
TNI AL	2	Sarjana/Akademi	Cilacap
Bupati Cilacap	1	Akademi	Cilacap
Kepala Desa Klalces	1	SMA	Klaces
Swasta/BUMN	1	Sarjana/Akademi	Cilacap
POK Nelayan	1	SMP	Klaces

Masyarakat Maritim	1	SMA	Cilacap
Jumlah	7		

Sumber : diolah peneliti

Dari tabel 4.1 di atas, menggambarkan sebaran dari informan menurut pekerjaan, terlihat pekerjaan TNI AL yang terbanyak yaitu 2 orang (Danlanal Cilacap dan Perwira Staf Potensi maritim), kedua yaitu ASN yaitu Bupati Cilacap, ketiga yaitu: Kepala Desa Klaces, keempat Swasta/BUMN yaitu: R.U PT. Pertamina Cilacap, kelima yaitu: kelompok nelayan (pesisir) dan terakhir adalah masyarakat maritim Cilacap.

#### 4.1.3 Deskripsi Pembinaan Potensi Maritim

Pembinaan Potensi Maritim di Indonesia membutuhkan pendekatan yang spesifik yaitu melalui pendekatan 'geostrategi', agar diperoleh:

- a. Pembinaan wilayah yang dapat menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan keberlanjutan pembangunan nasional.
- b. Peningkatan kesejahteraan dan keamanan bangsa,
- c. Pembinaan potensi maritim yang menitikberatkan pada penyusunan potensi pertahanan negara di laut. (Aspotmar Kasal, 2016).

Pembinaan Potensi Maritim bagi TNI AL adalah penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah pertahanan laut dengan segenap aspeknya menjadi kekuatan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan Pertahanan Negara di laut. (Bujuk induk Dawinhanla, 2011)

Namun demikian Binpotmar dalam implementasinya dilapangan tidaklah mudah, faktor eksternal berupa kompleksitasnya permasalahan yang terjadi dalam wilayah pembinaan Komando Kewilayahan cukup mempengaruhi pelaksanaan tugas Binpotmar. Demikian juga dengan permasalahan personel di internal satuan potensi maritim. Sinyalemen tentang lemahnya aparat potmar di Lanal sampai dengan tingkat Posal serta berbagai keluhan tentang rendahnya SDM aparat potmar sebagai pembina potensi maritim begitu mengemuka. Bahkan banyak yang

mempertanyakan bahwa Lanal dan Posal sebagai garda terdepan pelaksana fungsi pembinaan potensi maritim masih belum optimal dalam hal komunikasi sosial. Diharapkan dengan pendekatan Binpotmar yang berhasil dan proporsional dapat mengatasi kendala yang terjadi di masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara di setiap lapisan masyarakat, (Aster Panglima TNI, 2016).

Menurut Kadispotmar Mabesal pemberdayaan aparat potensi maritim harus dilakukan secara terus menerus dalam mendukung tugas pokok TNI AL, dengan kondisi yang telah berubah bukan berarti masalah pemberdayaan aparat potensi maritim luput dari perhatian kita bersama, justru pada saat kondisi sekarang di saat kemajuan berpikir dan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi dituntut kreativitas dan inovasi kita dalam melakukan pemberdayaan aparat potensi maritim dengan saling berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal, TNI AL tidak boleh tinggal diam dengan perkembangan kondisi, tapi justru berperan aktif dalam membangun suasana kondusif di tengah masyarakat desa pesisir/nelayan.

Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap sebagai salah satu Komando Kewilyahan yang berkedudukan di Cilacap juga melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim yang dilaksanakan secara rutin dari tahun ke tahun yang tergambar dengan sangat jelas dari berbagai kegiatan Binpotmar dalam berbagai wujud implementasinya. Dari kegiatan dalam program maupun non program tersebut diperoleh gambaran bahwa kegiatan Binpotmar tersebut terbagi menjadi dua bagian besar yaitu menyangkut pembinaan Lanal terhadap Binpotmar itu sendiri (pengelolaan) dan Lanal dalam penggunaan Binpotmar di aplikasikan khususnya penggunaan Binpotmar pada masa damai.

Bagian pembinaan potensi maritim ada empat kegiatan pokok yaitu:

- a. Kegiatan terkait dengan pengembangan organisasi, tugas dan tanggung jawab.
- b. Pembinaan kegiatan pembinaan potensi maritim Lanal Cilacap, meliputi kegiatan pembinaan terhadap komunikasi sosial, pembinaan terhadap Bhakti TNI AL, dan pembinaan terhadap ketahanan wilayah.

- c. Pembinaan kemampuan Binter matra laut yang meliputi pembinaan sikap teritorial, pembinaan lima kemampuan Teritorial, sistem perencanaan, pengendalian pembinaan potensi maritim; dan ketatalaksanaan pembinaan potensi maritim.
- d. Pembinaan kerjasama antar instansi terkait. (Bujuklak Binpotmar, 2015)

Sedangkan bagian penggunaan Binpotmar diwujudkan melalui kegiatan komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan Bhakti TNI AL yang terlaksana hanya pada penggunaan Binpotmar pada masa damai yang dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Ruang Juang yang tangguh berupa wilayah pertahanan aspek laut yang siap sebagai mandala perang atau mandala operasi dan mendukung bagi kepentingan operasi satuan sendiri dalam memenangkan pertempuran laut, Alat Juang yang tangguh berupa tersedianya komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah terorganisir secara nyata dengan segenap perangkatnya yang siap digunakan untuk kekuatan penganda TNI Angkatan Laut untuk memenangkan pertempuran laut, Kondisi Juang yang tangguh berupa kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, bertanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa untuk mendukung pertempuran laut, Kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh berupa ikatan yang kokoh dan kuat serta bersatu padunya TNI-Rakyat, baik secara fisik maupun non fisik. (Bujuklak Binpotmar, 2015)

Pelaksanaan pembinaan potensi maritim dikemas dalam kegiatan manajemen Binpotmar agar kegiatan dapat berjalan dengan arah yang baik dan berkesinambungan. Manajemen Binpotmar yang diselenggarakan dalam bentuk sistem perencanaan pengendalian dengan tujuan diperoleh suatu pola pikir yang konsepsional dalam merencanakan program Binpotmar secara terpadu dan digunakan sebagai acuan yang dapat disarankan kepada Pemerintah Daerah setempat dalam rangka terwujudnya sinergitas.

Kegiatan sistem perencanaan dan pengendalian (Sisrendal) pembinaan potensi maritim diawali dengan membuat produk petunjuk potensi maritim (Jukpotmar) yang memuat data-data tentang potensi maritim seperti sumber daya maritim, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana maritim secara rinci dan lengkap yang merupakan inventaris wilayah maritim untuk dikembangkan menjadi kekuatan pertahanan dilaut.

Produk kedua dalam Sisrendal pembinaan potensi maritim adalah analisa potensi maritim (Anpotmar) merupakan analisa terhadap potensi wilayah yang dicatat dengan mendetail dalam jukpotmar yang dapat ditingkatkan menjadi kemampuan wilayah maritim serta untuk kepentingan pertahanan Negara di laut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam Anpotmar adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Laut, rencana pembangunan maritim, kondisi sosial, tingkat kepekaan aparatur dan pimpinan masyarakat pesisir serta pendayagunaan kemampuan swadaya masyarakat pesisir.

Produk ketiga adalah Analisa Potensi Pertahanan di Laut yang merupakan kegiatan penganalisaan terhadap kemungkinan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan wilayah menjadi kekuatan kewilayahan bagi kepentingan pertahanan di laut termasuk didalamnya untuk kepentingan keamanan di laut.

Produk keempat adalah rencana pembinaan potensi maritim yang merupakan rumusan pokok-pokok pembinaan potensi maritim yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu kedepan. Selain kegiatan Binpotmar tersebut diatas, Lanal Cilacap juga melakukan pembinaan lima kemampuan teritorial yang merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh aparat potensi maritim terdiri dari:

- a. Temu cepat dan lapor cepat, kegiatan atau tindakan untuk memperoleh keterangan secara cepat (deteksi dini) dan melaporkan dengan cepat untuk ditindak lanjuti dalam bentuk cegah dini.
- b. Kemampuan manajemen potensi maritim, kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasir, mengendalikan serta mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan proses Sisrendal Binpotmar.

- c. Kemampuan penguasaan wilayah, kegiatan dan tindakan untuk mengenal secara mendalam ciri-ciri potensi geografi maritim, demografi dan kondisi sosial serta sarana dan prasarana di wilayah.
- d. Kemampuan ketahanan wilayah, kegiatan untuk menciptakan sikap mental dan motivasi juang masyarakat pesisir untuk menumbuhkan ketahanan pada rakyat dalam rangka mempertahankan wilayahnya.
- e. Kemampuan komunikasi sosial, tindakan yang dilakukan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah serta komponen bangsa lainnya di wilayah guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan.

## **4.2 Analisa Data dan Interpretasi Hasil**

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di wilayah kerja Pangkalan TNI AL Cilacap atau Lanal Cilacap di tiga Pos Pengamat TNI AL (Posal) Klaces, Lohgending dan Purworejo kegiatan Binpotmar secara keseluruhan dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

### **4.2.1 Hasil Pelaksanaan Lanal Cilacap dalam Binpotmar**

- a. Pelaksanaan Kegiatan Sistem Perencanaan Pengendalian Binpotmar.  
Kadispotmar Mabesal dan Danlanal Cilacap dalam penjelasannya mengatakan dalam manajemen Binpotmar, dibuat untuk merencanakan kegiatan Binpotmar secara teratur, terkoordinasi dan terpadu agar rencana kegiatan Binpotmar dengan program kegiatan TNI AL dan di ajukan ke Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan negara di laut dalam rangka rangka keamanan nasional.  
Produk Sisrendal Binpotmar dibuat setiap tahun karena berkaitan dengan kondisi selaras wilayah perairan maupun masyarakat desa pesisir dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai bersifat umum. Kegiatan Sisrendal Binpotmar yang merupakan siklus dalam perencanaan Binpotmar yang dilaksanakan oleh Lanal Cilacap, berupa:

### 1) Pembuatan Petunjuk Potensi Maritim

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa petunjuk Potensi Maritim yang memuat data-data tentang potensi maritim seperti: pendataan, penataan, pengelolaan (SDA/SDB, Sarana Prasarana), penyiapan logistik wilayah dan analisa daerah operasi secara rinci dan lengkap merupakan inventaris potensi maritim untuk kemudian dikembangkan menjadi kekuatan potensi maritim. Pada bagian inventarisasi potensi geografi maritim dicatat secara menyeluruh dan mendetail mengenai keadaan pesisir pantai di wilayah kerja Lanal Cilacap yang menyangkut kedalaman laut, garis pantai, klasifikasi pantai, arus pasang surut, gelombang, dermaga, industri jasa maritim, kapal-kapal motor (pemerintah/ swasta) atau kapal nelayan, bouy (tanda-tanda navigasi), keadaan iklim dan cuaca yang berlaku di wilayah tersebut. Inventarisasi keadaan geografi maritim ini dimaksudkan agar setiap personel aparat potensi maritim menguasai dan mengenal secara pasti kondisi kondisi dan keadaan wilayah binaan desa pesisirnya. Tujuannya adalah agar aparat personel potmar dapat mewaspadaikan wilayah desa pesisir yang rawan dan berpotensi menjadi ancaman baik yang disebabkan oleh alam maupun yang dikuasai oleh kelompok anti pemerintah.

Inventarisasi demografi dilakukan dengan mencatat secara mendetail mengenai penduduk dalam wilayah binaan desa pesisir Lanal Cilacap yang meliputi: jumlah nakhoda kapal, masyarakat yang berprofesi nelayan, tingkat pendidikan secara perorangan, tokoh masyarakat pesisir. Dengan mengetahui secara baik dan pasti mengenai komposisi, potensi maritim dan kekurangan masyarakat desa pesisir dalam wilayah binaannya maka Lanal dapat memetakan dengan pasti wilayah dengan masyarakat yang memiliki potensi yang baik serta wilayah dengan masyarakat yang memiliki kerawanan yang dapat mengancam stabilitas keamanan di daerah.

Inventarisasi kondisi sosial meliputi pendataan dibidang ideologi yang menyangkut agama yang ada, data golongan ekstrem dan data eks PKI; pendataan dibidang politik yang menyangkut

kesadaran masyarakat desa pesisir terhadap politik; pendataan di bidang ekonomi menyangkut potensi perikanan, budidaya mangrove, nelayan dan tambak dan kondisi ekonomi masyarakat desa pesisir pada setiap daerah; pendataan dibidang sosial budaya menyangkut tingkat pendidikan nelayan atau masyarakat pesisir termasuk pada kegiatan olah raga perairan; Melalui pendataan kondisi sosial tersebut Lanal dapat membuat peta kerawanan wilayah akibat rendahnya pendidikan dan sebaran tingkat kesehatan untuk selanjutnya perlu diwaspadai dan direncanakan pembinaannya; pendataan dibidang pertahanan terkait instansi militer, kepolisian dan jumlah masyarakat desa pesisir yang terlatih.

## 2) Analisa Potensi Maritim

Data-data yang telah dicatat secara mendetail mengenai kondisi geografi, demografidan kondisi sosial dalam petunjuk potensi maritim tersebut kemudian di ekstrak untuk mendapatkan potensi-potensi dari masing bidang tersebut untuk di telaah dan dianalisis secara mendalam terkait dengan potensi-potensi mana saja yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pesisir maupun untuk membantu meningkatkan keamanan laut. Tahap selanjutnya setelah mengetahui potensi-potensi tersebut disusun rencana kegiatan Binpotmar untuk membina potensi tersebut menjadi kekuatan kewilayahan.

## 3) Analisa Potensi Pertahanan di Laut

Dengan melihat kemampuan maritim pada analisa potensi maritim, selanjutnya melalui analisa potensi pertahanan di laut dipilah untuk diberdayakan untuk kepentingan pertahanan meliputi aspek geografi, demografi dan kondisi sosial yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) pilar Dawilhanla, meliputi: Menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang siap digunakan dalam pertahanan negara, sumber daya alam dan buatan yang memiliki nilai strategis untuk menjadi cadangan material strategis dalam rangka mendukung logistik pertahanan, sarana prasarana sebagai hasil budidaya manusia yang disiapkan untuk kepentingan pertahanan negara, Melestarikan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik

nilai-nilai yang bersifat universal, nilai-nilai yang sudah mendapatkan kesepakatan bangsa, nilai-nilai budaya bahari dan nilai-nilai khusus yang sudah melekat di lingkungan TNI untuk meningkatkan semangat juang segenap komponen bangsa dalam rangka pertahanan negara, dan teknologi nasional sesuai dengan perkembangannya yang dapat diterapkan baik dalam menunjang kemajuan industri nasional maupun dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan negara serta sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembiayaan program pertahanan negara agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

4) Rencana Pembinaan Potensi Maritim.

Hasil yang sudah final diperoleh melalui kegiatan pembuatan petunjuk potensi maritim berupa pendataan, penataan, pengelolaan (SDA/SDB, Sarana Prasarana), penyiapan logistik wilayah dan analisa daerah operasi, demografi, kondisi sosial secara rinci dan lengkap selanjutnya di saring menjadi potensi-potensi maritim untuk kemudian ditingkatkan menjadi kekuatan maritim melalui kegiatan analisa potensi maritim, dari kekuatan dalam berbagai bidang yang dihasilkan melalui analisa potensi maritim selanjutnya kekuatan maritim di telaah secara khusus untuk mendapatkan potensi pertahanan di laut.

Hasil yang diperoleh dalam tiga kegiatan tersebut di atas kemudian dibuatkan rencana pembinaannya sebagai sebuah program untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan kekuatan-kekuatan potensi maritim melalui rencana kegiatan pembinaan potensi maritim. Renbinpotmar inilah yang kemudian dijabarkan menjadi pedoman dalam pembinaan potensi maritim secara rutin.

b. Pelaksanaan Bhakti TNI AL

Pelaksanaan Bhakti TNI AL di Lanal Cilacap dilaksanakan, antara lain:

1) Kegiatan Operasi Bhakti TNI AL

Merupakan partisipasi TNI sebagai alat pertahanan Negara dalam rangka pembinaan wilayah di bidang fisik materiil dan mental

spiritual, dilakukan atas perintah Panglima TNI dengan memanfaatkan tenaga, daya dan sarana dalam rangka Bhakti TNI AL.

Berdasarkan buku laporan pelaksanaan kegiatan Lanal Cilacap sasaran fisik yang ingin dicapai adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat pesisir; membantu pemerintah dalam meningkatkan perikanan laut; membantu pemerintah dalam mengatasi bencana alam dan banjir; serta kegiatan antisipasinya; membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan; membantu program pemerintah dalam buta aksara; dan membantu program pemerintah dalam kesehatan; program membantu program pemerintah dalam program keluarga berencana untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sedangkan non fisiknya berupa: meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara; meningkatnya kesadaran bela Negara dan cinta tanah air; mantapnya wawaan kebangsaan; meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan; meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila.

Mengacu pada sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Lanal Cilacap ada tiga, yaitu:

a) Surya Bhaskara Jaya Mini (SBJ) Mini

Danlanal Cilacap menjelaskan bahwa SBJ Mini adalah program dari Mabesal. Dana dari kegiatan ini bersumber dari Mabesal. Kegiatan dan keberadaan SBJ Mini ini dirasa sangat membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan di wilayah. Sasaran kegiatan baik fisik maupun non fisik di daerah pesisir Kabupaten Cilacap.

b) Bedah Desa Pesisir (Bedesir)

Kegiatan Bedesir merupakan kegiatan untuk membangun desa pesisir dalam rangka memajukan masyarakat desa pesisir atau pantai serta peningkatan perekonomian rakyat dengan sasaran pokok pembangunan infrastruktur. Dalam satu tahun Lanal hanya kebagian satu program, mengingat alokasi dana kegiatan

sangat terbatas, adapun pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran oleh Lanal-Lanal yang ada. Dilihat dari rotasi program Bedesir hanya mendapat sekali dalam lima tahun. Pemilihan Lanal sebagai pelaksana diputuskan oleh Mabesal atas koordinasi dengan Lanal yang bersangkutan, selanjutnya Lanal yang bersangkutan mencari lokasi untuk pelaksanaan kegiatan. Sebagai wujud kemanunggalan dalam kegiatan tersebut maka seluruh komponen masyarakat pesisir dan aparat pemerintah dilibatkan.

Menurut penjelasan Paspotmar Lanal Cilacap bahwa pelaksanaan kegiatan Bedesir akan diawali dengan pengiriman sasaran oleh Lanal yang bersangkutan, dilanjutkan rapat teknis tingkat Mabesal untuk meyakinkan ketepatan sasaran, kemudian rapat teknis di Pemda untuk menentukan anggaran dan penentuan hari pelaksanaannya. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan sesuai hari yang telah ditentukan. Sasaran kegiatan baik fisik maupun non fisik di daerah pesisir Kabupaten Cilacap.

Menurut Bupati Cilacap bahwa kehadiran Lanal Cilacap dalam melaksanakan Binpotmar khususnya kegiatan bedesir di wilayah Cilacap sangat membantu pemerintah daerah dan stabilitas pertahanan dan keamanan serta membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pesisir

## 2) Karya Bhakti

Kegiatan Karya Bhakti dilakukan untuk meniadakan atau mengatasi gangguan dan hambatan dengan cara membangun infrastruktur sebagai saran penunjang untuk pengembangan wilayah desa pesisir tersebut atau kegiatan lainnya yang bersifat untuk mengatasi kesulitan masyarakat desa pesisir. Sasaran kegiatan fisik yang ingin dicapai dari program ini adalah terwujudnya pembangunan infrastruktur di wilayah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir antara lain: pembuatan jalan (semenisasi jalan), sarana pendidikan, pembangunan MCK, melaksanakan rehabilitasi mushola dan

rumah ibadah lainnya; terwujudnya tugas bantuan kepada pemerintah dalam percepatan pembangunan di wilayah pesisir; dan terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang dalam rangka Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Sedangkan sasaran non fisik, berupa: meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara; meningkatnya kesadaran bela Negara dan cinta tanah air; mantapnya wawaan kebangsaan; meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan; meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila; meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara; meningkatnya kesadaran bela Negara dan cinta tanah air; mantapnya wawasan kebangsaan; meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan; meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan peran serta masyarakat pesisir dalam bela Negara dan terwujudnya kemandirian TNI-Rakyat.

Karya Bhakti yang dilaksanakan oleh satuan jajaran Lanal Cilacap pada tahun 2012 di desa Klaces, Kecamatan Kampong Laut, Cilacap dilaksanakan pembuatan MCK sebanyak 4 unit, saluran air bersih sebanyak 1 buah dan pembuatan jalan (semenisasi) sepanjang 50 meter. Pada tahun 2013, Karya Bhakti di pantai Lohgending, Argopeni Kecamatan Ayah Kab. Kebumen dilaksanakan pembuatan MCK sebanyak 2 unit, saluran air bersih sebanyak 4 buah, rehabilitasi mushola dan pembuatan jalan (semenisasi) sepanjang 100 meter.

Pada tahun 2014, Karya Bhakti di pantai Jatimalang desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi Kab. Purworejo dilaksanakan pembuatan MCK sebanyak 3 unit, saluran air bersih sebanyak 1 buah, rehabilitasi mushola (1) buah dan pembuatan jalan (semenisasi) sepanjang 50 meter.

Pada tahun 2015, Karya Bhakti di pantai Karangandri desa Karangandri, Kecamatan Kesugihan Kab. Cilacap dilaksanakan pembuatan MCK sebanyak 2 unit, saluran air bersih sebanyak 1 buah dan rehabilitasi mushola (2) buah dan sasaran non fisik pendidikan bela negara.

Menurut penjelasan Kepala Desa Klaces bahwa kehadiran Lanal Cilacap maupun Pos TNI AL dalam melaksanakan Binpotmar sangat dirasakan manfaatnya oleh rakyat disini dan membantu masyarakat di desa Klaces khususnya pembinaan terhadap masyarakat nelayan.

Adapun kegiatan lain dalam lingkup Karya Bhakti yang dilaksanakan oleh Lanal Cilacap adalah:

a) Bersih Pantai

Berubahnya kondisi geografis di wilayah pesisir yang semula banyak jalur pesisir yang hijau kini telah berubah menjadi tempat wisata bahari dan café, pondok makanan dan kawasan perekonomian yang telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyaknya sampah plastic dan limbah makanan serta kotoran lainnya. Permasalahan ini semakin pelik wilayah pesisir ditetapkan sebagai wisata bahari seiring bertambahnya pengunjung yang datang tidak mempunyai kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Keadaan semakin parah apabila laut pasang surut akan bertambah banyak sampah yang mengotori pantai apabila ini tidak dibersihkan akan munculnya wabah penyakit akibat tidak ada kepedulian masyarakatnya.

Kondisi tersebut di atas, telah menjadi perhatian dan menggerakkan lanal Cilacap dan jajarannya untuk melakukan kampanye dan gerakan moral bersih pantai bekerjasama dengan semua komponen masyarakat dalam mengatasi sampah di pesisir/pantai.

Manfaat dari kegiatan ini selain dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman juga dapat memberikan nilai tambah bagi setiap pengunjung yang datang ke pantai/pesisir.

b) Bantuan Air Bersih

Dalam penyelenggaraan kegiatan Karya Bhakti yang di selenggarakan dalam bentuk operasi Bakti, salah satunya berbentuk kegiatan Bakti Sosial yang telah dilaksanakan bersama pemerintah daerah, Instansi terkait dan masyarakat

peisir baik atas inisiatif sendiri ataupun atas permintaan yang dilaksanakan secara rutin atau bersifat insidental sesuai kemampuan dalam rangka memperkuat kemandirian.

Kegiatan Bakti Sosial yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi kesulitan masyarakat yaitu berupa penyediaan air bersih untuk masyarakat yang kurang menikmati air bersih dan pelayanan kesehatan. Adapun kegiatan bantuan air bersih dan pelayanan kesehatan dilaksanakan di desa Klaces Kecamatan Kampong Laut yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang lalu.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengatasi kesulitan dan ketidakberdayaan masyarakat pesisir dalam kebutuhan air bersih dan pelayanan kesehatan serta untuk lebih memantapkan kemandirian TNI-Rakyat, Dari kegiatan tersebut sasaran yang ingin dicapai ada dua, yaitu:

- Tumbuh dan berkembangnya rasa empati yang dapat menciptakan tali persaudaraan yang kuat serta bersatupadunya antar aparat pemerintah di daerah dengan antar tokoh masyarakat yang melembaga dalam memberdayakan masyarakat dilingkungan.
- Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat di daerah menuju masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh dalam menghadapi hakekat ancaman.

c) Serbuan Maritim.

Kegiatan serbuan maritim merupakan pengerahan segala daya dan upaya untuk melaksanakan pembinaan potensi maritim secara serentak ke semua lini kehidupan dengan kegiatan nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir/pantai. Menurut Kadispotmar Mabesal, pelaksanaan kegiatan serbuan maritim akan diawali dengan usulan atau sasaran oleh Lanal yang bersangkutan, dilanjutkan rapat teknis tingkat Mabesal untuk meyakinkan ketepatan sasaran, kemudian rapat teknis di Pemda untuk menentukan anggaran dan penentuan hari pelaksanaannya. Tahap selanjutnya adalah

pelaksanaan kegiatan sesuai hari yang telah ditentukan. Tujuan dari serbuan maritim untuk mewujudkan kemandirian TNI AL - rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AL. Sasaran kegiatan terselenggaranya pembinaan potensi maritim lebih optimal ke semua lini kehidupan masyarakat pesisir dan terbinaanya potensi maritim. Pelaksanaan serbuan maritim di Lanal Cilacap dilaksanakan, antara lain:

- Pelatihan dan perkemahan Pramuka Saka Bahari merupakan wadah pembinaan generasi muda yang sudah dilaksanakan di perkemahan Lohgending, Kecamatan Ayah pada tanggal 4 Juli 2016 s.d 8 Juli 2016. Kegiatan ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, bela Negara, rasa cinta tanah air, disiplin dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda.
- Gerakan penanaman rumput laut secara serentak guna mendukung program ketahanan pangan. Kegiatan ini merupakan salah satu atensi pimpinan TNI untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dalam rangka mencapai kelangsungan ekosistem di pesisir/pantai selama kurun waktu tiga tahun. Oleh karena itu Lanal Cilacap bekerja sama dengan pemerintah daerah, KKP, instansi terkait dan seluruh masyarakat di wilayah pesisir melaksanakan gerakan intensifikasi penanaman rumput laut di perairan Lohgending, Kecamatan Ayah pada tanggal 5 April 2012.

d) Penanaman Mangrove

Kondisi lingkungan hidup di pesisir/pantai secara umum dari waktu ke waktu cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pelestarian lingkungan sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya kerusakan lingkungan pantai dan abrasi pantai. Pemerintah telah mencoba dengan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan pantai dan abrasi pantai tersebut dengan melakukan kegiatan penanaman mangrove di pantai yang terkena abrasi. Untuk

membantu pemerintah dalam melaksanakan gerakan menanam mangrove, maka Lanal Cilacap dan jajarannya yang merupakan bagian dari TNI AL melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di P. Nusakambangan secara intens dan melaksanakan pengawasan mangrove bersama-sama dengan masyarakat desa pesisir.

Menurut Danlanal Cilacap mengatakan bahwa kegiatan penanaman mangrove merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan untuk ikut berperan dalam pelestarian dan menjaga lingkungan pesisir, sehingga kerusakan ekosistem dapat diminimalisir (abrasi pantai di P.Nusakambangan terjaga). Kegiatan ini bertujuan membantu program pemerintah dalam melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam Pohon satu Milyard, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di laut serta mengurangi dampak dari pemanasan global.

Adapun sasaran kegiatannya penanaman mangrove di pesisir/pantai yang terkena abrasi maupun yang belum abrasi, mengkampanyekan budidaya penanaman mangrove yang bernilai ekonomis di pesisir/pantai serta kampanye "Save Our Mangrove". Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret s.d 7 Maret 2013 bertempat di Klaces, Kampong Laut (Nusakambangan) Cilacap. Menurut tokoh nelayan bahwa kehadiran Angkatan Laut atau Lanal Cilacap maupun Pos TNI AL disini sangat dirasakan manfaatnya dan membantu masyarakat di desa Klaces khususnya pembinaan terhadap masyarakat nelayan.

e) Vegetasi Terumbu Karang.

Kondisi lingkungan laut secara umum dari waktu ke waktu cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pencemaran di laut dan akibat perbuatan manusia seperti eksploitasi sumber daya laut yang tidak sesuai dengan pelestarian lingkungan sehingga menimbulkan adanya kerusakan lingkungan terumbu karang. Pemerintah telah mencoba dengan berbagai upaya untuk mengurangi dampak

kerusakan terumbu karang tersebut dengan melakukan kegiatan pencegahan terhadap pencarian ikan yang tidak sesuai peraturan. Untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan vegetasi terumbu karang, maka Lanal Cilacap dan jajarannya melaksanakan kegiatan vegetasi terumbu karang di perairan P. Nusakambangan, Cilacap dan perairan Lohgending, Kebumen

Menurut Danlanal Cilacap bahwa, kegiatan vegetasi terumbu karang merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan untuk ikut berperan dalam pelestarian dan menjaga lingkungan laut, sehingga kerusakan ekosistem dapat diminimalisir. Kegiatan ini bertujuan membantu program pemerintah dalam melaksanakan kerusakan terumbu karang di laut, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di laut serta mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan laut.

Adapun sasaran kegiatannya vegetasi terumbu karang di laut, mengkampanyekan vegetasi (pencangkokan) terumbu karang yang dapat menjaga pelestarian lingkungan pantai dari abrasi dan menjaga pelestarian sumber daya kelautan serta kampanye "Save Our Litora". Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 15 September s.d 22 September 2015 bertempat di perairan Nusakambangan Timur, Cilacap dan 8 Oktober s.d 12 Oktober di perairan Lohgending, Kebumen.

Hal ini dikuatkan penjelasan dari tokoh nelayan bahwa kehadiran Angkatan Laut atau Lanal Cilacap maupun Pos TNI AL disini sangat dirasakan manfaatnya dan membantu masyarakat nelayan khususnya pembinaan terhadap masyarakat nelayan.

c. Pelaksanaan Komunikasi Sosial.

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar yang memiliki kondisi konstelasi geografis yang strategis, karena wilayah Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan dua samudera, sehingga dengan posisi

geografis tersebut menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional (Marsetio, 2014).

Menurut Cribb, R dan Ford, M (2009) bahwa dengan realitas geografis dan keuntungan secara geopolitik di kawasan tersebut tidak selalu membuat Indonesia memperoleh keuntungan secara langsung, khususnya pada domain maritim yang menempatkan laut sebagai satu instrumen utama untuk kesejahteraan rakyat, sebagai sarana transportasi dan kekayaan ekonomi yang dikandungnya, namun pengelolaan laut penuh dengan paradoks. Di satu sisi laut dilihat sebagai sumber kerentanan jika tidak dikelola dengan baik tetapi di sisi lain juga memberikan berkah tersendiri. Laut bisa menjadi tempat yang menguntungkan bagi berkembangnya kekuatan musuh dan orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap negara dan orang lain. Sejarah telah mencatat bahwa masih maraknya imigran gelap atau pencari suaka yang melewati jalur laut. Masuknya imigran gelap di perairan Indonesia tersebut ditengarai akibat kurangnya sistem peringatan dini, kurang koordinasi terhadap penanganan imigran gelap, lemahnya kinerja aparat penegak hukum. Hal ini diperlukan pentingnya pembinaan potensi maritim melalui komunikasi sosial. Dalam konteks penanganan imigran gelap bagi TNI AL disamping melaksanakan operasi di laut dan mengoptimalkan peran Lanal atau Komando Kewilayahan melalui komunikasi sosial merupakan sebuah strategi dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat pesisir. Seperti pepatah mengatakan "tak kenal maka tak sayang". Filosofi ini memberikan makna yang sangat mendalam dalam merekatkan tali persaudaraan melalui aktifitas silaturahmi. Makna inilah bagi Komando Kewilayahan di wujudkan dalam komunikasi sosial. Komunikasi sosial sebagai salah satu metode dalam pembinaan potensi maritim saat ini telah diaplikasikan oleh Lanal Cilacap melalui beberapa kegiatan seperti tatap muka, anjangsana, seni budaya kegiatan keagamaan, olah raga maupun kegiatan lainnya yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam rangka ikut memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun kegiatan komunikasi sosial yang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Komunikasi sosial dalam bentuk koordinasi dengan Aparat Pemerintah dan aparat lainnya di wilayah Lanal Cilacap.

Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersinergi/bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak lain. Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan koordinasi ini adalah untuk memberikan pesan tentang kebersamaan para unsur pimpinan daerah kepada masyarakat luas sebagai suatu sinyal positif bahwa kebersamaan dapat melahirkan kecepatan kerja dalam upaya melayani masyarakat secara keseluruhan.

Jika dilihat dari sudut normatinya, maka koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyasikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktunya yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif dan mengefektikan pembagian kerja. Satu hal positif kegiatan ini adalah kemauan para pejabat untuk menurunkan ego sektor masing-masing untuk menuju pada kepentingan yang lebih besar.

Tujuan dari koordinasi adalah untuk menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, peyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi; untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan dan untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipasif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-

beda, agar keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Komunikasi dengan aparat pemerintah dilaksanakan oleh Lanal Cilacap dengan jajarannya dalam rangka sosialisasi kegiatan-kegiatan Binpotmar berikut sasarannya untuk mendapatkan kesamaan visi dan persepsi. Instansi yang diajak koordinasi dalam hal ini adalah semua aparat yang ada di wilayah seperti Pemda, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta instansi keagamaan, Tokoh masyarakat desa pesisir dan instansi swasta lainnya. Hal ini secara paralel juga dilakukan oleh Posal-Posal di jajaran Lanal Cilacap.

## 2) Komunikasi Komunitas Maritim

Komunikasi komunitas maritim merupakan kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh Lanal Cilacap dan jajarannya dengan mengundang institusi maritim, pelaku industri jasa maritim, tokoh-tokoh masyarakat desa pesisir dan HNSI di wilayahnya untuk meningkatkan komunikasi dengan komunitas maritim. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan *coffee morning* untuk meningkatkan tali persaudaraan antara Satuan Kowil dengan komunitas maritim. Materi dalam kegiatan ini ada bermacam-macam materi diantaranya seperti penyampaian pesan terkait penegakkan hukum dilaut, keamanan laut (kamla), penanganan orang tenggelam dilaut, peraturan kecelakaan di laut (PPTL), aturan navigasi atau perabuan dilaut, prosedur pelaporan orang asing, komitmen netralitas TNI dalam pemilu, penegasan komitmen TNI dalam keterbukaan informasi, komitmen TNI dalam mendukung penegakkan undang-undang, penegasan kepatuhan TNI dalam peraturan lalu lintas, penyampaian sosialisasi program bela negara, sosialisasi wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan pesan-pesan khusus mengenai komitmen TNI untuk menjaga keutuhan bangsa dan menjaga negara dari segala bentuk ancaman. Selain itu adalah untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan komunitas yang ada di wilayah Cilacap.

### 3) Sosialisasi Peta Laut Indonesia.

Peta laut merupakan sangat penting bagi pelayaran khususnya para pengguna laut (kapal-kapal maupun nelayan). Sebagaimana diketahui wilayah Cilacap, Kebumen dan Purworejo bagian selatan merupakan perairan samudera Hindia dan berbatasan langsung dengan Australia. Lanal Cilacap senantiasa melakukan sosialisasi pentingnya peta laut dalam memberikan jaminan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia dan sebagai salah satu bagian dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Materi sosialisasi tentang keselamatan navigasi pelayaran, kemaritiman, peta laut, batas laut yang harus diketahui segenap stakeholder yang bertugas dilaut yang dilaksanakan pada 16 Januari 2014 di Mako Lanal Cilacap, dengan peserta masyarakat maritim, tokoh masyarakat pesisir dan nelayan. Menurut Danlanal Cilacap bahwa tujuan sosialisasi peta laut ini untuk menyampaikan pesan moral dalam keselamatan pelayaran, seperti: masyarakat nelayan yang melakukan aktivitas sebagai penangkap ikan di laut diharapkan dapat mengetahui peta zona perbatasan tersebut agar tidak memasuki wilayah negara lain. Disamping itu meningkatkan hubungan yang harmonis antara satuan Komando Kewilayahan dengan segenap masyarakat maritim

Sasaran adalah terwujudnya komunikasi yang intensif dan partisipatif antar TNI AL dengan segenap komponen masyarakat maritim untuk kepentingan Binpotmar; terbangunnya kesadaran rasa cinta tanah air/ nasionalisme yang semakin mantap; terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin kokoh; dan tercapainya maksud untuk melakukan keselamatan pelayaran bagi masyarakat maritim khususnya nelayan.

### 4) Sosialisasi dan Penertiban Penggunaan Jaring Apung.

Penggunaan jaring apung di alur pelayaran Cilacap sangat marak, keberadaan jaring apung dapat mengganggu lalu lintas pelayaran dan dapat mengancam biota laut yang ada di kawasan itu, sebab ikan-ikan yang kecil turut tersangkut jaring sehingga lambat laun populasi ikan akan musnah, disamping itu pemasangan jaring

apung yang tidak pada tempatnya juga dapat menjadi ancaman navigasi. Disamping itu tingkat pemahaman para nelayan akan keselamatan pelayaran di alur pelayaran masih rendah. Menurut Danlanal Cilacap bahwa melaksanakan kegiatan sosialisasi ini bersama-sama dengan aparat Keamanan laut (Kamla) melaksanakan sosialisasi jaring apung selanjutnya dilaksanakan penertiban jaring apung kepada para pemilik untuk membersihkan jaring beserta peralatannya dialur pelayaran Cilacap.

Tujuan dari sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman penggunaan alat perikanan yang merusak sumber daya laut dan memberikan solusi atau terobosan yang tepat untuk para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menebar jaring apung. Disamping itu penertibanjaring apung juga untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi alur pelayaran. Sasaran adalah terwujudnya keselamatan pelayaran di alur pelayaran; terjaganya sumber daya atau biota laut dan pelestarian lingkungan laut; dan tercapainya komunikasi antara aparat Potmar dan jajaran Kamla dengan nelayan.

#### 5) Olah Raga Perairan

Menurut Danlanal Cilacap bahwa olah raga perairan merupakan kewajiban bagi prajurit TNI AL untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama masyarakat desa pesisir/nelayan untuk membudayakan dayung, renang di laut dan penyelaman dasar. Sebagaimana diketahui bahwa olah raga perairan merupakan salah satu alat komunikasi masyarakat pesisir/nelayan dalam mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran melalui penyampaian pesan-pesan moral kepada masyarakat desa pesisir dan komunitas maritim sebagai sebuah himbauan. Dalam olah raga perairan ini pesertanya dari berbagai kelompok nelayan dan masyarakat komunitas maritim di wilayah Cilacap sekitarnya.

Tujuan dari olah raga perairan ini adalah untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara aparat Komando Kewilayahan dengan segenap komponen masyarakat pesisir/nelayan, guna

membangun kesamaan visi dan misi pengabdian dalam rangka kepentingan pertahanan negara di laut.

Adapun sasarannya adalah : terwujudnya komunikasi yang intensif dan partisipasian antar TNI AL dengan segenap komponen masyarakat desa pesisir dan komunitas maritim untuk kepentingan Binpotmar; Terbangunnya kesadaran rasa cinta tanah air/nasionalisme yang semakin mantap; Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin kokoh; dan Tercapainya maksud untuk melakukan program pemanduan bakat guna mencari bibit potensial dalam bidang olah raga perairan khususnya bagi generasi muda di wilayah pesisir.

#### 6) Sosialisasi Rumpon Laut

Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan semakin banyak digunakan oleh para pelaku utama penangkapan ikan (nelayan) maupun pelaku usaha bidang penangkapan ikan. Hal tersebut dikarenakan rumpon memberikan manfaat yang cukup nyata dalam upaya peningkatan hasil tangkapan ikan. Disamping itu rumpon juga dapat membantu dalam penangkapan ikan dengan menggunakan berbagai alat tangkap ikan, baik alat tangkap ikan yang aktif (seperti purse seine) maupun alat tangkap pasif (pancing, dan lain lain). Namun menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Kompas, Senin (13/06/2016), berpendapat lain, bahwa, jika rumpon ikan terus dibiarkan ada, maka itu akan berdampak pada ekologi perairan yang ada. Akibatnya, ikan-ikan pelagis besar yang ada tidak akan bisa mendekati ke pesisir atau dalam batas wilayah di bawah 4 mil dari bibir pantai. Selanjutnya Kemen KKP mengadakan Operasi pemusnahan rumpon dengan menggandeng aparat seperti TNI AL dan dilakukan di seluruh perairan Indonesia.

Tugas TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b operasi militer selain perang angka 9 "Membantu tugas pemerintah daerah" melalui fungsi utama Binpotmar penyelenggaraan upaya dan usaha membantu nelayan untuk

mendapatkan ikan-ikan yang berukuran besar dan bernilai ekonomis tinggi bersama-sama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta berbagai pihak pelaku usaha perikanan untuk mencapai hasil yang maksimal telah dilaksanakan diantaranya penertiban rumpon laut. Salah satu hal yang selalu menjadi hambatan dalam usaha penertiban rumpon laut adalah nelayan tidak memberikan informasi keberadaan rumpon laut.

Sasaran yang ingin dicapai, dari kegiatan ini adalah: menjelaskan kerugian terhadap pemasangan rumpon laut di wilayah kerja Lanal Cilacap guna mendukung upaya operasi pemusnahan rumpon laut; terlaksananya pemusnahan rumpon laut di wilayah kerja Lanal Cilacap; Terwujudnya peningkatan pemahaman para DanPosal tentang pemusnahan rumpon laut; dan Meningkatnya kemandirian TNI dengan Rakyat guna mendukung tugas pokok TNI AL.

#### 7) Sosialisasi Imigran Gelap.

Sebagaimana diketahui bahwa masuknya imigran gelap di wilayah Cilacap dan sekitarnya mulai marak pada tahun 2012 dengan berbagai cara masuk wilayah Negara Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen keimigrasian dan memanfaatkan masyarakat pesisir/nelayan untuk menyiapkan sarana prasarana sebagai moda transportasi ke negara tujuan. Melihat kenyataan bahwa imigran gelap yang masuk wilayah Cilacap semakin marak dari tahun 2012 s.d tahun 2014. Mengantisipasi hal ini Lanal Cilacap beserta institusi terkait untuk memberikan sosialisasi tentang imigran gelap kepada Muspika Kampong Laut, tokoh masyarakat komunitas maritim, masyarakat desa pesisir dan nelayan di wilayah Klaces, Kabupaten Cilacap. Menurut pejabat kantor pelayanan imigrasi Cilacap bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat khususnya masyarakat nelayan bisa memahami dan sadar dan bersama-sama dengan aparat untuk membantu atau melaporkan apabila ada yang orang asing yang berada di wilayahnya. Demikian juga penjelasan Danlanal Cilacap kerjasama akan ditindak lanjuti untuk melaksanakan pencegahan terhadap

imigran gelap dengan cara menambah intensitas kegiatan Binpotmar di wilayah pesisir.

d. Pembinaan Ketahanan Wilayah.

Pembinaan Ketahanan Wilayah yang dilaksanakan secara berdiri sendiri atau bersama-sama Pemerintah Daerah/LPNK dan komponen bangsa lainnya dalam membangun peran serta masyarakat pesisir menjadi kekuatan pertahanan negara di laut, perlawanan rakyat dan bela negara dengan kemampuan tangkal yang dimiliki dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di wilayah perairan/pesisir. Pembinaan Ketahanan Wilayah meliputi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan RAK Juang yang disesuaikan dengan kondisi wilayah/ pesisir.

Kondisi ini dapat terwujud apabila didukung pelaksanaan pembinaan geografi maritim secara terus menerus dengan pendataan, penataan, pengelolaan dan penyiapan (SDA/SDB, Sarana Prasarana), logistik wilayah; pembinaan demografi dengan pendataan, penataan, pengelolaan dan penyiapan (komponen cadangan dan komponen pendukung); pembinaan kondisi sosial dengan penyiapan kondisi masyarakat yang memiliki semangat juang, kesadaran bela Negara, berwawasan kebangsaan yang tinggi serta siap menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dalam negeri. Kondisi tersebut diatas harus selalu di update secara terus menerus.

Untuk memperoleh ketahanan wilayah yang solid, kegiatan yang dilaksanakan lebih bersifat mengajak seluruh komponen masyarakat dalam satu wadah koordinasi untuk mencapai sinkronisasi dalam pelaksanaannya dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran awal dalam mengantisipasi perkembangan situasi yang tidak bersahabat. Dalam kegiatan ini partisipasi seluruh masyarakat secara sinergis adalah sebuah keniscayaan yang pada akhirnya mampu mencegah dan menetralkan berbagai ancaman yang mungkin terjadi. Kegiatan nyata yang dilaksanakan Lanal Cilacap dalam pembinaan ketahanan wilayah adalah sebagai berikut :

### 1) Pembinaan Desa Pesisir

Pembinaan desa pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan desa pesisir dari ketergantungan mata pencaharian nelayan pada waktu musim paceklik (gelombang tinggi). Pembinaan desa pesisir mampu diawali dengan pembinaan peningkatan sumber daya manusia (nelayan dan keluarganya), meningkatkan kemampuan pengetahuan teknologi kelautan dan alat penangkapan ikan dan hasil tangkapan ikan serta meningkatkan kemampuan pembuatan produk-produk kelautan sehingga memberikan penghasilan tambahan. Lanal Cilacap melaksanakan pembinaan desa pesisir di desa Klaces, desa Lohgending dan desa Purwodadi.

Pembinaan desa pesisir utamanya kepada nelayan dan keluarganya agar memiliki tingkat kesejahteraan nelayan/pesisir sehingga memiliki daya tangkal yang baik. Keberadaan Posal dan Bintara Pembina potensi maritim sebagai Pembina desa pesisir harus mampu membantu masyarakat pesisir, melalui aktifitasnya yang langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat desa pesisir. Setiap perkembangan situasi di desa pesisir harus dapat terpantau, terutama perkembangan situasi yang mengarah kepada konflik sosial atau masuk/datangnya orang asing ke wilayah desa pesisir serta mampu untuk mengkoordinasikan penyelesaian dengan baik bersama seluruh komponen masyarakat lainnya, sehingga keberadaan Posal dan Babinpotmar sebagai figur satuan Komando Kewilayahan kehadirannya akan selalu diharapkan dan didambakan oleh masyarakat pesisir/nelayan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah diperoleh pemahaman yang sama dalam melihat berbagai fenomena yang berkembang di wilayah desa pesisir guna mewujudkan pola pikir, sikap dan tindakan dalam mengantisipasi dan penanggugalannya; Terakomodasinya informasi, serta kebijakan pimpinan kepada para Danposal dan Babinpotmar melalui komunikasi sosial dengan masyarakat desa pesisir; Meningkatnya kemandirian TNI AL-Rakyat.

Menurut penjelasan manajer RU PT.Pertamina Cilacap bahwa kehadiran Lanal Cilacap dapat bekerjasama baik berupa pengaman di wilayah alur pelayaran Cilacap dan dalam Binpotmar melaksanakan kerjasama pembinaan desa pesisir dengan kegiatan penanaman mangrove di desa Klaces.

## 2) Pembinaan Pramuka Saka Bahari

Kegiatan Lanal Cilacap dan jajarannya melaksanakan pembinaan Pramuka sebagai generasi penerus bangsa perlu diarahkan dan dibina sedini mungkin agar memiliki kesadaran sepenuhnya sebagai pewaris Negara Indonesia yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Saka bahari merupakan satu jenis satuan karya pramuka, tempat peningkatan dan pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapan para pramuka penegak dan pramuka pandega dan sebagai penanaman rasa cinta serta sikap hidup yang berorientasi kebaharian.

Menurut Danlanal Cilacap bahwa, kegiatan pembinaan Pramuka Saka Bahari diwilayah jajaran Lanal Cilacap diberikan materi krida sesuai yang diemban oleh saka bahari, antara lain; reksa bahari, wisata bahari, sumber daya bahari, industri-industri jasa maritim.

Ruang lingkup pengembangan krida saka bahari;

Krida Reksa Bahari, meliputi semua kegiatan yang menyangkut pemanduan, penyelamatan dan komunikasi dilaut antara lain : SAR di laut, pengenalan bernavigasi laut, pengawas bahari, komunikasi laut (isyarat bendera dan pengenalan telegrafis/RDO),

Krida Wisata Bahari, meliputi semua kegiatan yang ada kaitannya dengan memajukan parawisata lingkup bahari antara lain : pemandu wisata, dasar– dasar penyelamatan wisata dilaut, pengenalan penyelaman dasar (bawah air), olahraga perairan (dayung). Krida sumber daya bahari, meliputi kegiatan-kegiatan: pengawasan pelestarian sumber daya laut (vegetasi karang). Krida industri dan jasa maritim/bahari, meliputi: Ikut dilibatkan membantu industri perahu-perahu nelayan, mesin-mesin dan listrik industri maritim, di perbantukan operator bongkar muat barang dikapal dan

industri kerajinan tangan hasil laut. Merencanakan latihan keterampilan kebaharian meliputi: latihan keterampilan menggunakan tali temali dikapal; latihan-latihan mendayung dengan perahu-perahu tradisional maupun perahu karet; latihan membaca tanda-tanda dan simbol-simbol dipeta laut; latihan membaca kompas dan membaring dengan kompas; latihan keterampilan menyelam dan menggunakan peralatan selam; mengetahui dan membaca peta Indonesia khususnya wilayah samudra, laut-laut, kota-kota, pelabuhan, pulau-pulau, teluk-teluk, di Indonesia. Kegiatan lainnya, Pramuka Saka Bahari: baris-berbaris; tata upacara dilapangan maupun diruangan; olah raga umum; latihan survival pantai dan perkemahan; latihan survival kolam renang. Saka bahari berfungsi sebagai sebagai: wadah pengenalan awal, pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan dibidang kebaharian; sarana untuk pelaksanaan kegiatan nyata dan produktif, serta bakti kepada masyarakat; pelengkap pendidikan kepramukaan; alat untuk mencapai tujuan gerakan pramuka.

Tujuan dari pembinaan pramuka Saka Bahari adalah peran serta pembinaan saka bahari bertujuan untuk menumbuhkan minat, mengembangkan bakat dan meningkatkan kemampuan pramuka dalam bidang kebaharian dengan sasaran terwujudnya saka bahari yang terbina secara mantap, sehingga tujuan pembinaan kepramukaan dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan bangsa dan negara serta pertahanan di laut.

### 3) Pelayaran Lingkar Nusantara (Pelantara)

TNI AL melalui Dinas Pembinaan Potensi Maritim (Dispotmar) dalam upaya untuk menumbuhkan kembali kesadaran cara pandang generasi muda dalam melihat ruang hidup bangsanya sebagai bangsa bahari. Untuk mewadahi kepentingan tersebut, Dispotmar Mabesal melaksanakan kegiatan Pelayaran Lingkar Nusantara (Pelantara) yang program setiap tahun dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari penyelenggaraan *Sail*. Menurut Danlanal Cilacap bahwa kegiatan Pelantara ini kewajiban Lanal Cilacap dan

jajaran untuk ikut berpartisipasi dengan mengirim delegasi terdiri dari 7 putra dan 6 putri setiap tahunnya.

Tujuan dari Pelantara adalah pembinaan generasi muda dalam kerangka “*national character building*” sekaligus turut menyukseskan program pemerintah dalam rangka kegiatan *Sail*, melalui: kegiatan pelayaran dengan menyinggahi dan memperkenalkan pulau pulau terluar NKRI; mengenalkan kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam baik budaya maupun kehidupan sosialnya; dan meningkatkan kecintaan generasi muda dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengamanan pulau terluar bagi keutuhan NKRI.

Sasaran adalah terwujudnya kesadaran bela negara, cinta tanah air dan cinta bahari; terwujudnya pemahaman pengamanan di wilayah perbatasan, perairan ALKI dan pulau kecil terluar untuk dipertahankan; terwujudnya pemahaman tradisi kehidupan TNI Angkatan Laut; terwujudnya pemahaman tentang potensi nasional maritim; dan Terselenggaranya kegiatan perkemahan lingkaran nusantara sebagai dharma bakti bagi aktifitas “*national character building*” yang berorientasi kebaharian.

#### 4) Kapal Pemuda Nusantara/Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (KPN/LNRB)

Program Kapal Pemuda Nusantara/Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (KPN/LNRPB) merupakan program kerjasama TNI Angkatan Laut dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam upaya untuk menumbuhkan kembali kesadaran cara pandang generasi muda dalam melihat ruang hidup bangsanya sebagai bangsa bahari. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, maka pemerintah membuat program KPN/LNRB sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sail dan yang dilaksanakan setiap tahun. Menurut Kadispotmar Mabesal bahwa peserta dari KPN/LNRB adalah generasi muda (pemuda/i) perwakilan setiap daerah dengan jumlah rata-rata 300 orang setiap tahun. Menurut Danlanal Cilacap tahun 2015 mengirimkan

perwakilan sebanyak 2 orang putra-putri untuk berpartisipasi aktif dalam program KPN/LNRB.

Tujuan dari KPN/LNRB adalah memotivasi semangat para pemuda-pemudi pilihan untuk membangun sumber daya kelautan Indonesia dan mengenalkan kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam budaya maupun kehidupan sosialnya.

Sasaran adalah termotivasi para pemuda-pemudi untuk membangun sumber daya kelautan Indonesia dan berjiwa bahari; terwujudnya kesadaran bela negara, cinta tanah air dan cinta bahari; terwujudnya pemahaman tentang perairan laut Indonesia dan wilayah perbatasan laut.

#### 5) Latihan Dasar Disiplin Kepemimpinan (LDDK)

LDDK merupakan upaya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, khususnya para siswa-siswi sekolah lanjutan atas sebagai generasi penerus bangsa maka perlu diarahkan dan dibina sedini mungkin agar memiliki kesadaran sepenuhnya untuk mewarisi dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kesadaran yang dimaksud disini adalah keinginan yang kuat bagi para siswa-siswi untuk selalu mengembangkan kemampuan kualitas diri agar pada waktunya nanti menerima giliran sebagai penentu kebijakan mampu berbuat demi kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Danlanal Cilacap bahwa Lanal Cilacap dan beserta jajarannya mengadakan kegiatan Latihan Dasar Disiplin Kepemimpinan (LDDK) di beberapa sekolah Lanjutan Atas di wilayah kerja Lanal Cilacap setiap tahunnya dan disesuaikan dengan program dari sekolah masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ini di Sekolah Lanjutan Atas se Kabupaten Cilacap, Kec. Ayah, Lohgending dan Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, dimulai pada bulan Juli 2012. Kegiatan ini bertujuan agar para siswa-siswi selesai melaksanakan latihan ini mempunyai pengetahuan dan pemahaman jiwa/karakter disiplin, beretika, pengetahuan tentang bahaya narkoba, bela negara serta cinta lingkungan dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sasaran yang ingin

dicapai dari kegiatan ini adalah : Terwujudnya kesadaran cinta tanah air dalam bentuk kewaspadaan dan siap membela tanah air Indonesia; Meningkatkan wawasan kebangsaan terhadap para siswa-siswi/pelajar khususnya di Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Purworejo; Terwujudnya kesediaan rela berkorban untuk bangsa dan negara; Terwujudnya kemampuan awal bela negara; dan Terjalinya komunikasi dua arah guna mewujudkan kemandirian TNI AL-Rakyat.

6) Pembinaan Komunitas Maritim.

Pembinaan komunitas maritim untuk meningkatkan wawasan kebangsaan terhadap SDM maritim beserta SDA/B dan sarana prasarananya sehingga komunitas maritim memiliki kesadaran bahwa dirinya sebagai bagian bangsa Indonesia yang selalu dijiwai oleh Pancasila. Perwujudan dari pembinaan masyarakat maritim ini diwujudkan dalam wawasan kebangsaan, ada tiga tindakan yaitu : mempunyai rasa kebangsaan, ditujukan pada upaya untuk menumbuhkan kesatuan tekad dan perasaan masyarakat maritim terhadap kondisi bangsanya yang dibalut oleh rasa cinta, penghormatan serta menjaga nama baik bangsanya yang diwujudkan dalam bentuk kesetiiaannya; Paham Kebangsaan, diarahkan pada terbentuknya pemahaman masyarakat maritim yang sama terhadap bangsa dan Negara Indonesia yang tercermin pada pemenuhan pada hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, tanpa ada diskriminasi; dan semangat kebangsaan, diarahkan pada kualitas ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, yang diwujudkan pada motivasi untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan pembinaan komunitas maritim terkait wawasan kebangsaan oleh Lanal Cilacap dalam bentuk:

Pembinaan Masyarakat Maritim guna terwujudnya kesadaran bela negara bagi setiap warganegara (profesi) bidang kelautan yang memiliki tekad, semangat, sikap tindakan yang teratur menyeluruh terpadu dan berlanjut dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran yang ingin dicapai adalah : terwujudnyakesadaran cinta tanah air dalam bentuk kewaspadaan dan siap membela tanah air indonesia; Meningkatkan kemampuan fisik warganegara (profesi) bidang kelautan; terwujudnya kesedian rela berkorban untuk bangsa dan negara; terwujudnya kemampuan awal bela negara; dan terwujudnya kerjasama antara TNI AD, TNI AU dan Pemda dalam kegiatan pembinaan masyarakat maritim.

Pembinaan SDA/B dan Sarana Prasarana merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan SDA/B dan Sarana Prasarana agar dapat di gunakan untuk kepentingan pertahanan negara di laut. Pembinaan SDA/B dan Sarana Prasarana diawali dengan pembinaan peningkatan sumber daya alam, buatan dan Sarana Prasarana, meningkatkan kemampuan penambahan fasilitas baik kelebihan maupun kekurangannya yang akan disiapkan untuk kepentingan pertahanan negara di laut. Pembinaan SDA/B dan Sarana Prasarana utamanya pantai pendaratan, dermaga dan kapal-kapal pemerintah maupun non pemerintah agar memiliki tingkat ketangggpan yang baik sehingga memiliki daya tangkal yang baik.

Keberadaan Danlanal dan Danposal sebagai pembina SDA/B dan Sarana Prasarana di wilayahnya harus mampu membantu pengelola, SDB dan sarana prasarananya melalui aktifitasnya yang langsung dapat membantu pengawasan dan keselamatan demi untuk kepentingan pertahanan negara di laut. Setiap perkembangan situasi di wilayah harus dapat terpantau, terutama perkembangan situasi yang mengarah kepada kerusakan SDA/B dan sarana prasarana serta mampu untuk mengkoordinasikan penyelesaian dengan baik bersama seluruh komponen masyarakat lainnya, sehingga keberadaan Danlanal dan Danposal sebagai figur satuan Komando Kewilayahan kehadirannya akan selalu diharapkan dan didambakan oleh komunitas maritim.

Sasaran dari kegiatan ini adalah : Diperolehnya pemahaman yang sama dalam melihat berbagai fenomena yang berkembang di

wilayahnya guna mewujudkan pola pikir, sikap dan tindakan dalam tindakan antisipasi dan penanggulangannya; Terakomodasinya informasi, serta kebijakan pimpinan kepada para Danlanal dan Danposal melalui komunikasi sosial di wilayah; Meningkatnya kemandirian TNI AL-rakyat sehingga terwujud sasaran Binpotmar; dan Membantu pemilik atau pengelola SDA/B dan sarpras binaannya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah pesisir. Wilayah pembinaan SDA/B dan sarana prasarana, adalah ; pantai penyu, pantai Jetis, pantai Lohgending, pelabuhan umum Cilacap, pelabuhan perikanan Cilacap, Pelabuhan perikanan Lohgending. Menurut tokoh maritim bahwa Lanal Cilacap sampai saat ini dapat menciptakan lingkungan keamanan laut di wilayah perairan Cilacap dan sangat membantu para pengguna laut dan dalam kegiatan pembinaan potensi maritim, sumber daya buatan yang kita punya siap untuk membantu dan digunakan sewaktu-waktu oleh Lanal Cilacap.

7) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) pesisir sebenarnya awalnya di dirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang beranggotakan masing-masing kelompok sekitar 20 orang. Personel yang tergabung di dalam Pokmaswas merupakan campuran antara mereka yang tetap berprofesi sebagai nelayan dan non nelayan, sehingga diharapkan seluruh informasi yang terkait dengan tindak pelanggaran pidana perikanan dan kelautan akan tersampaikan dengan baik ke pemerintah daerah. Menurut Danlanal Cilacap menyatakan bahwa pembinaan Pokmaswas disinergikan dengan pembinaan desa pesisir binaan Lanal Cilacap. Hasil koordinasi dengan KKP Cilacap melaksanakan pembinaan terhadap Pokmaswas pesisir dalam rangka mendukung Binpotmar dan membantu Lanal Cilacap dalam kegiatan temu cepat dan lapor cepat, kegiatan atau tindakan untuk memperoleh keterangan secara cepat (deteksi dini) dan melaporkan dengan cepat untuk ditindak lanjuti dalam bentuk cegah dinitemu cepat dan lapor cepat, kegiatan atau tindakan untuk memperoleh keterangan secara cepat

(deteksi dini) dan melaporkan dengan cepat untuk ditindak lanjuti dalam bentuk cegah dini oleh Lanal.

Tujuan dari kegiatan ini, adalah peningkatan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan yang bertanggung jawab; melaksanakan kegiatan pengawasan secara reguler terhadap wilayah pesisir yang rawan pelanggaran/konflik; penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan; membentuk, membina, dan mengembangkan Pokmaswas melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat; dan mensinergikan kegiatan pengawasan berbasis masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku yang destruktif.

Sasaran dari kegiatan ini, adalah diperolehnya pemahaman yang sama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan; terciptanya pengawasan secara reguler terhadap wilayah perairan atau pesisir yang rawan terhadap pencurian ikan secara ilegal maupun pengawasan terhadap imigran ilegal; terciptanya penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran sumber daya perikanan dan kelautan; Meningkatnya kemandirian TNI AL-Rakyat sehingga terwujudnya sasaran Binpotmar.

Menurut penjelasan kepala KKP Kab. Cilacap bahwa kehadiran Lanal Cilacap selama ini dapat bekerjasama baik berupa pengaman di perairan Cilacap dan dalam kegiatan Binpotmar melaksanakan kerjasama pembinaan desa pesisir melalui Pokmaswas dengan kegiatan penanaman mangrove.

#### 8) Kesadaran Berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara Lanal Cilacap bersama-sama Pemda dan instansi terkait lainnya seperti ormas maupun organisasi keagamaan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat desa pesisir yang diarahkan pada:

- Kerukunan hidup, pada kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keragaman agama dan suku bangsa yang diwujudkan dalam sikap toleransi, saling menghormati dan sikap tenggang rasa.

- Kelestarian dan pembinaan budaya bangsa, melalui kegiatan peningkatan pengetahuan mengenai seni budaya setempat sebagai kebudayaan bangsa yang perlu dilestarikan yang diwujudkan dengan mendalami budaya melalui kegiatan seni.
- Mencintai produksi dalam negeri, yang diarahkan pada pengetahuan tentang hasil produk-produk dalam negeri serta ajakan untuk mengkonsumsi produk-produk yang menjadi andalan dan keunggulan daerah.
- Pembauran bangsa, kegiatan diarahkan pada pengetahuan penyebaran dan pembauran penduduk serta mau menerima warga pendatang yang berasal dari daerah lain secara damai dan setara.
- Perlakuan terhadap Bendera, kegiatan diarahkan pada peningkatan pengetahuan tentang tata cara perlakuan terhadap bendera Merah Putih sebagai lambang negara yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan dan pengibaran bendera pada hari-hari besar nasional.
- Penggunaan Bahasa Indonesia, kegiatan diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi resmi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Kesadaran dan kepatuhan pada hukum, pada bagian ini kegiatan diarahkan pada pencerahan tentang hukum tertulis yang berlaku di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap berbagai jenis hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut penjelasan Bupati Cilacap bahwa penting pembinaan Kesadaran Berbangsa dan bernegara, apa yang dilaksanakan Lanal Cilacap ini sangat membantu pemerintah daerah dan stabilitas pertahanan dan keamanan serta membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pesisir .

#### 9) Pembinaan Budi Daya Kerapu

Ikan laut merupakan salah satu sumber protein yang penting bagi kehidupan manusia. Bangsa Indonesia sudah sejak dari dulu mengenal ikan dan memanfaatkannya sebagai salah satu komoditas perdagangan yang cukup menarik. Namun seiring

dengan perubahan lingkungan yang terjadi sangat dinamis menyebabkan pelestarian lingkungan laut mengalami degradasi lingkungan (kerusakan terumbu karang) berakibat pada berkurangnya ikan laut khususnya kerapu yang berhabitat di perairan terumbu karang. Melihat kondisi tersebut, selaku aparat potensi maritim harus memiliki kepekaan dalam menghadapi situasi yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan KKP setempat Lanal Cilacap dan jajarannya melaksanakan pembinaan budi daya kerapu ini di perairan yang mempunyai terumbu karang. Hal ini merupakan tindakan yang sangat strategis guna meningkatkan ketahanan di masyarakat desa pesisir.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: Memahami mekanisme budidaya kerapu didesa pesisir Lohgending guna menjamin tersedianya ikan yang bernilai gizi tinggi untuk kebutuhan masyarakat; tersusunnya tentang perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dalam megembangkan budidaya ikan kerapu; Terlaksananya pegembangan budidaya kerapu sesuai dengan keraifan lokal; Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat desa pesisir tentang mekanisme pengembangan budidaya kerapu; Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pesisir yang berdampak kepada ketahanan ekonomi masyarakat secara nasional; dan Meningkatnya kemandirian TNI dengan Rakyat guna mendukung tugas pokok TNI AL. Tempat yang dijadikan sebagai tempat pembinaan budi daya kerapu berlokasi di Desa Lohgending, kecamatan Ayah.

Menurut tokoh nelayan bahwa kegiatan budi daya kerapu dapat dirasakan dan sangat bermanfaat bagi nelayan serta meringankan beban masyarakat nelayan.

Dengan demikian hasil Lanal Cilacap dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim di wilayah kerja Lanal Cilacap, menurut pendapat informan mulai kegiatan Bhakti TNI AL, komunikasi sosial dan pembinaan ketahanan wilayah dapat di sintesakan bahwa peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim (Binpotmar) di wilayah kerja Lanal Cilacap membantu pemerintah daerah di bidang pertahanan dan

keamanan serta hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa pesisir maupun masyarakat maritim.

#### **4.2.2 Hambatan Lanal Cilacap dalam pelaksanaan Binpotmar**

Lanal Cilacap sebagai satuan Komando Kewilayahan dalam melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) ke depan diprioritaskan untuk memantapkan ketahanan wilayah, Satuan Komando Kewilayahan harus mampu mewujudkan potensi wilayah menjadi kesiapan wilayah guna menghadapi berbagai ancaman dengan memberdayakan potensi geografi, demografi serta kondisi sosial sehingga tercapai dan terpeliharanya stabilitas kehidupan masyarakat desa pesisir, berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut terkadang tidak memenuhi sasaran yang diinginkan, apabila dicermati dengan seksama dan diuraikan, maka penyebab ketidakberhasilan tersebut dapat dikristalisasi menjadi kendala-kendala yang menghambat pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Adapun hambatan-hambatan dibagi dua, berupa hambatan internal dan hambatan eksternal, antara lain:

##### **a. Hambatan Internal.**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang bagaimana peran Lanal Cilacap dalam melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) dalam menghadapi imigran gelap terdapat hambatan-hambatan internal, seperti: sumber daya manusia dan kemampuan komunikasi terbatas.

##### **1) Sumber Daya Manusia Lanal Cilacap**

Lanal Cilacap dalam melaksanakan Binpotmar merupakan salah satu tugas pokok TNI AL dalam rangka melaksanakan pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial, namun pengisian atau pengawak di Lanal selaku Komando Kewilayahan belum menjadi prioritas. Sampai saat ini pengisian personel untuk mengawaki jabatan yang ada di Komando Kewilayahan masih menggunakan personel dari staf lain (diperbantukan) dan bahkan terkesan

merupakan personel yang tidak memiliki kemampuan (*skill*) dibidangnya. Kondisi ini kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan pembinaan potensi maritim, dimana sesungguhnya tugas dan tanggung jawab personel Komando Kewilayahan sangat kompleks. Tidak jarang personel yang dikirim atau ditempatkan untuk mengisi organisasi di Komando Kewilayahan adalah orang-orang yang sakit atau bermasalah dan tinggal menunggu sampai masa pensiun/purna tugas. Keadaan ini bukannya membantu pelaksanaan tugas Komando Kewilayahan tetapi justru telah membebani Satuan Komando Kewilayahan, apabila melihat tugas kedepan semakin berat dan kompleks permasalahan di wilayah perairan dan pesisir.

## 2) Kemampuan Komunikasi Terbatas

Salah satu tugas utama Satuan Komando Kewilayahan adalah melaksanakan kegiatan kemampuan pembinaan teritorial matra laut dan komunikasi sosial sebagai kegiatan harian. Tugas ini begitu dominan dalam kegiatan pembinaan potensi maritim. Semua kegiatan potensi maritim bermula atau berawal dari kegiatan komunikasi sosial, dapat digambarkan apabila kemampuan ini tidak dimiliki oleh seorang personel yang bertugas di satuan potensi maritim, maka kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Dari informasi yang diberikan oleh Danlanal Cilacap, sebagian besar anggota potensi maritim yang ada saat ini tidak memiliki kemampuan komunikasi sosial.

### b. Hambatan Eksternal

Pada bagian ini akan diuraikan tentang bagaimana peran Lanal Cilacap dalam melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) dalam menghadapi imigran gelap terdapat hambatan-hambatan eksternal, seperti: dukungan dana yang kurang memadai, *existing* Lanal Cilacap dalam Binpotmar, belum adanya peraturan perundangan-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan.

1) Dukungan Dana yang kurang memadai

Apabila kita berbicara pembinaan dalam bentuk kegiatan apapun, maka yang terlintas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dengan interval waktu yang tidak terlalu lama. Demikian juga halnya dengan pembinaan potensi maritim dimana obyek pembinaan adalah geografi, demografi dan kondisi sosial. Dua obyek terakhir adalah merupakan obyek yang sangat dinamis dalam perkembangannya, karena pembinaan terhadap dua obyek ini akan sia-sia apabila dilaksanakan dengan interval waktu yang cukup lama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terbatasnya dana untuk kegiatan pembinaan potensi maritim telah membatasi jangkauan pembinaan terhadap pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial. Dengan interval waktu selama satu tahun kegiatan potensi maritim pada kegiatan Bhakti TNI AL, Komunikasi Sosial dan Katahanan Wilayah dirasa kurang memenuhi sasaran yang ingin dicapai. Apabila dihadapkan pada jumlah desa pesisir yang harus dibina. Demikian juga apabila pada kemungkinan ancaman yang tidak mengenal waktu dan tempat dapat datang kapan saja dan dimana saja.

2) Cakupan wilayah yang luas .

Peran Lanal Cilacap dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim membawahi wilayah kerja Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo masih belum optimal, hal ini mengingat masih ada imigran gelap yang masuk melalui perairan wilayah kerja Lanal Cilacap. Tugas pemberdayaan wilayah pertahanan di laut (Dawihanla) yang di emban oleh TNI AL dalam hal ini Lanal Cilacap seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI memang bukan pekerjaan yang mudah, hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya personel dan sarana prasarana Lanal yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah kerjanya. Namun begitu hal tersebut bukan menjadi alasan bagi Lanal Cilacap untuk tidak berupaya semaksimal mungkin dalam pembinaan potensi maritim (Binpotmar).

3) Belum Adanya Peraturan Perundangan-Undangan.

Penanganan Sumber Daya Buatan (SDB) seperti kapal-kapal negara masih berada kendali Kementerian/Lembaga (K/L) terkait contoh kapal perhubungan dibawah pembinaan Kementerian Perhubungan, kapal KKP di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Industri Jasa Maritim di bawah Kementerian BUMN. Hal ini akibat belum adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penggunaan Sumber Daya Buatan (SDB). Keadaan ini akan merepotkan dalam pembinaan potensi maritim pada saat penggunaan dan mendukung penanganan imigran gelap di wilayah perairan Cilacap karena komponen-komponen tersebut masih tersebar diberbagai instansi yang terpisah satu sama lain. Apalagi pada saat digunakan untuk melaksanakan kegiatan evakuasi imigran gelap masih membutuhkan birokrasi yang panjang.

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Kebijakan ini mendefinisikan penerima bebas visa kunjungan adalah orang asing warga suatu negara, Pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu. Kebijakan tersebut, terdapat 169 negara yang masuk daftar bebas visa kunjungan ke Indonesia.

Sesditjen Imigrasi menjelaskan bahwa kebijakan bebas visa dari satu sisi positif untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, namun dari dampak negatifnya, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa tersebut oleh warga negara asing. Dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan pandangan Sesditjen Imigrasi dengan diberlakukan bebas visa masuk terhadap 169 negara, akan menambah beban terhadap fungsi pengawasan dari pihak imigrasi, artinya lalulintas keluar masuknya orang dari berbagai negara sulit dilakukan pengawasan oleh imigrasi dan

lemahnya koordinasi antara pihak imigrasi dengan instansi terkait. Dengan demikian diperlukan kerjasama sinergis antara kantor Imigrasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan lalulintas orang asing.

#### **4.2.3 Penerapan Lanal Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi Imigran Gelap**

Menurut Kasi Deportasi Dirjen Imigrasi Kemenkum dan Ham mengatakan bahwa imigran gelap yang masuk wilayah Indonesia adalah para pengungsi yang biasanya berasal dari negara-negara yang rawan akan konflik dan minim akan keamanan seperti Pakistan, Myanmar, Afghanistan, Iran, Srilangka, Bangladesh, dan Syiria. Para pengungsi yang mencari suaka tidak dilengkapi dokumen, modusnya sama dengan penyelundupan manusia (imigran ilegal) dan transit di Indonesia tersebut, biasanya disebut sebagai manusia perahu atau "*boat people*". Perahu ini terdiri dari laki-laki dan perempuan bahkan tidak sedikit anak-anak dan balita yang mengarungi lautan menggunakan perahu sewaan dengan peralatan dan bekal seadanya. Maka sering kali perahu yang dinaiki oleh para imigran ilegal ini mengalami kecelakaan di laut akibat diterjang ombak dan banyak dari mereka yang terdampar di perairan Indonesia. Para pengungsi menggunakan jasa nelayan negara sekitar untuk melakukan perjalanan laut menuju Australia menggunakan kapalnelayan digunakan untuk mencari ikan. Hal tersebut karena para pengungsi terdesak akan hempitan keamanan dan keselamatan jiwa jika harus tinggal lebih lama di negara asalnya. Untuk mendapatkan suaka dan perlindungan di Australia, para pengungsi dengan jalur ilegal melakukan perjalanannya menggunakan perahu tradisional secara massal. Tidak sedikit dari kapal mereka tenggelam diterjang ombak di perairan laut Indonesia. Namun tidak sedikit juga dari para imigran ilegal ini yang menjadikan Indonesia sebagai tempat transit sementara sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Australia. Indonesia menjadi tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat peristirahatan sementara bagi para imigran ilegal yang akan melanjutkan perjalanannya ke Australia. Hal tersebut mendapat penguatan dari pernyataan Danlanal Cilacap bahwa

setelah mengalami pemeriksaan sementara di Lanal Cilacap, para imigran gelap sebagian besar dari negara-negara yang sedang mengalami konflik di negaranya.

Menurut Subagyo, A dan Wirasuta, D. S (2013) bahwa ada beberapa alasan yang menjadikan para imigran ilegal ini sering menjadikan Indonesia sebagai lokasi transit sebelum melanjutkan perjalanan menuju Australia. Pertama adalah, adanya kesan dari imigran ilegal adanya kemudahan akses untuk masuk ke Indonesia. Kedua, lokasi strategis Indonesia yang berdekatan dengan Australia. Hal ini memungkinkan bagi para imigran ilegal untuk dapat melakukan perjalanan baik melalui darat maupun udara untuk dapat mencapai negara tujuan yaitu Australia. Ketiga, negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menjadikan para imigran dapat masuk ke Indonesia dari berbagai lokasi. Keempat, minimnya pengawasan dan kontrol serta sarana prasarana pendukung operasional perairan Indonesia juga menjadi penyebab banyaknya imigran ilegal berhasil masuk ke Indonesia. Apabila melihat faktanya, di pantai selatan P. Jawa seperti Cilacap merupakan pantai yang ideal tempat transit bagi imigran gelap dan jalur paling dekat menuju Australia serta memiliki garis pantai yang panjang.

Penanganan imigran gelap yang lebih bagus atau terbaik adalah bagaimana mencegah imigran masuk wilayah Indonesia. Terkait dengan upaya atau tindakan untuk mencegah imigran gelap siapa saja boleh melakukannya. Kalau di wilayah kita jelas ada orang asing tanpa dilengkapi perijinan atau dokumen resmi ini akan mengganggu kenyamanan di lingkungan masyarakat. Sebagai aparat setempat harus tahu gejala itu dan harus bertindak, tidak perlu menunggu petugas yang berwenang. Upaya pencegahan berbagai macam ragam bisa dilaksanakan, seperti yang dikatakan Gatot Nurmantyo, bahwa kita harus baik-baik dengan rakyat, hal ini menginspirasi bahwa kalau kenal baik dengan orang lain maka akan memberikan dampak positif. Dengan kenal dengan masyarakat desa pesisir maka nelayan yang akan melindungi, membantu dan menyiapkan sarana untuk imigran gelap timbul rasa segan untuk berbuat diwilayahnya.

Hal ini juga telah diaplikasikan oleh Lanal Cilacap dengan jajarannya dimana dibuat kebijakan bahwa seluruh wilayah pesisir di sepanjang pantai selatan P.Jawa (Cilacap, Kebumen dan Purworejo) aparat potensi maritim harus di kenal dengan masyarakat desa pesisir dan kalau bisa aparat potmar juga harus mengenal secara baik warga binaannya, paling tidak dikenal orang tetapi siap membantu mengatasi kesulitan masyarakat binaannya. Dengan sikap yang dimiliki aparat potmar tersebut diyakini oleh Danlanal Cilacap warga akan segan untuk berbuat atau membantu orang asing (imigran gelap) dan enggan melakukan kegiatan melawan hukum meskipun belum ada jaminan untuk itu.

a. Pembinaan Desa Pesisir.

Desa pesisir/nelayan identik dengan beragam kekumuhan, kotor dan masyarakat yang tertinggal. Lanal Cilacap dalam melaksanakan pembinaan desa pesisir diawali untuk meningkatkan kesejahteraannya seperti: peningkatan sumber daya manusia (nelayan dan keluarganya), meningkatkan kemampuan pengetahuan teknologi kelautan dan alat penangkapan ikan dan hasil tangkapan ikan serta meningkatkan kemampuan pembuatan produk-produk kelautan. Selanjutnya meningkat pada pembinaan bela negara, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Kegiatan Bela Negara yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan, saat ini program kegiatannya dititipkan di setiap Komando Kewilayahan, telah menjadi kegiatan rutin untuk melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara. Kegiatan sosialisasi ini menyasar seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat desa pesisir di wilayah binaan Lanal Cilacap. Hasil kegiatan dilaporkan secara kontinyu oleh aparat potensi maritim telah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya, seperti apa yang disampaikan oleh Danlanal Cilacap bahwa saat ini Lanal tidak lagi meminta dan mencari-cari tempat untuk sosialisasi tetapi sudah diminta oleh ormas-ormas kemaritiman untuk memberikan pencerahan terkait dengan kegiatan bela negara, penanaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Pembinaan terhadap pemahaman Wawasan Kebangsaan telah menjadi program dan kegiatan rutin dari Lanal Cilacap dan jajarannya. Dalam kegiatan ini lebih pada kegiatan penyuluhan atau kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan pada pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, masyarakat desa pesisir serta pramuka.

b. Pembinaan Pokmaswas Pesisir

Pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas pesisir telah menjadi program dan kegiatan rutin dari Lanal Cilacap dan jajarannya. Seperti yang disampaikan Danlanal Cilacap bahwa dalam kegiatan ini diaplikasikan dengan operasi keamanan laut dan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat desa pesisir (nelayan maupun non nelayan), yaitu: pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan dan informasi pencurian ikan secara ilegal maupun imigran ilegal. Sedangkan kapal-kapal pemerintah/non pemerintah dan kapal-kapal nelayan digunakan sebagai pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan; penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran sumber daya perikanan dan kelautan; dan pengawasan terhadap wilayah perairan atau pesisir yang rawan terhadap pencurian ikan secara ilegal maupun imigran ilegal.

c. Sinergitas dengan stakeholder

Lanal selaku Satuan Komando Kewilayahan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan desa pesisir melalui komunikasi sosial sebagai kegiatan harian. Tugas ini begitu dominan dalam kegiatan pembinaan potensi maritim. Semua kegiatan potensi maritim bermula atau berawal dari kegiatan komunikasi sosial dengan stakeholder terkait selanjutnya diwujudkan sinergitas antara Lanal dengan stakeholder tersebut dalam rangka mendukung kegiatan Binpotmar. Seperti yang disampaikan Danlanal Cilacap bahwa dalam kegiatan kerjasama dengan stakeholder terkait, seperti dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Cilacap telah melaksanakan kerjasama dalam pembinaan desa pesisir di sinergikan dengan kelompok masyarakat pengawasan untuk melaksanakan pengawasan pesisir dan perairan laut Cilacap, dengan Pemerintah daerah Cilacap melaksanakan operasi jaring apung dan sosialisasi keamanan dan keselamatan laut, R.U. IV

P.T.Pertamina melaksanakan kerjasama pembinaan desa pesisir dalam rangka penanaman mangrove di Kampong Laut, Cilacap, P.T. Holcim melaksanakan kerjasama pembinaan desa pesisir dengan bentuk kerajinan hasil laut, PLTU (Karangkandri dan Adipala) melaksanakan kerjasama pembinaan desa pesisir untuk keamanan lingkungan di wilayah pesisir, dan P.T Pelindo Cilacap melaksanakan kerjasama pembinaan desa pesisir dalam bentuk keamanan pelabuhan dan alur laut/pelayaran.

Menurut pendapat manajer RU PT. Pertamina Cilacap bahwa kehadiran Lanal Cilacap dapat bekerjasama baik itu berupa pengaman di wilayah alur pelayaran Cilacap dan dalam bentuk kegiatan Binpotmar melaksanakan kerjasama pembinaan desa pesisir dengan kegiatan penanaman mangrove di desa Klaces.

#### **4.3 Pembahasan**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang bagaimana pelaksanaan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) dilaksanakan oleh Lanal Cilacap terkait peran yang bisa di baktikan kepada masyarakat desa pesisir dan manfaat yang telah dirasakan oleh Pemda terkait dengan pembangunan wilayah pesisir. Demikian juga apabila dihadapkan pada konsep penanganan imigran gelap di implementasikan oleh Dirjen Imigrasi, Kemenkum dan Ham sejauh mana Lanal Cilacap dalam Binpotmar telah berkontribusi dalam mencegah, mengawasi dan mengevakuasi imigran gelap di wilayah kerja Lanal Cilacap. Juga akan disinggung sedikit bagaimana pengawasan orang asing (imigran gelap) yang melalui perairan laut belum melibatkan TNI AL sehingga dalam situasi kedaruratan atau khusus ini perlu dipertimbangkan oleh pimpinan TNI AL untuk melakukan tindakan (diskresi) dalam hal mengatasi percepatan evakuasi atau pertimbangan lainnya terhadap imigran gelap selanjutnya, mengingat TNI AL memiliki kemampuan yang sangat memadai untuk melaksanakan pengawasan dan evakuasi imigran gelap serta kegiatan nyata dalam bentuk program kegiatan rutin berupa pembinaan potensi maritim yang kegiatan sangat banyak beririsan dengan pengawasan dan evakuasi.

#### 4.3.1 Pelaksanaan Lanal dalam Binpotmar

Ditinjau dari konsep Binpotmar bahwa pelaksanaan pembinaan potensi maritim oleh Lanal Cilacap telah dilaksanakan mengikuti siklus sistem perencanaan pengendalian pembinaan potensi maritim, demikian juga dengan perencanaan tiga metode yaitu: Bhakti TNI AL, Komunikasi Sosial, dan pembinaan Ketahanan Wilayah dalam rangka mewujudkan RAK Juang yang tangguh serta terwujudnya kemandirian TNI AL-Rakyat.

Dihadapkan dengan teori peran, Binpotmar dapat diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung apa yang dapat mengefektifkan peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar itu sendiri, sehingga tidak terjadi peran berlebih atau terjadi pertentangan peran atau terjadi ambiguitas peran. Kemampuan untuk memainkan peran dengan tepat tanpa mencampuri ranah tugas institusi lainnya akan memberikan peran yang efektif dan dapat membantu penyelesaian permasalahan dengan efisien. Lanal dalam pembinaan potensi maritim telah mengambil peran berlebih (*overloaded role*) yang dilakukan oleh Lanal dan jajarannya, dalam artian Lanal dan jajarannya secara sadar menjaga situasi agar tetap kondusif diimplementasikan melalui kegiatan Binpotmar secara terus menerus seperti kegiatan Bhakti TNI AL, komunikasi sosial dan pembinaan ketahanan wilayah di wilayah kerja Lanal Cilacap untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan wilayah pertahanan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Cilacap dimana ekspektasi masyarakat pesisir yang begitu tinggi terhadap peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim. Mereka berharap Lanal Cilacap dan jajarannya dalam kegiatan Binpotmar tidak hanya memberikan rasa aman dan mengayomi masyarakat pesisir tetapi diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan di wilayah perairan dan pesisir yang mereka hadapi termasuk antisipasinya dalam meningkatkan kesejahteraan. Terkait dengan peran tersebut Bupati telah merasakan manfaatnya bagi perkembangan wilayah desa pesisirnya. Kegiatan Lanal dalam Binpotmar di wilayah Cilacap telah membantu pemerintah daerah terkait dengan pembangunan dan ketahanan pangan

di wilayah desa pesisir terutama di wilayah yang sebagian 80% dikelilingi perairan. (Zuhdi Susanto, 2016)

Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan para informan bahwa peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim (Binpotmar) di wilayah kerja Lanal Cilacap membantu pemerintah daerah di bidang pertahanan dan keamanan serta hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa pesisir dan masyarakat maritim.

Dihadapkan dengan teori pembinaan, Peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim terhadap masyarakat desa pesisir guna menghadapi imigran gelap dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut rencana pembinaan strategis dan *empowerment*. Dari sudut rencana pembinaan strategis yaitu mengatur strategi, merencanakan, mengorganisasi dan memberi pembenaran sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan *empowerment* atau pemberdayaan dengan melakukan memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri, menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksi bertanggung jawab, mendorong mereka berperan sosial-aktif.

Bahwa konsep Binpotmar tersebut khususnya manajemen Binpotmar tersebut telah mengembangkan rencana pembinaan strategis yang disebut dengan sistem perencanaan pengendalian pembinaan potensi maritim, kegiatan Binpotmar Lanal Cilacap yang dilaksanakan telah menjadi sebuah sistem pembinaan yang mampu mengenali atau menggambarkan keadaan wilayah laut dan pesisir baik dalam bentuk potensi-potensi perairan maupun hal-hal negatif yang ada di wilayah pesisir untuk kemudian di telaah dan dianalisis menjadi kekuatan-kekuatan diwilayah maritim melalui pembinaan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Melalui kegiatan Sisrendal Binpotmar dapat diketahui, dipetakan dan didayagunakan secara pasti wilayah pesisir (perairan) yang memiliki kerawanan tingkat tinggi, sedang dan wilayah perairan (pesisir) yang kondusif untuk kemudian dibuatkan rencana pembinaannya secara berkesinambungan sampai tercapai kondisi kondusif yang diinginkan dapat terwujud dengan baik.

Sisrendal Binpotmar yang dikombinasikan dengan penerapan lima kemampuan teritorial secara intensif dan terus menerus, Lanal Cilacap mampu menguasai wilayah perairan (pesisir) binaannya, beserta SDA/B, Sarpras, demografi dan kondisi sosial dengan baik. Adapun pelaksanaan lima kemampuan teritorial tersebut adalah:

- a. Katanggapsegeraan aparat potmar terhadap perkembangan situasi adalah implementasi nyata dari kemampuan temu cepat dan lapor cepat . Sikap responsif yang telah ditunjukkan aparat potmar untuk memperoleh informasi dan keterangan secara cepat dilakukan melalui kegiatan deteksi dini dengan memantau wilayah pesisir binaannya melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat pesisir sebagai pengawas desa pesisir .

Serta menempatkan informan-informan melalui mitra Babintpotmar di setiap wilayah kelompok desa pesisir/nelayan secara merata maka dapat diperoleh informasi mengenai kejadian-kejadian yang *up to date* melalui hubungan komunikasi serta ditindak lanjuti dengan melaporkan perkembangan situasi dengan cepat kepada atasan secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis untuk di aksi dengan tindakan antisipasi dalam bentuk cegah dini.

- b. Penerapan kemampuan manajemen potensi maritim diwujudkan dalam bentuk mengembangkan program Binpotmar secara sistematis melalui kegiatan perencanaan yang matang dan komprehensif, mengorganisir serta menata kegiatan dan pelaksanaannya serta rigid dan berurutan, mengendalikan semua kegiatan dengan pemantauan secara langsung serta mengawasi kegiatan kegiatan monitoring yang dikemas dalam Sisrendal Binpotmar Lanal Cilacap.

Melalui pelaksanaan Sisrendal Binpotmar dapat menginventarisasi dan memetakan kekurangan dan kelebihan di wilayah perairan maupun desa pesisir dalam binaannya. Selanjutnya seluruh wilayah kerja Lanal Cilacap dibuatkan rencana pembinaan yang proposional berdasarkan kondisi wilayah perairan dan desa pesisir.

- c. Kemampuan penguasaan wilayah perairan dan desa pesisir merupakan usaha aparat potensi maritim untuk mengenali secara mendalam ciri-ciri potensi geografi maritim, SDA/B dan sarpras,

demografi dan kondisi sosial di wilayah pesisir, selanjutnya di inventarisasi dan dipetakan dalam bentuk peta rawan ancaman yang mungkin timbul serta mampu merumuskan dan mengambil langkah untuk pencegahan dan penangkalan dalam rangka menciptakan ketahanan wilayah. Implementasi kemampuan penguasaan wilayah sesungguhnya telah dimulai sejak kegiatan pembuatan petunjuk potensi maritim dalam Sisrendal Binpotmar, yang ditindaklanjuti dengan analisa potensi wilayah perairan dan pesisir untuk mendata secara pasti (*update*) dan selanjutnya melalui analisa potensi pertahanan laut, wilayah perairan dan desa pesisir dikembangkan menjadi kekuatan wilayah untuk mendukung pertahanan negara di laut, sedangkan wilayah perairan dan desa pesisir yang rawan dilakukan pendekatan secara persuasif untuk di bina agar masyarakat desa pesisir mau bekerjasama dalam rangka memajukan desanya.

- d. Kemampuan ketahanan wilayah, perwujudannya bersinergi dengan analisa potensi pertahanan di laut yang dilaksanakan untuk membina dan menumbuhkan semangat cinta tanah air, wawasan kebangsaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka memotivasi dan menumbuhkan militansi masyarakat desa pesisir atau masyarakatmaritim untuk menggelorakan semangat bela negara atau setidak-tidaknya menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap wilayah pesisir secara bersama-sama menjaga dan mengamankan lingkungan desa pesisirnya.
- e. Kemampuan komunikasi sosial, merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh aparat potensi maritim melakukan pendekatan kepada masyarakat desa pesisir atau masyarakatmaritim dengan cara komunikasi dengan masyarakat, aparat pemerintah, serta komponen bangsa lainnya di wilayah pesisir guna terwujudnya saling pengertian dan rasa kebersamaan sehingga terbentuk sikap saling percaya dalam rangka menumbuhkan kohevisitas antara aparat dengan masyarakat maritim serta komponen bangsa lainnya.

Dengan kegiatan yang sistematis dan didukung dengan kegiatan lima kemampuan teritorial, maka sasaran dalam kegiatan pembinaan potensi maritim yang disebutkan dalam Bujuklak Binpotmar berupa

RAK Juang yang tangguh telah diwujudkan Lanal Cilacap melalui penetapan sasaran-sasaran antara lain dalam bentuk kegiatan: membantu pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat; membantu pemerintah dalam ketahanan pangan; membantu pemerintah dalam mengatasi bencana alam dan banjir serta kegiatan antisipasinya; membantu program pemerintah dalam pengetasan kemiskinan; pembinaan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara; pembinaan untuk meningkatkan kesadaran bela negara dan cinta tanah air; pembinaan untuk memantapkan wawasan kebangsaan; penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kelautan, perikanan, kesehatan serta pola hidup sehat; dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila.

Dalam hal perwujudan ruang juang di laut (perairan dan pesisir), posisi dimasa damai memang sulit untuk diwujudkan karena kepentingan pertahanan negara di laut dengan kepentingan kesejahteraan yang lebih diprioritaskan.

Ruang juang laut yang diasumsikan sebagai mandala operasi yang meliputi wilayah perairan laut yang sangat luas memang tidak mungkin dikuasai oleh militer secara terus menerus tanpa dimasuki oleh masyarakat pengguna laut atau menjadi wilayah perairan yang tertutup.

Perwujudan alat dan kondisi juang dilakukan dengan pembinaan dan menyiapkan segenap potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah pesisir agar memiliki ketahanan dan sanggup melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan terhadap segala bentuk ancaman non militer seperti ancaman imigran gelap . Sumber daya alam/buatan dengan berbagai dinamika perkembangannya telah berhasil di galang oleh aparat potensi maritim Lanal Cilacap untuk siap membela negaranya.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan para informan bahwa peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim (Binpotmar) di wilayah kerja Lanal Cilacap membantu pemerintah daerah di bidang pertahanan dan

keamanan serta hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa pesisir dan masyarakat maritim.

Bukti lainnya disampaikan Danposal Lohgending dengan melakukan pendekatan dan komunikasi kepada lapisan masyarakat desa pesisir dan ormas serta aparat pemerintah setempat, “telah berkomitmen dalam mengawasi orang asing atau imigran gelap yang masuk wilayah perairan di Lohgending” pada hari Minggu, tanggal 14 November 2014. Melalui komunikasi sosial yang intens kepada segenap lapisan dengan melakukan seperti tatap muka, anjungsana, olah raga bersama, kegiatan agama maupun kegiatan lainnya yang bersifat sosial masyarakat telah membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga telah terjalin hubungan keakraban dan kepercayaan yang baik kepada aparat potensi maritim. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bupati Cilacap dan tokoh-tokoh masyarakat maritim Cilacap mengungkapkan mereka merasa sangat nyaman dekat dengan Danlanal Cilacap bahkan sudah seperti keluarga sendiri karena saking seringnya mereka bertemu dan bisa berdialog dengan pejabat dimaksud. Bukti lainnya adalah banyaknya ormas, sekolah, dan instansi swasta lainnya melakukan audiensi dengan Danlanal Cilacap, serta meminta pejabat tersebut menjadi pembicara mengenai kemaritiman dan bela negara pada kegiatan-kegiatan khusus di instansi mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya sebuah komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dianggap mampu mencegah terjadinya gejolak-gejolak maupun gesekan-gesekan yang ada di masyarakat desa pesisir.

Sisi pendataan, program kegiatan dalam petunjuk potensi maritim bukan hanya demografi saja yang didata tetapi kondisi wilayah perairan dan pesisir serta kondisi sosial yang sangat dinamis juga didata melalui kegiatan jurnal potensi maritim yang setiap hari dipantau, mencatat, dan mengupdate situasi geografi, demografi dan kondisi sosial.

Sisi pembinaan desa pesisir, melalui pembinaan kelompok masyarakat pengawas desa pesisir (Pokmaswas) aparat Lanal Cilacap melakukan dalam bentuk analisa potensi maritim dan pembinaan

ketahanan wilayah melalui kegiatan penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta pelatihan kegiatan budi daya ikan kepada kelompok masyarakat pengawas desa pesisir. Sisi pengawasan, di lakukan dalam bentuk analisa potensi wilayah program kegiatan dalam bentuk memberikan bimbingan, mengarahkan agar mempermudah menemukan kelemahan dalam pembinaan kelompok masyarakat pengawas desa pesisir (Pokmaswas).

Dihadapkan dengan teori sinergitas, kerjasama antara Pangkalan TNI AL Cilacap dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Binpotmar melalui sinergitas kerja sama kreatif yang saling menghormati untuk menggabungkan kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan. Diimplementasikan dengan penanaman mangrove dan bina usaha perikanan, Lanal Cilacap bekerjasama dengan stakeholder secara rutin membagikan bibit mangrove kepada masyarakat desa pesisir serta membantu menciptakan kegiatan usaha di masyarakat desa pesisir dan hasilnya dipasarkan bekerjasama dengan koperasi Lanal. Kegiatan-kegiatan kerjasama ini dapat menghasilkan sisi yang positif khususnya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa pesisir. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan para informan bahwa peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim (Binpotmar) di wilayah kerja Lanal Cilacap membantu pemerintah daerah di bidang pertahanan dan keamanan serta hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa pesisir dan masyarakat maritim.

#### **4.3.2 Hambatan Lanal dalam pelaksanaan Binpotmar**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Binpotmar telah menjadi fungsi utama TNI AL, namun faktanya dalam program dan kegiatan belum menjadi prioritas. Demikian juga dengan pengisian personel satuan potensi maritim, cenderung di isi dengan prajurit-prajurit yang tidak mampu secara fisik di satuan operasi. Dan lanal Cilacap menjelaskan bahwa prajurit yang menjadi anggotanya rata-rata sudah tua dan banyak dari mereka dalam waktu kurang lima tahun memasuki usia pensiun. Demikian juga dengan kemampuan personel dibidang potensi maritim

khususnya kemampuan untuk berkomunikasi, masih jauh dari harapan. Komunikasi sosial salah satu kegiatan strategis bagi satuan potensi maritim, tanpa komunikasi sosial yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembinaan potensi maritim tidak mencapai target keberhasilan.

Lanal sebagai satuan Komando Kewilayahan dijadikan tempat pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan potensi maritim bagi anggota yang mutasi dari satuan operasi/tempur, namun hasil yang didapat masih kurang maksimal, memang pembinaan potensi maritim tidak cukup hanya di isi dengan pengetahuan potensi maritim melainkan diperlukan mental dan sikap prajurit disetiap penugasan. Membina masyarakat pesisir tidak bisa hanya meminta atau memerintah saja, tetapi perlu adanya sebuah pendekatan dengan menjadi tauladan dan pelopor sebagai salah satu teknik berkomunikasi yang bisa mengajak masyarakat pesisir secara sukarela untuk ikut dalam program sasaran kegiatan Binpotmar. Melalui komunikasi sosial yang baik dan benar maka informasi dan pesan akan sampai pada penerima pesan tanpa salah persepsi. Demikian juga halnya dalam membina masyarakat desa pesisir, terlebih lagi masyarakat yang rata-rata kurang menerima pendidikan formal akan sangat sulit untuk membuka cakrawala berfikir mereka karena pengetahuan yang rendah tanpa memperdulikan orang lain. Melalui komunikasi yang benar akan dapat mengajak mereka untuk mengikuti keinginan pembicara.

Sedangkan pada sisi eksternal hambatannya berupa intensitas atau kuantitas kegiatan masih sangat kurang apabila dihadapkan pada dukungan dana, jumlah personel Lanal, luas wilayah, kebijakan pemerintah serta komunitas masyarakat pesisir/maritim. Disadari sepenuhnya bahwa minimnya dana yang ada menyebabkan kegiatan Binpotmar dalam bentuk program menjadi sangat sedikit jumlahnya. Namun demikian dana yang minim dari Komando Atas telah tertutupi oleh partisipasi oleh stakeholders.

Permasalahan dengan cakupan wilayah yang luas bukan menjadi alasan bagi Lanal Cilacap untuk tidak berupaya semaksimal mungkin dalam pembinaan potensi maritim melalui desa-desa binaan dengan di

bantu tokoh–tokoh nelayan dan masyarakat maritim untuk melakukan pemantauan di wilayah perairan di wilayahnya. Kegiatan atau tindakan tersebut di implementasikan dalam bentuk temu cepat dan lapor cepat, untuk memperoleh keterangan secara cepat (deteksi dini) dan melaporkan dengan cepat untuk ditindak lanjuti dalam bentuk cegah dini. Menurut Danlanal Cilacap menyatakan selama ini kegiatan pembinaan desa pesisir khusus dalam pemantauan di wilayah pesisir, Lanal sangat terbantu adanya laporan dari ketua kelompok desa binaan dan tokoh nelayan di setiap wilayah kerja Lanal Cilacap.

Permasalahan lainnya kebijakan pemerintah dalam penanganan Sumber Daya Buatan (SDB) seperti kapal-kapal negara masih berada kendali Kementerian/Lembaga (K/L) terkait contoh kapal perhubungan dibawah pembinaan Kementerian Perhubungan, kapal KKP di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Industri Jasa Maritim di bawah Kementerian BUMN. Hal ini akibat belum adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penggunaan Sumber Daya Buatan (SDB). Keadaan ini akan merepotkan dalam pembinaan potensi maritim pada saat penggunaan dan mendukung penanganan imigran gelap di wilayah perairan Cilacap karena komponen-komponen tersebut masih tersebar diberbagai instansi yang terpisah satu sama lain. Menurut Danlanal Cilacap menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan evakuasi imigran gelap di perairan Cilacap dapat menggunakan unsur-unsur dari perhubungan laut dan KKP tetapi ini membutuhkan koordinasi dan birokrasi yang panjang. Sedangkan penggunaan Industri Jasa Maritim (Injasmar) seperti docking kapal dibawah Asosiasi Pengusaha Kapal Ikan (APKI) Cilacap dapat mendukung dalam kegiatan Binpotmar. Hal ini diperkuat pernyataan Sampo selaku tokoh masyarakat maritim atau ketua APKI bahwa penggunaan docking kapal maupun kapal-kapal ikan dapat mendukung kegiatan operasional Lanal Cilacap di perairan Cilacap, apalagi untuk kegiatan kemanusiaan.

Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa. Kebijakan bebas visa dari satu sisi positif untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain,

memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, namun dari dampak negatifnya, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa tersebut oleh warga negara asing sedang mengalami konflik di negaranya. Untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan pengawasan bukan tugas dari kantor pelayanan imigrasi tetapi oleh semua komponen bangsa. Untuk itu upaya yang dilakukan melaksanakan kerjasama sinergis antara kantor Imigrasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan lalulintas orang asing. Hal tersebut di kuatkan dari pernyataan Kasi Lalu Lintas Kantor Pelayanan Imigrasi Cilacap bahwa perlunya kerjasama sinergitas dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan lalu lintas orang asing.

Hal lain yang masih ada keraguan melaksanakan tugas dan fungsi Lanal ikut berperan aktif mengawasi perairan laut Jawa bagian selatan dengan melaksanakan operasi keamanan laut terbatas dan pembinaan potensi maritim untuk menangani imigran gelap belum ada kerjasama teknis antara instansi terkait meskipun sudah ada Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Aturan ini hanya mengatur operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat namun belum di atur secara teknis pendanaan selama pertolongan sampai di wilayah pesisir. Kebijakan Dirjen Imigrasi Kemenkum Ham membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dimulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan, namun di wilayah perairan dan pesisir Cilacap belum dibentuknya pengawasan orang asing di laut. Hal ini diperkuat dari pernyataan Danlanal Cilacap bahwa kerjasama pengawasan orang asing di laut dengan instansi terkait belum berjalan. Demikian juga aturan atau kebijakan tersebut apabila para pengungsi atau imigran gelap yang ditolong oleh masyarakat desa pesisir/nelayan belum mengatur secara teknis penggantian selama operasional pelayaran.

### **4.3.3 Lanal dalam Binpotmar guna menghadapi Imigran Gelap**

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Selanjutnya Permenhan nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (PSPN), Ancaman nonmiliter adalah usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter pada hakekatnya merupakan ancaman yang disebabkan oleh faktor nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam pertahanan negara. Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi. Jenis ancaman ini dapat berasal dari luar negeri seperti imigran gelap, termasuk ancaman nyata. Demikian juga menghadapi ancaman non militer termasuk imigran gelap menempatkan K/L (Imigrasi) diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama di dukung Unsur lain kekuatan bangsa termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), TNI (TNI AL).

Dalam wawancara dengan Kasi Deportasi Dirjen Imigrasi mengatakan bahwa para imigran sudah membentuk jaringan dengan melakukan pendekatan lintas negara melalui para nelayan, artinya para imigran sudah melaksanakan pembinaan terhadap para nelayan dengan menyiapkan kapal, perbekalan dan penginapan. Faktor lainnya nelayan membantu imigran, berupa: kemiskinan, kesenjangan, dan pendidikan. Satu hal lagi memanfaatkan wilayah perairan selatan pulau Jawa

mempunyai jalur yang kurang pengawasannya. Hal ini apabila tidak di laksanakan pengawasan akan berimplikasi terhadap pertahanan negara atau stabilitas keamanan di daerah menjadi tertanggung.

Dalam menghadapi imigran gelap bila dihadapkan pada konsep Lanal dalam Binpotmar khususnya manajemen pembinaan potensi maritim yang disebut Sistem Perencanaan Pembinaan Potensi Maritim, yang merupakan sistem pembinaan yang dikembangkan untuk mampu mendata keadaan wilayah perairan/pesisir baik dalam bentuk potensi-potensi SDA/B, sarana prasana maupun hal-hal yang negatif yang ada di wilayah pesisir ini adalah merupakan kegiatan pendataan/identifikasi seperti dalam penggunaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap imigran gelap atau manusia perahu. Hasil yang di dapat melalui pendataan/identifikasi tersebut selanjutnya di telaah atau di analisis melalui kegiatan analisa potensi maritim untuk memetakan secara pasti di wilayah perairan/pesisir yang memiliki kerawanan tingkat tinggi, sedang dan kondusif. Dari hasil pemetaan ini kemudian disusun rencana pembinaannya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perairan/pesisir tersebut secara terus menerus dan berkesinambungan sampai mencapai kondisi kondusif yang di inginkan dapat terwujud dengan baik.

Pembinaan terkait dengan pembinaan desa pesisir selain untuk mensejahterakan masyarakat desa pesisir/ nelayan juga ditekankan pada pembinaan bela negara atau wawasan kebangsaan untuk memberikan kesadaran bahwa bangsa Indonesia telah dikarunia sumber daya kelautan yang melimpah dan garis pantai yang panjang. Untuk dapat memanfaatkan kekayaan dan mengamankan kekayaan tersebut harus saling bersinergi dalam hal pengamanan untuk kesejahteraan bersama. Demikian juga pemahaman pengawasan di wilayah perairan dan pesisir merupakan tanggung jawab semua stakeholders dan komponen bangsa. Dalam hal ini pembinaan ditujukan pada peran aktif masyarakat untuk ikut menjaga wilayah perairan/pesisir tetap damai terlepas pertentangan terkait dengan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk menciptakan rasa aman.

Lanal Cilacap dalam Binpotmar yang dikombinasikan dengan pembinaan dan penerapan lima kemampuan teritorial dalam bentuk: temu

cepat dan lapor cepat, sebagai upaya untuk memperoleh keterangan secara cepat dan *up to date* melalui kegiatan deteksi dini dengan pengawasan di wilayah perairan/pesisir daerah binaannya melalui jaringan-jaringan potensi maritim yang meliputi wilayah binaannya dan melaporkan dengan cepat kepada atasan secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis dan ditindaklanjuti dengan tindakan antisipasi dalam bentuk cegah dini; kemampuan manajemen teritorial, sebagai kegiatan untuk mengembangkan program binpotmar secara sistemik melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, dan pelaksanaan dikendalikan dan diawasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan kegiatan binpotmar terpadu; kemampuan penguasaan wilayah pesisir, upaya berupa kegiatan untuk mengenali secara mendalam ciri-ciri potensi geografi (SDA/B dan sarana prasana), demografi dan kondisi sosial di wilayah pesisir, selanjutnya di data dalam bentuk peta rawan ancaman sehingga dapat di antisipasi serta mampu merumuskan langkah untuk penggunaan, pencegahan dan penangkalannya; Kemampuan ketahanan wilayah, kegiatan untuk membina dan memotivasi untuk menumbuhkan cinta tanah air, wawasan kebangsaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menumbuhkan militansi masyarakat desa pesisir dalam bentuk semangat bela negara atau setidaknya masyarakat pesisir mencintai perairan/pesisir tempat tinggalnya; komunikasi sosial, sebagai sebuah metode pendekatan kepada masyarakat dengan cara melakukan komunikasi dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian, pemahaman, saling percaya dan tercipta kohesivitas antara aparat dengan komponen bangsa lainnya

Dari kegiatan yang dilaksanakan Lanal Cilacap dalam Binpotmar tersebut ditengarai semua kegiatan menghadapi imigran gelap dengan melakukan pemeriksaan/penyelidikan, pengawasan atau evakuasi imigran gelap, hal ini sudah diimplementasikan dalam kegiatan Binpotmar, dengan demikian pemerintah melalui Dirjen Imigrasi, Kemenkum dan HAM cukup melakukan kerjasama dan sinergitas dengan Komando Kewilayahan untuk melaksanakan penangana terhadap imigran gelap dan orang asing di perairan/pesisir. Dalam penanganan imigran gelap/orang asing, Dirjen

Imigrasi Kemenkum dan HAM dapat melibatkan Lanal dalam kegiatan pemeriksaan/penyelidikan awal, pengawasan dan evakuasi imigran gelap/orang asing mengingat para imigran gelap warganegara asing yang tidak diketahui asal usul identitasnya sehingga perlu di curigai akan melaksanakan infiltrasi ke negara Indonesia. Dengan adanya pemeriksaan atau penyelidikan oleh Lanal dengan harapan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam rangka terwujudnya stabilitas pertahanan dan keamanan di daerah.

Dalam konteks teori peranakan dapat memberikan gambaran pada posisi apa Binpotmar dapat di implementasikan dan faktor-faktor pendukung apa yang dapat menefektikan peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar itu sendiri, sehingga tidak terjadi peran berlebih atau terjadi pertentangan peran atau terjadi ambiguitas peran. Kemampuan untuk memainkan peran dengan tepat tanpa mencampuri ranah tugas institusi lainnya akan memberikan peran yang efektif dan dapat membantu penyelesaian permasalahan dengan efisien. Peran Lanal Cilacap Lanal dalam pembinaan potensi maritim telah mengambil peran berlebih (*overloaded role*) yang dilakukan oleh Lanal dan jajarannya, dalam artian Lanal dan jajarannya secara sadar menjaga situasi agar tetap kondusif di implementasikan melalui kegiatan Binpotmar secara terus menerus untuk mengurangi ancaman imigran gelap di wilayah perairan/ pesisir menjadi tempat daerah tujuan atau transit.

Kegiatan Lanal Cilacap dengan melaksanakan pembinaan desa pesisir melalui kegiatan Bhakti TNI AL, komunikasi sosial dan pembinaan ketahanan wilayah serta melaksanakan pembinaan kelompok masyarakat pengawas desa pesisir (Pokmaswas) melalui kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air dalam rangka menghadapi imigran gelap.

Dalam konteks teori peran, Pangkalan TNI AL Cilacap dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim terhadap masyarakat desa pesisir guna menghadapi imigran gelap dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut rencana pembinaan strategis dan *empowerment*. Dari sudut rencana pembinaan strategis yaitu mengatur strategi, merencanakan, mengorganisasi dan memberi pembenaran

sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan *empowerment* atau pemberdayaan dengan melakukan memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri, menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksi bertanggung jawab, mendorong mereka berperan sosial-aktif. Lanal telah melakukan kegiatan dengan pembinaan desa pesisir melalui penanaman sikap bela negara dalam wadah NKRI yang selalu digelorkan dikalangan masyarakat desa pesisir, meskipun masih ada oknum yang mengambil keuntungan dari situasi di wilayah tersebut.

Lanal dalam Binpotmar juga mengambil bagian membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan seperti kegiatan penanaman mangrove, vegetasi terumbu karang, pembangunan infrastruktur maupun pembinaan budidaya ikan dalam rangka meningkatkan hasil perikanan. Itulah sebagian dari berbagai kegiatan dan langkah yang sudah dilaksanakan dalam bentuk peran yang telah dilaksanakan sebagai bentuk peran yang telah di ambil secara tidak langsung dan hasilnya telah membantu pemerintah dalam rangka penanganan terhadap imigran gelap.

Dalam konteks pengawasan, Peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar membantu pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kegiatan warganegara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin, sehingga untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap agar target pembinaan potensi maritim tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

Lanal Cilacap dalam pembinaan masyarakat desa pesisir melalui kelompok pengawas masyarakat pesisir yang dilaksanakan dengan pengawasan lapangan disamping melaksanakan operasi keamanan laut

terbatas di perairan laut Cilacap juga melakukan pencarian (evakuasi) serta untuk menjaga wilayah perairan/pesisir tetap kondusif.

Lanal telah melakukan kegiatan pengawasan lapangan, dengan melakukan pemeriksaan/penyelidikan awal, pengumpulan data, mencari posisi orang/manusia perahu (imigran gelap), dan terakhir melakukan evakuasi kemanusiaan serta menyerahkan para imigran kepada instansi terkait. Dalam melaksanakan pemeriksaan/penyelidikan dengan melakukan pendataan asal-asul identitas (asal negara, pekerjaan dan pendidikan). Hal ini untuk mengetahui apakah kedatangan mereka benar-benar mencari kehidupan yang lebih baik atau ingin menyelidiki wilayah dan pertahanan negara Indonesia.

Dalam konteks sinergitas, kerjasama antara Pangkalan TNI AL Cilacap dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Binpotmarmelalui sinergitas kerja sama kreatif yang saling menghormati untuk menggabungkan kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan. Kerjasama yang terjalin diharapkan akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari masing-masing pihak, sehingga memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi imigran gelap di wilayah Cilacap.

Lanal Cilacap dalam Binpotmar melaksanakan kegiatan kerjasama, yang melalui *respectfull* dan *sinergistic*, pertama, kerjasama dengan pemerintah daerah Cilacap, artinya Lanal beserta jajarannya sadar bahwa keberadaan Lanal berada wilayah otonomi Kabupaten Cilacap dalam rangka terwujudnya kegiatan pembinaan desa pesisir sehingga di perlukan sikap saling percaya, komunikasi yang intens dan saling menghargai serta dukungan pemerintah daerah dan perangkatnya.

Selanjutnya kedua, kerjasama Lanal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian/Lembaga (K/L) yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap, diwujudkan dengan melaksanakan kerjasama dengan R.U. IV P.T. Pertamina Cilacap melaksanakan kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan infrastruktur; P.T. Holcim melaksanakan kegiatan penanaman mangrove dan budi daya perikanan serta pembangunan infrastruktur; PLTU (Karangkandri dan Adipala) melaksanakan pembinaan masyarakat desa pesisir Karangkandri dan

Adipala; KKP kerjasama dengan pembinaan pengawasan masyarakat pesisir dan budidaya perikanan; PT Pelindo Cilacap melaksanakan pembinaan desa pesisir dan sosialisasi alur pelayaran Cilacap.

Kegiatan-kegiatan Lanal dalam pembinaan potensi maritim guna menghadapi imigran gelap sangat membantu pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan para informan bahwa peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim (Binpotmar) di wilayah kerja Lanal Cilacap membantu pemerintah daerah di bidang pertahanan dan keamanan serta hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa pesisir dan masyarakat maritim.

Dalam konsep pemberdayaan wilayah pertahanan di laut dan pembinaan potensi maritim, Lanal Cilacap dalam melaksanakan Binpotmar guna menghadapi imigran gelap dengan kegiatan mengidentifikasi dan mendata potensi wilayah diberdayakan untuk kepentingan pertahanan yang dijabarkan dalam tujuh pilar Dawilhanla, meliputi :

- a. Menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pembentukan kelompok masyarakat pengawas desa pesisir di wilayah Cilacap. Potensi-potensi SDM ini yang dapat ditransformasikan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung yang siap digunakan dalam pertahanan negara.
- b. Mengelola sumber daya alam yang memiliki nilai strategis yaitu perairan laut Cilacap yang menghasilkan perikanan yang melimpah dan merupakan alur pelayaran kapal-kapal masuk Cilacap. Potensi SDA ini bisa digunakan menjadi komponen cadangan dan pendukung sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- c. Menyiapkan sumber daya alam buatan yang telah dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta (dermaga dan injasmar) di Cilacap ditingkatkan dan di daya gunakan agar memiliki nilai strategis. Potensi SDA buatan ini digunakan menjadi komponen cadangan dan pendukung serta digunakan membantu Lanal Cilacap.
- d. Sarana Prasarana yang ada di wilayah Cilacap baik itu milik Lanal maupun pemerintah daerah dan swasta (kapal-kapal) yang telah di

siapkan oleh pemilik/penggunanya. Potensi sarpras ini bisa digunakan oleh Lanal Cilacap untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di wilayah Cilacap.

- e. Melestarikan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat desa pesisir seperti nilai-nilai budaya bahari di laksanakan oleh Lanal Cilacap melalui pembinaan desa pesisir dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan desa pesisir (Pokmaswas) untuk meningkatkan semangat juang dan bela negara segenap komponen bangsa dalam rangka pertahanan negara.
- f. Pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Cilacap, Lanal bersama-sama instansi terkait melaksanakan pembinaan terhadap kapal-kapal yang mempunyai fasilitas radar untuk diberdayakan untuk kepentingan pertahanan seperti radar kapal-kapal swasta bisa digunakan Lanal untuk membantu terhadap monitoring wilayah perairan di sekitar Cilacap dan melaporkan kejadian-kejadian dilaut, contoh monitoring keberadaan imigran gelap.
- g. Dana. Peran Lanal dalam pembinaan potensi maritim mendapat dukungan dan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Minimnya dana yang ada menyebabkan kegiatan Binpotmar dalam bentuk program menjadi sangat sedikit jumlahnya. Namun demikian dana yang minim dari Komando Atas bukan menjadi alasan dalam melaksanakan kegiatan Binpotmar tetapi dengan kemampuan berkomunikasi aparat potmar dapat tertutupi oleh partisipasi oleh stakeholders.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis terhadap fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian serta di hadapkan pada teori-teori yang dijadikan dasar pemikiran dalam tulisan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Lanal Cilacap dalam Pembinaan Potensi Maritim sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa pesisir dan di susun manajemen potensi maritim dengan Sisrendal Binpotmar yang di dukung dengan implementasi lima kemampuan teritorial telah mampu mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu: terbentuknya Ruang, Alat dan Kondisi Juang serta terciptanya kemanunggalan TNI AL – Rakyat di seluruh wilayah kerja Lanal Cilacap dalam rangka mendukung tugas pokok Lanal Cilacap guna menghadapi ancaman non militer termasuk penanganan imigran gelap.
- b. Pelaksanaan Lanal Cilacap dalam Binpotmar beberapa diantaranya masih minimnya program kegiatan akibat alokasi dana yang kurang memadai berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan pembinaan potensi maritim namun dengan dukungan stakeholders (Pemda, BUMN, Lembaga Pemerintah) dapat meningkatkan intensitas kegiatan serta interaksi antara aparat potmar dengan masyarakat desa pesisir/nelayan.
- c. Peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan evakuasi tetapi juga mempunyai peran seperti: pembinaan masyarakat desa pesisir dan pembinaan bela negara. Hal ini menunjukkan Lanal dalam Binpotmar berperan sangat efektif dalam rangka menghadapi imigran gelap dalam bentuk kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pengawas desa pesisir melalui berbagai kegiatan program yang telah dijalankan selama ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka untuk lebih meningkatkan hasil dari pelaksanaan Lanal dalam Binpotmar agar dapat memaksimalkan peran guna menghadapi imigran gelap, disarankan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas dan kualitas Lanal dalam kegiatan pembinaan potensi maritim guna menciptakan wilayah perairan laut dan pesisir yang aman dan memiliki daya tangkal yang baik, perlunya Komando Atas untuk meningkatkan alokasi dana pembinaan potensi maritim baik untuk pengadaan sarana pendukung maupun peningkatan jumlah program kegiatan, serta menjadikan Binpotmar sebagai program poros maritim dunia.
- b. Mabes TNI AL perlu melakukan evaluasi secara intensif mengenai penempatan personel di Pangkalan-Pangkalan TNI AL dan diganti dengan personel yang masih lama usia pakainya serta dibekali dengan pengetahuan atau penataran ilmu berkomunikasi agar pelaksanaan pembinaan potensi maritim dapat optimal dan berdayaguna.
- c. Mabes TNI AL perlu melakukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Dirjen Imigrasi, Kemenkum dan HAM dalam rangka kerjasama pengawasan manusia perahu atau imigran gelap di kawasan perairan atau pesisir, mengingat kegiatan Lanal dalam Binpotmar dalam manajemen potensi maritim untuk membantu pengawasan maupun melaksanakan evakuasi serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah perairan dan pesisir dan telah menyatu dengan dinamika masyarakat desa pesisir .

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Ahmadi, R. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz, Media, Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, M. B, 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Berg, B.L., Allyn and Bacon. 2001. *Qualitative research methods for the social sciences* (Edisi ke-4). Boston.
- Cribb, R and Michael, F. 2009. *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*. ISEAS, Singapore.
- Creswell, J. W. 2016. *Research Designing, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dessler, G. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 10 jilid 2, PT. Indeks, Jakarta.
- Dwiyanto, D. 2002. Metode Kualitatif. Penerapan Dalam Penelitian. PT. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Esterberg, K. G, 2002. *Qualitative Methods In Social Research*, Mc Graw Hill, New York.
- Griffin, R. W. 2004. Manajemen; Edisi ketujuh jilid 2. Erlangga Jakarta.
- Hanson, G. H. 2007. *The Economic Logic of Illegal Immigration*. Council on Foreign Relations Press, USA.
- Harahap, S. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen, Penerbit Quantum, Jakarta.
- Hastono, S.P. 2001 Analisis Data, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ivancevich, J. M, dkk. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2, PT. Erlangga, Jakarta.

- James, P. S 2007. *Metode Etnografi*. Edisi II Tiara Wacana Yogyakarta.
- Kasiram, H. M. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif –Kuantitatif*, UIN Malang Press, Malang.
- Kreitner, R dan Angelo, K. 2014. *Perilaku Organisasi* . Salemba Empat Jakarta.
- Lofland, J and Lyn,H.L. 1984. *Analyzing Social Settings*. Wadsworth Publishing Company. California.
- Maringan, M. S. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marsetio. 2014. *Sea Power*.Universitas Pertahanan Indonesia. Jakarta.
- Nazir,M. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,PT. Remaja Rosda Karya,Bandung.
- Mathis, R. L. dan Jackson, J.H. 2006.*Human Resource Management* , alih bahasa. Salemba Empat. Jakarta.
- Miles, M. B dan Michael A.H. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Buku sumber tentang metode-metode baru. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Nasution, A. 1998. *Metode Natutalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Octavian, A & Bayu, A.Y. 2014. *Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim*. Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Mdan Effendi, S, 1989. *Metode Kualitatif Survai*, LP3S, Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta. Bandung.
- Soetriono dan Hanafie, S.R. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. PT. Andi Offset, Yogyakarta.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Perkasa, Jakarta.
- Sanapiah, F. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi* , YA 3, Malang.
- Sujarweni, W, V. 2014. *Metodologi Penelitian*. PT. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

- Suryabrata, S. 2008. Metodologi Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Strauss, A.L. 1987. *Qualitative Analysis for Social Scientist*, Cambridge University Press. London.
- Siagian, S. P. 2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima), Rineka Cipta, Jakarta.
- Silalahi, U. 2005. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Sihombing, S. 2013. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia Nuansa Aulia. Bandung.
- Stonner, J. A.F. 1996. Manajemen. Edisi II. Prenhalindo ; Jakarta.
- Schein, E. H, 2004, *Organizational Culture and Leadership*, Third Edition, Jossey –Bass Publishers, San Francisco.
- Tisnawati, Edan Saefullah, K. 2005. Pengantar Manajemen, Murai Kencana, Jakarta.
- Tangdilintin, P. 2008. Pembinaan Generasi Muda. Kanisius. Yogyakarta.
- Uwe. F. 1995. *An Introduction to Qualitative Research*, Sage Publications, International Educational and Professional Publisher, London.
- Winardi. 2000. Manajer dan Manajemen. Citra Aditya Bakti. Bandung.

#### **Jurnal:**

- Abu G. Penyelundupan Imigran Oleh Warga Negara Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Palermo Tahun 2000. Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2014, Jakarta.
- Heckmann, F, *Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany*. *International Migration Review*, Vol. 38, No. 3, *Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration* (Fall, 2004), Hal.1103-1125.
- Manik, J.I, Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Melalui Pelaksanaan Bela Negara masyarakat pesisir (Studi di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang), Universitas Pertahanan Tahun 2012, Jakarta.

Satria G. Upaya Penanganan Imigran Ilegal Di Indonesia. Universitas Jember Tahun 2009, Jakarta.

Subagyo, A& Wirasuta D. S, Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia, Jurnal Pertahanan Desember 2013, Volume 3

Rudiawan, B Jakarta. Implementasi Kemitraan Dispotmar Armatim dengan Dispotmar Lantamal V Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan di Surabaya, Universitas Pertahanan Tahun 2012, Jakarta.

Vera P. N. Upaya International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia. Universitas Indonesia Tahun 2007, Jakarta.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 20011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Nomor: 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Negara 2015, Jakarta.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Nomor: 24 Tahun 2015, Tanggal 27 November 2015 tentang Buku Strategi Pertahanan Negara 2105, Jakarta.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Nomor: 37 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Buku Postur Pertahanan Negara 2015, Jakarta.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, Tanggal 27 November 2015 tentang Buku Doktrin Pertahanan Negara 2015, Jakarta.

Permenhan nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (PSPN),

Mabesal. 2002. Eka Sasana Jaya, Jakarta.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Kep/842/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Paradigma Baru TNI Angkatan Laut Kelas Dunia

Peraturan Kasal Nomor: Perkasal/39/IX/2011 tentang Buku Induk Dawinhanla

Peraturan Kasal Nomor : Perkasal/214/ V/2015 tentang Buku petunjuk Binpotmar

Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor: Perektor/22/XII/2014 tentang Penulisan Karya Akhir Studi Universitas Pertahanan.



**PANDUAN WAWANCARA**  
**“PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT CILACAP DALAM**  
**PEMBINAAN POTENSI MARITIM GUNA MENGHADAPI IMIGRAN**  
**GELAP”**

Narasumber :

Tempat :

Tanggal/Waktu :

Pewa memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewa memohon izin untuk merekam percakapan, jika tidak berkeberatan, dan hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Pewa membuka sesi wawancara dengan menyampaikan isu peran Pangkalan TNI AL dalam pembinaan potensi maritim (Binpotmar)

**SESI I. ASPOTMAR KASAL**

No	Pertanyaan kunci	Jawaban
1	Bagaimana kebijakan Binpotmar ?	
2	Apa dasar hukum melaksanakan Binpotmar ?	
3	Bagaimana hasil Binpotmar?	
4	Faktor-faktor apa saja personel Lanal dalam melaksanakan Binpotmar ?	
5	Bagaimana kerjasama TNI AL dengan Institusi lain ?	

**SESI II. KADISPOTMAR**

No	Pertanyaan kunci	Jawaban
1	Bagaimana melaksanakan kebijakan Binpotmar ?	
2	Bagaimana pelaksanaan program Binpotmar saat ini dan kedepan ?	
3	Bagaimana strategi merencanakan Binpotmar ?	
4	Bagaimana Lanal dalam melaksanakan Binpotmar?	
5	Bagaimana meningkatkan kemampuan personel Lanal dalam Binpotmar?	

**SESI III. DANLANAL CILACAP**

No	Pertanyaan kunci	Jawaban
1	Bagaimana sejarah Lanal Clp ?	
2	Bagaimana Lanal Clp dalam melaksanakan Binpotmar saat ini dan kedepan ?	
3	Bagaimana strategi Lanal Clp dalam pembinaan desa pesisir?	

4	Bagaimana Lanal Clp dalam pengawasan terhadap wilayah perairan dan pesisir ?	
5	Bagaimana mensinergikan dengan stakeholders di wilayah Cilacap ?	
6	Faktor-faktor apa saja personel Lanal Clp dalam melaksanakan Binpotmar ?	

#### **SESI IV. IMIGRASI**

No	Pertanyaan kunci	Jawaban
1	Bagaimana kebijakan Imigran Gelap ?	
2	Bagaimana strategi dalam menangani Imigran gelap ?	
3	Bagaimana strategi pengawasan imigran gelap?	
4	Bagaimana kerjasama dengan stakeholders dalam pengawasan?	

Dalam sesi penutup, pewa menyampaikan terima kasih kepada diwa; diakhiri dengan pemotretan untuk dokumentasi.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 1537 NII/2017  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 19 Juni 2017

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam  
lampiran

di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
  - b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 8 Universitas Pertahanan TA. 2016/2017 atas nama Hari Mulyadi NIM 120160101012 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap Dalam Pembinaan Potensi Maritim Guna Menghadapi Imigran Gelap".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : harimulyadi1515@gmail.com dan HP 08121881811.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

Rektor  
Universitas Pertahanan,

Dr. I Wayan Midhio, M.Phil  
Letnan Jenderal TNI

Tembusan:

1. Warek I Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

## Lampiran 3. Transkrip Jawaban

**TRANSKRIP JAWABAN**

Mayjen TNI Mar Tommy Basari Natanegara, Aspotmar Kasal  
Ruang Aspotmar Mabasal, Jakarta, 13 Juli 2017

Pertanyaan

Bagaimana kebijakan Binpotmar ?

Jawaban

Berbicara Pembinaan Potensi Maritim di Indonesia ini sangat kompleksitas....dengan melihat kondisi saat ini....kita membutuhkan pendekatan yang spesifik yaitu melalui pendekatan seperti....'geostrategi', untuk atau .. agar diperoleh: untuk menghasilkan ...pembinaan wilayah ini ...untuk dapat menciptakan ketahanan nasional yang mantap....atau semaksimal mungkin dan seefektif mungkin.. seperti di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama .....sampai dengan yang keberlanjutan dalam pembangunan nasional; agar adanya peningkatan kesejahteraan dan keamanan bangsa; .....Pembinaan potensi maritim tidak terlapas atau....yang menitikberatkan pada bagaimana penyusunan terhadap potensi pertahanan negara di laut.

Pertanyaan

Apa dasar hukum TNI AL dalam melaksanakan Binpotmar ?

Jawaban

Dasar hukum TNI AL dalam melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) ini tetap mengacu atau dilandasi dengan dasar hukum, seperti....mungkin kamu mengetahui juga.....kalau kamu baca ... Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, dan kalau kamu perlu baca .....aturan lain yang mendukung kegiatan Binpotmar seperti Doktrin TNI AL, Buku Induk pemberdayaan wilayah pertahanan di laut, atau .....buku-buku lainnya yang mendukung penulisan anda.....

Pertanyaan

Bagaimana hasil dari Binpotmar ?

Jawaban

TNI AL dalam melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar), banyak sekali kegiatan yang kita lakukan selama ini .....seperti anda ketahui.....contoh Bhakti TNI AL, komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, Surya Bhaskara Jaya (SBJ), Bedah Desa Pesisir (Bedesir), pembinaan desa pesisir, Serbuan Maritim, Pelantara dan Kapal Pemuda Nusantara/Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (KPN/LNRB), vegetasi terumbu karang, penanaman mangrove, pembinaan pramuka saka bahari, dan pembinaan komunitas maritim...dan lain lainnya... Hasil kegiatan ini ....dari pembinaan potensi maritim,....kadang pelaksanaanya dari Binpotmar tersebut terkadang.....tidak memenuhi sasaran yang diinginkan.....pernah yang kita kerjakan ...di Lanal mana...seperti Lanal Banten.....kalau kita ...apabila dicermati saat kita melaksanakan peninjauan ke Lanal-Lanal....dan kita perhatikan seksama dari lapangan, akan kelihatan ...hal hal yang menjadi kendala-kendala yang menghambat pencapaian sasaran yang telah ditentukan dari kegiatan Binpotmar.

Pertanyaan

Apa saja faktor-faktor dalam melaksanakan Binpotmar ?

Jawaban

Yaa....dimana-mana setiap melaksanakan kegiatan ...pasti ada saja faktor-faktor... yang baik itu ...seperti hambatan-hambatan internal maupun eksternal dalam giat Binpotmar....Kalau saya perhatikan pertama....dari personel maupun kadang seperti....masalah perundang-undangan yang menyangkut dengan pembinaan potensi maritim, ...ini kan belum ada yang benar-benar mendukung atau aspek legal katakanlah ...kemudian dari sisi perilaku juga masyarakatnya ..kita tahu semua lah bahwa desa pesisir..tapi bagaiman sikap yang ingin diharapkan dari masyarakat desa pesisir setelah adanya pembinaan potensi maritim

dalam mendukung pertahanan negara di laut....ini masih yaa..belum kelihatan hasilnya....

Pertanyaan

Bagaimana kerjasama TNI AL dengan Institusi lain ?

Jawaban

Selama ini TNI AL sudah melaksanakan kerjasama dengan institusi lain...kita sudah semua ..sudah di kerjakan ....Bapak Kasal melaksanakan atau penandatanganan MOU dengan ..... contohnya...seperti dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu: vegetasi terumbu karang..... penanaman mangrove..... dan Kemensos yaitu: pembangunan rumah tidak layak huni dan lain-lainnya, ...dan baru-baru ini dengan Sido Muncul, untuk melaksanakan ...operasi katarak, tau dengan Pertamina.....tentunya tidak terlepas dengan pembinaan desa pesisir.....

**TRANSKRIP JAWABAN**

Brigjen TNI MAR I Ktut Suwarya, Kadipotmar Mabesal,  
Ruang Kadispotmar Mabesal, Jakarta, 14 Juli 2017

Pertanyaan

Bagaimana melaksanakan kebijakan Binpotmar ?

Jawaban

Begini yaa...bahwa Dispotmar ini sebagai badan pelaksana pusat Mabesal....jadi setiap kegiatan ...merupakan kebijakan dari atas ...setiap melaksanakan kebijakan Binpotmar....jadi Binpotmar merupakan tugas TNI AL sesuai dengan amanah perundang-undangan sesuai UU TNI..., jadi melaksanakan Binpotmar harus di mulai dengan pemberdayaan aparat potensi maritim dahulu... dan harus dilakukan secara terus menerus dalam mendukung tugas pokok TNI AL.....apabila kita situasi sekarang ini ....atau melihat dengan kondisi yang cepat .... telah berubah bukan berarti masalah pemberdayaan aparat potensi maritim luput dari pandangan saya ..selaku Kadispotmar...tapi ini akan menjadi perhatian

kita bersama seluruh jajaran potmar....dan justru pada saat kondisi sekarang di saat ini kadang kita disuruh untuk kemajuan berpikir....dan kalau kita lihat... kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi jadi kita dituntut untuk berkeaktifitas.....mencari inovasi baru...apalagi dalam melakukan pemberdayaan aparat potensi maritim kita diharapkan untuk saling berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal, jadi TNI AL tidak boleh tinggal diam dengan perkembangan kondisi..... tapi bagaimana kita justru...harusberperan aktif dalam membangun suasana kondusif di tengah masyarakat desa pesisir/nelayan....yaa kita tahu kondisi masyarakat nelayan kita.....

Dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim ...ini yang memang baru di TNI AL ....saya perintahkan paara Danlanal untuk memahami dalam menyusun kegiatan manajemen Binpotmar.....ini tujuan agar jelas ...jadi agar kegiatan Binpotmar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Manajemen Binpotmar ini.....mempunyai format sudah baku ....yang kita kenal dengan sistem perencanaan pengendalian .....dengan tujuan agar diperoleh suatu pola pikir yang konsepsional terprogram...seperti membuat program Binpotmar secara terpadu dan digunakan sebagai acuan yang dapat disarankan kepada Pemerintah Daerah setempat dalam rangka terwujudnya sinergitas..... Kegiatan sistem perencanaan dan pengendalian (Sisrendal) pembinaan potensi maritim diawali...yang pertama kita susun... membuat produk petunjuk potensi maritim (Jukpotmar).....kemudian produk kedua dalam Sisrendal pembinaan potensi maritim adalah analisa potensi maritim (Anpotmar) .....merupakan analisa terhadap potensi wilayah yang dicatat dengan mendetail dalam jukpotmar yang dapat ditingkatkan menjadi kemampuan wilayah maritim serta untuk kepentingan pertahanan Negara di laut.....Selanjutnya...produk ketiga Analisa Potensi Pertahanan di laut yang merupakan kegiatan penganalisaan terhadap kemungkinan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan wilayah menjadi kekuatan kewilayahan bagi kepentingan pertahanan di laut ....yang terakhir produk keempat adalah rencana pembinaan potensi maritim yang merupakan

rumusan pokok-pokok pembinaan potensi maritim yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu kedepan.

### Pertanyaan

Bagaimana meningkatkan kemampuan personel Lanal dalam Binpotmar?

### Jawaban

Jadi kalau kita lihat dalam .....pintu masuk kantor sudah saya tempel setiap ruangan–ruangan para perwira....untuk meningkatkan kemampuan personel TNI AL dalam Binpotmar bahwa perlu kita melakukan pembinaan terus menerus,.....jadi kita sekarang sesuai perintah Panglima TNI ..anggota potmar sudah melaksanakan .....giat seperti melaksanakan kursus atau penataran – penataran di Mabes TNI maupun Mabes TNI AD .....belajar memahami lima kemampuan territorial. Untuk meningkatkan lima kemampuan teritorial yang merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh aparat potensi maritim terdiri dari.....anda bisa baca sendiri atau nanti dicatat saja.....

- a. Temu cepat dan lapor cepat, kegiatan atau tindakan untuk memperoleh keterangan secara cepat (deteksi dini) dan melaporkan dengan cepat untuk ditindak lanjuti dalam bentuk cegah dini.
- b. Kemampuan manajemen potensi maritim, kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasir, mengendalikan serta mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan proses Sisrendal Binpotmar.
- c. Kemampuan penguasaan wilayah, kegiatan dan tindakan untuk mengenal secara mendalam ciri-ciri potensi geografi maritim, demografi dan kondisi sosial serta sarana dan prasarana di wilayah.
- d. Kemampuan ketahanan wlayah, kegiatan untuk menciptakan sikap mental dan motivasi juang masyarakat peisisir untuk menumbuhkan ketahanan pada rakyat dalam rangka mempertahankan wilayahnya.
- e. Kemampuan komunikasi sosial, tindakan yang dilakukan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah serta komponen bangsa lainnya di wilayah guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan.

Pertanyaan

Bagaimana pelaksanaan program Binpotmar saat ini dan kedepan ?

Jawaban

Menurut saya....program Binpotmar saat ini, di samping mendata dan menginventarisir desa pesisir, SDA/SDB maupun sarana dan prasaranannya maritim, mendata masyarakat maritim dan program yang oleh Dispotmar Mabesal merupakan kebijakan Kasal cq Aspotmar, .....dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar), Lanal-Lanal melaksanakan seperti Bhakti TNI AL, komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, Surya Bhaskara Jaya (SBJ), Bedah Desa Pesisir (Bedesir), pembinaan desa pesisir, Serbuan Maritim, merekrut dan seleksi peserta Pelantara dan Kapal Pemuda Nusantara/Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (KPN/LNRB), kemudian Lanal-Lanal meskipun tidak mempunyai dana atau anggaran....mungkin Danlanal pandai melakukan pendekatan ...atau komunikasi yang baik .....dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait dapat menyelenggarakan giat.... lomba olahraga perairan, menyelenggarakan pembinaan pramuka saka bahari melalui: perkemahan pramuka saka bahari, menyelenggarakan vegetasi terumbu karang, menyelenggarakan penanaman mangrove, , dan pembinaan komunitas maritim.....itu yang saya lihat saat ini apabila saya melakukan kunjungan ke daerah-daerah...

**TRANSKRIP JAWABAN**

Kolonel Laut (P) Agus Prabowo, Danlanal Cilacap  
Ruang Komandan Lanal CLP, Cilacap, 28 Juli 2017

Pertanyaan

Bagaimana sejarah Lanal Clp ?

Jawaban

Kami menceritakan dahulu....bahwa Pangkalan TNI AL Cilacap atau Lanal Cilacap merupakan salah satu pangkalan yang berada dibawah

komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) yang berkedudukan di Cilacap. Posisi Lanal Cilacap berada di pantai Pulau Jawa bagian selatan...ini Lanal satu-satunya di pantai P.Jawa.....kalau saya membaca sejarah Pangkalan Angkatan Laut ini ....dibentuk pada tanggal 1 Januari 1946 oleh laskar-laskar pejuang dengan setelah...terbentuknya TKR (Tentara Keamanan Rakyat Laut) dipimpin oleh Kolonel Laut Kajat Asmadi untuk menghadapi Belanda yang akan melaksanakan operasi amfibi di pantai selatan Cilacap (Teluk Penyus) dan merebut pelabuhan Cilacap. ...mungkin banyak sejarah yang hilang... seperti setelah itu..Lanal Cilacap ..apakah ini komandan Lanal sampai berlanjut tidak ada pergantian komandan pada saat itu...karena sampai sekarang dokumen tersebut belum ketemu...kemudian langsung dilanjutkan pada tahun 1962...namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut (Men/Pangal) No. 3501.7 tanggal 15 September 1962 disebutkan bahwa menyebutkan Pangkalan Angkatan Laut Cilacap dibawah Komando Armada (Koarma).....

#### Pertanyaan

Bagaimana Lanal Clp dalam melaksanakan Binpotmar saat ini dan kedepan ?

#### Jawaban

Saya...sesuai program Lanal Clp dalam melaksanakan kegiatan Binpotmar....kondisi saat ini.... Lanal Cilacap saat ini, dalam melaksanakan Binpotmadi samping mendata dan menginventarisir desa pesisir, SDA/SDB maupun sarana dan prasanannya maritim....juga mendata masyarakat maritim kemudian untuk dilaporkan ke Komando Atas.....dan ada program kegiatan dari oleh Mabesal dalam hal ini .....melaksanakan kegiatan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar), seperti kegiatan Bhakti TNI AL.... komunikasi sosial..... pembinaan ketahanan wilayah.....seperti giat melaksanakan Surya Bhaskara Jaya (SBJ) mini di wilayah Cilacap sekitarnya....selalu kita kerjakan walaupun dengan dana yang kurang....giat Bedah Desa Pesisir (Bedesir) di wilayah

desa pesisir Cilacap kita kordinasi dengan Pemda...dan instansi terkait tetap berjalan...sampai dengan giat-giat yang lainnya.....pembinaan desa pesisir, Serbuan Maritim....Lanal juga mengirim peserta Pelantara dan mengirim juga personel dari para mahasiswa asal Cilacap kita daftarkan ...untuk giat sepertiKapal Pemuda Nusantara/Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (KPN/LNRB),....dalam menyelenggarakan lomba olahraga perairan kita berkoordinasi dengan Pemda dan instansi terkait untuk...seperti menyelenggarakan pembinaan pramuka saka bahari kwartir Cilacap kita koordiansi dengan Kwartir Kab.Cilacap..untuk melaksanakan perkemahan pramuka saka bahari pada saat liburan sekolah, kemudian...untuk menyelenggarakan giat vegetasi terumbu karang..kita koordiansi dengan Pemda dan KKP Kab.Clp...atau giat seperti menyelenggarakan penanaman mangrove di pesisir cilapkoordiansi dengan Pemda dan KKP Kab.Clp..., dan pembinaan komunitas maritim di wilayah Cilacap kita lakukan setiap bulan kadang tempatnya selau berganti atau bergantian...sesuai dengan kesibukan instansi masing-masing....giat melaksanakan kegiatan budi daya perikanan ini jadi program Lanal dalam Binpotmar.... dan lainnya sesuai tugas yang dibebankan oleh Lanal.....

#### Pertanyaan

Bagaimana Lanal Cilacap dalam pengawasan terhadap wilayah perairan dan pesisir ?

#### Jawaban

Kita tahu bahwa sesuai dengan UU TNI bahwa bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.....

Bahwa Tugas TNI AL sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, yaitu: melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang

pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Bahwa TNI AL dalam melaksanakan penegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi....saya selaku DanLanal Cilacap dalam melaksanakan operasi keamanan laut di kawasan perairan laut Cilacap....disamping Lanal Cilacap melaksanakan kmla juga...kami juga melaksanakan pengawasan terhadap imigran gelap yang masuk wilayah perairan Cilacap...apalagi kita ketahui mungkin jamannya komandan tahun 2012 sampai 2014 sering terjadi kita menemukan imigran gelap.....Lanal Cilacap dalam melaksanakan pengawasan perairan tetapi juga melaksanakan peran yang berlebih....kita harus mengevakuasi terhadap imigran gelap....ini masalah kemanusiaan...dan juga kita melibatkan masyarakat desa pesisir ..kita kan mempunyai binaan terhadap masyarakat desa pesisir juga di wilayah Cilacap sekitarnya....jadi kita melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat kita lakukan terus menerus dalam rangka melaksanakan pengawasan di wilayah perairan dan desa pesisir.

### **TRANSKRIP JAWABAN**

Bapak Pardemuan Sebayang, Kasi deportasi Imigrasi Kemenkum dan HAM, Ruang staf Kasi Deportasi Dirjen Imigrasi, Jakarta,  
25 Juli 2017.

#### Pertanyaan

Bagaimana kebijakan Imigran Gelap

#### Jawaban

Jadi kita mengawali pak...tupoksi Dirjen Imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Jadi...dalam Undang-Undang ini ...kalau kita bacakan dengan mendefinisikan penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Jadi kalau kita lihat .....pengertian Imigran dapatbisa juga diklarifikasi istilah imigran gelap..... karena tidak semua pendatang tersebut datang dengan tujuan bermigrasi ke Indonesia..... Rata-rata mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih baik di negeri orang adalah dibedakan dengan mereka yang terusir atau terpaksa datang (*forced migration*) karena keamanannya terancam dan sulit bertahan tinggal di negara.....jadi kadang mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih baik adalah para imigran ataupun migran.....

Jadi kalau ....Imigran ada yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan ada pula yang tak terdaftar (*unregistered/ undocumented*). Mereka kadang juga ... yang terdaftar bisa masuk ke suatu negeri secara resmi (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun kemudian tidak kunjung keluar (*overstay*)..... Jenis lainnya adalah yang masuk melalui pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen yang resmi..... Yang terakhir ini pantas disebut

sebagai imigran gelap. Definisi ini sesungguhnya membatasi upaya pengawasan terhadap imigran gelap. ....jadi secara definisi lingkup pengawasan imigran dibatasi oleh institusi yang mempunyai kewenangan penegakkan hukum seperti kantor Imigrasi..... artinya tindak pidana keimigrasian yang bisa melaksanakan pengawasan ..... Dengan demikian unsur lainnya dapat bertindak untuk melakukan pengawasan penyelundupan manusia atau imigran gelap yang di atur dalam perundang-undangan.....

### Pertanyaan

Bagaimana strategi pengawasan imigran gelap?

### Jawaban

Keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan....mempunyai dampak....

Jadi kalau lihat definisi dari kebijakan tersebut....dalam kebijakan ini mendefinisikan penerima bebas visa kunjungan adalah orang asing warga suatu negara, Pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu. Kebijakan tersebut, terdapat 169 negara yang masuk daftar bebas visa kunjungan ke Indonesia.....

Menurut Sesditjen Imigrasi menjelaskan .....kebijakan bebas visa dari satu sisi positif untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, namun dari dampak negatifnya, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa tersebut oleh warga negara asing. Dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan pandangan Sesditjen Imigrasi dengan diberlakukan bebas visa masuk terhadap 169 negara, akan menambah beban terhadap fungsi pengawasan dari pihak imigrasi, artinya lalulintas keluar masuknya orang dari berbagai negara sulit dilakukan pengawasan oleh imigrasi dan lemahnya koordinasi antara pihak imigrasi imigrasi dengan instansi terkait.....

## **TRANSKRIP JAWABAN**

Bapak Tokoh Nelayan

Tanggal 24 Juli 2017

### Pertanyaan

Apa manfaat dari Pelaksanaan Binpotmar ?

### Jawaban

Menurut saya bersama-sama teman-teman nelayan ...adanya Angkatan Laut atau Posal disini dan Lanal dalam melaksanakan Binpotmar, seperti yang dilaksanakan Lanal mengerjakan MCK..semenisasi jalan disini ...kita disini sangat senang karena dapat dirasakan sangat bermanfaat bagi nelayan selama ini kalau air pasang jalan gak bisa dilewati....demikian juga saya juga melaporkan nelayan-nelayan disini juga siap melaporkan apabila ada kejadian-kejadian di laut...

## **TRANSKRIP JAWABAN**

Bapak Tokoh Masyarakat Maritim

Tanggal 24 Juli 2017

### Pertanyaan

Apa manfaat dari Pelaksanaan Binpotmar ?

### Jawaban

Saya sangat senang kehadiran Lanal Cilacap dapat menciptakan lingkungan keamanan laut yang aman dan menjaga nelayan dan pengguna laut di wilayah perairan Cilacap..... kemudian kami jelaskan lagi... dalam kegiatan Lanal .....seperti dalam kegiatan pembinaan potensi maritim, apabila Lanal butuh atau meminta bantuan kita selalu siap membantu Lanal...seperti yang kita punya industri jasa maritim (doking) kita selalu dukung Angkatan Laut...kapal-kapal yang kita punya siap untuk membantu dan digunakan sewaktu-waktu oleh Lanal Cilacap.

## **TRANSKRIP JAWABAN**

Bapak Kepala Desa Klaces

Tanggal 20 Juli 2017

### Pertanyaan

Apa manfaat dari Pelaksanaan Binpotmar ?

### Jawaban

Menurut saya bersama-sama aparat desa dan mewakili masyarakat banyak mengucapkan terima kasih kepada Angkatan laut selama ini ...karena kegiatan Binpotmar selama ini yang dilaksanakan seperti Bhakti TNI AL dapat dirasakan dan meringankan masyarakat di desa ini ....artinya desa kami merasa terbantu oleh Posal disini dan Lanal dalam melaksanakan Binpotmar ini..... jadi kita disini sangat senang kalau ada kegiatan dari Posal ...kita selalu bersama-sama dalam menjaga keamanan lingkungan disini.... Jadi adanya Posal disini dapat dirasakan sangat bermanfaat bagi nelayan selama ini ...demikian juga Posal juga membantu nelayan-nelayan disini apabila mengalami kesulitan-kesulitan di laut.....

**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN**



Gambar 1. Wawancara dengan Mayjen TNI Mar Tomi Basari Natanegara  
Lokasi: Kantor Spotmar Mabesal, Jakarta, 13 Juli 2017.



Gambar 2. Wawancara dengan Brigjen TNI Mar I Ktut Suwarya  
Lokasi: Kantor Dispotmar Mabesal, Jakarta, 14 Juli 2017.



Gambar 3. Wawancara dengan Kolonel Laut (P) Agus Prabawa  
Lokasi: Kantor Lanal Cilacap, Cilacap, 28 Juli 2017.

Wawancara Penelitian Dengan Imigrasi



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Edo Kailan Hanif  
Lokasi: Kantor Kantor Imigrasi Cilacap, Cilacap, 27 Juli 2017.



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Pardemuan Sebayang  
Lokasi: Kantor Kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, 25 Juli 2017.